



SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

RENSTRA

**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
2025-2029**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	ii
Lembar Pernyataan.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	17
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	21
2.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	57
2.5 Isu Strategis Perangkat Daerah	61
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	63
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Provinsi Jawa Tengah	63
3.2 Strategis dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	67
3.3 Manajemen Risiko Strategis Sekretariat Daerah	70
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	77
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	77
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.....	132
BAB V PENUTUP.....	144

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Komposisi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Kondisi Bulan per 1 Januari 2025	18
Tabel	2.2	Sarana dan Prasarana Penunjang	20
Tabel	2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024	23
Tabel	2.4	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Peayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provnsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	56
Tabel	2.5	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	57
Tabel	2.6	Perumusan Isu Strategis.....	61
Tabel	3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	65
Tabel	3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.....	68
Tabel	3.3	Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	71
Tabel	4.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029	78
Tabel	4.2	Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.....	132
Tabel	4.3	Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	142
Tabel	4.4	Indikator Kinerja Kunci	143

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta berkomitmen untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Tahun 2025-2029 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Semarang, 16 September 2025
a.n. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Asisten Administrasi

Dr. Dhoni Widiyanto, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197310151997031002



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mendasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan telah dilantiknya Gubernur terpilih Jawa Tengah Periode masa Jabatan 2025-2030, maka disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah menyusun dokumen Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029. Renstra tersebut sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan sekaligus penjabaran atas pembangunan jangka menengah daerah di lingkup Sekretariat Daerah. Renstra Sekretariat Daerah menyajikan tiga aspek utama, yaitu sasaran yang hendak dicapai; strategi dan arah kebijakan pencapaiannya; serta perumusan program dan kegiatan. Dokumen Renstra Sekretariat Daerah kemudian akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029 dilakukan melalui proses identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah; penerjemahan kewenangan melalui tugas dan fungsi Setda sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Tahun 18 Tahun 2016, Permendagri Nomor 56 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah maka dirumuskan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan; serta penetapan target kinerja dan proyeksi kebutuhan pendanaanya.

Renstra Sekretariat Daerah memandang kualitas kebijakan daerah sebagai fokus dan target transformasi yang strategis pada tahun 2025-2029. Peningkatan kualitas kebijakan pada seluruh urusan pembangunan daerah akan meningkatkan kualitas proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil-hasil pembangunan daerah. Hal tersebut, diharapkan mampu meningkatkan peran Sekretariat Daerah dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

23. Keputusan Menteri Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan pedoman bagi seluruh Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan untuk:

- 1). Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 2). Mendorong tercapainya sasaran pembangunan khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 3). Mengetahui hal-hal yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Tujuan dan Sasaran.
- 4). Sebagai acuan penerapan strategi dan arah kebijakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
- 5). Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

b. Tujuan

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Sebagai alat sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan antara RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.
- 2). Sebagai dasar menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 3). Sebagai dasar pengukuran kinerja sampai dengan akhir pelaksanaan Renstra 2025-2029 bagi Biro-Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 4). Sebagai dasar bagi masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk melakukan pengawasan atas kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- 5). Menentukan arah kegiatan untuk meletakkan dasar sistem pemerintahan daerah yang memperhatikan kerangka regulasi dan sebagai dasar perumusan kebijakan strategis untuk dijabarkan dalam program kerja.

1.4. Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Sekretariat Daerah berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Sekretariat Daerah termasuk amanat regulasinya, dan dilengkapi dengan uraian secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, serta nilai strategis Renstra terutama keterkaitan Renstra dengan RPJMD, dan Renja Sekretariat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Sekretariat Daerah, serta susunan garis besar isi masing-masing bab dalam Renstra Sekretariat Daerah.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2018-2023 dan RPD Tahun 2024-2026, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Sekretariat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretaris Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Sekretariat Daerah, struktur organisasi Sekretariat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Sekretaris Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Sekretariat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

- 2.2 Sumber Daya Sekretariat Daerah, memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah, bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Sekretariat Daerah periode sebelumnya, dan indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah.
- 2.4 Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah, permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam dokumen ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan Sekretariat Daerah sesuai dengan tupoksi masing-masing Sekretariat Daerah. Permasalahan yang teridentifikasi harus dapat dijawab melalui strategi, arah kebijakan, dan kinerja yang akan diwujudkan pada bab berikutnya.
- 2.5 Isu Strategis Sekretariat Daerah, merupakan potensi atau tantangan yang akan dihadapi oleh Sekretariat Daerah ke depan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran didapatkan dari kertas kerja cascading perangkat daerah yang telah disusun sebelumnya.

 - a. Tujuan Sekretariat Daerah

Tujuan Sekretariat Daerah merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam satu periode tertentu dan dirumuskan secara spesifik dan realistis serta dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis Sekretariat Daerah. Tujuan Sekretariat Daerah menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi Sekretariat Daerah. Tujuan merupakan *ultimate outcome* dari Sekretariat Daerah yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan. Perumusan tujuan dilakukan dengan mengambil intisari dari pernyataan isu, permasalahan, dan peluang.
 - b. Sasaran Sekretariat Daerah

Sasaran Sekretariat Daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran mendasarkan pada tugas dan fungsi Sekretariat

Daerah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan pada biro-biro lingkup Sekretariat daerah. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *intermediate outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah.

3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah akan dicapai. Sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Rumusan strategi yang disusun harus bersifat operasional, yang dapat dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan Sekretariat Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Sedangkan arah kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Perumusan strategi dan arah kebijakan memperhatikan pohon kinerja dan cascading yang sudah disusun.

3.2 Manajemen Risiko Strategis Sekretariat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah dilakukan pada konteks tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, maupun sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dinilai memiliki risiko tinggi untuk dilakukan pengelolaan terhadap risikonya. Identifikasi risiko dilakukan tidak hanya pada risiko strategis dan risiko operasional, namun juga termasuk risiko lainnya seperti risiko fraud, risiko kemitraan, risiko legal, dan lainnya. Proses manajemen risiko seluruhnya dituangkan dalam lampiran Renstra Sekretariat Daerah.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah

Subbab ini memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, dan

pendanaan indikatifnya. Penentuan program dan kegiatan selaras dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Selain penjabaran dan penjelasan program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, dalam subbab ini juga dijelaskan sub kegiatan yang mendukung program-program prioritas daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Sekretariat Daerah
- Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah, termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV. Selain IKU Sekretariat Daerah, juga ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang merupakan indikator penyelenggaraan bidang urusan Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidahkaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

Lampiran berisi Pohon Kinerja, Cascading dan Manajemen Risiko Sekretariat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah (Sekda) yang bertugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat serta pelayanan administratif. Guna melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- 5) pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Instansi Daerah; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga Asisten Sekda, yaitu: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; Asisten Ekonomi dan Pembangunan; dan Asisten Administrasi. Masing-masing Asisten membawahi 3 (tiga) Biro.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu SEKDA dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama, Biro Hukum, dan Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan serta Perangkat Daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, hukum, dan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan serta perangkat daerah di lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, hukum, dan

kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan serta Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;

- 3) pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, hukum, dan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan serta Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang pemerintahan, hukum dan dan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan;
- 5) pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama, hukum, dan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan serta Perangkat Daerah di lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh SEKDA.

Asisten Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai tugas, membantu SEKDA dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di bidang Ekonomi dan Pembangunan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN pada Biro Perekonomian, Biro BUMD dan BLUD, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah serta Perangkat Daerah lingkup ekonomi dan pembangunan. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perekonomian, badan usaha milik daerah, dan administrasi pembangunan daerah serta perangkat daerah lingkup ekonomi dan pembangunan;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perekonomian, badan usaha milik daerah, dan administrasi pembangunan daerah serta perangkat daerah lingkup ekonomi dan pembangunan;
- 3) pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian, badan usaha milik daerah, dan administrasi pembangunan daerah serta perangkat daerah lingkup ekonomi dan pembangunan;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang ekonomi dan pembangunan;
- 5) pengoordinasian pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perekonomian, badan usaha milik daerah, dan administrasi pembangunan daerah serta perangkat daerah lingkup ekonomi dan pembangunan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh SEKDA

Asisten Administrasi mempunyai tugas, membantu SEKDA dalam pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubernur di bidang

organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Biro Organisasi, Biro umum dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa serta Perangkat Daerah lingkup administrasi. Asisten Administrasi mempunyai fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi, umum dan pengadaan barang dan jasa serta perangkat daerah lingkup administrasi;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang organisasi, umum dan pengadaan barang dan jasa serta perangkat daerah lingkup administrasi;
- 3) pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, umum dan pengadaan barang dan jasa serta perangkat daerah lingkup administrasi;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di bidang administrasi;
- 5) pengoordinasian pelayanan administrasi dan pembinaan sumber daya ASN di bidang organisasi, umum dan pengadaan barang dan jasa serta perangkat daerah lingkup administrasi; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh SEKDA.

Guna pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah yang dibentuk sembilan Biro yang dikepalai oleh Kepala Biro. Tugas dan Fungsi Biro-biro lingkup Sekretariat Daerah.

Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja sama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama. Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja sama mempunyai Fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan;
- 5) pelaksanaan fasilitasi sekretariat perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- 6) pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan kerja sama; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Tugas Biro Hukum yaitu melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum, Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan jaringan dokumentasi serta informasi hukum. Biro Hukum mempunyai Fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum;
- 5) pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan yaitu melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang kesejahteraan rakyat, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang bina mental spiritual, pelayanan dasar, dan non pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai Fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, pelayanan dasar, dan non pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina mental spiritual, pelayanan dasar, dan non pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina mental spiritual, pelayanan dasar, dan non pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan;

- 5) pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bina mental spiritual, pelayanan dasar, dan non pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan; dan
- 6) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Perekonomian yaitu melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang Perekonomian, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kebijakan perekonomian, kebijakan pertanian dan kebijakan lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral. Biro Perekonomian mempunyai Fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kebijakan perekonomian, kebijakan pertanian dan kebijakan lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kebijakan perekonomian, kebijakan pertanian dan kebijakan lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebijakan perekonomian, kebijakan pertanian dan kebijakan lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral;
- 4) membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang perekonomian;
- 5) pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kebijakan perekonomian, kebijakan pertanian dan kebijakan lingkungan hidup, kehutanan dan energi sumber daya mineral;
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi Dan Pembangunan.

Biro BUMD dan BLUD yaitu melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang BUMD dan BLUD, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan, badan usaha milik daerah non keuangan dan badan layanan umum daerah. Biro BUMD dan BLUD mempunyai Fungsi:

- 1) pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan, badan usaha milik daerah non keuangan dan badan layanan umum daerah;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas badan usaha milik daerah jasa keuangan, badan usaha milik daerah non keuangan dan badan layanan umum daerah;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan, badan usaha milik daerah non keuangan dan badan layanan umum daerah;

- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah;
- 5) pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang badan usaha milik daerah jasa keuangan, badan usaha milik daerah non keuangan dan badan layanan umum daerah; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Biro Administrasi Pembangunan Daerah yaitu melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi pembangunan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Biro Administrasi Pembangunan Daerah mempunyai Fungsi:

- 1) pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang administrasi pembangunan daerah;
- 5) pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ekonomi dan Pembangunan.

Biro Organisasi yaitu melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan

akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi. Biro Organisasi mempunyai Fungsi:

- 1) pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
- 4) pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang organisasi;
- 5) pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN dibidang kelembagaan, tata laksana dan pelayanan publik, dan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

Biro Umum yaitu melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang rumah tangga Setda, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan. Biro Umum mempunyai Fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang rumah tangga Setda, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;
- 2) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang rumah tangga Setda, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang rumah tangga Setda, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan;
- 4) pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya asn di bidang rumah tangga Setda, hubungan masyarakat dan protokol, tata usaha dan rumah tangga pimpinan; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

Biro Pengadaan Barang/Jasa yaitu melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengeloaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa. Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai Fungsi:

- 1) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang pengeloaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

- 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- 4) Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi.

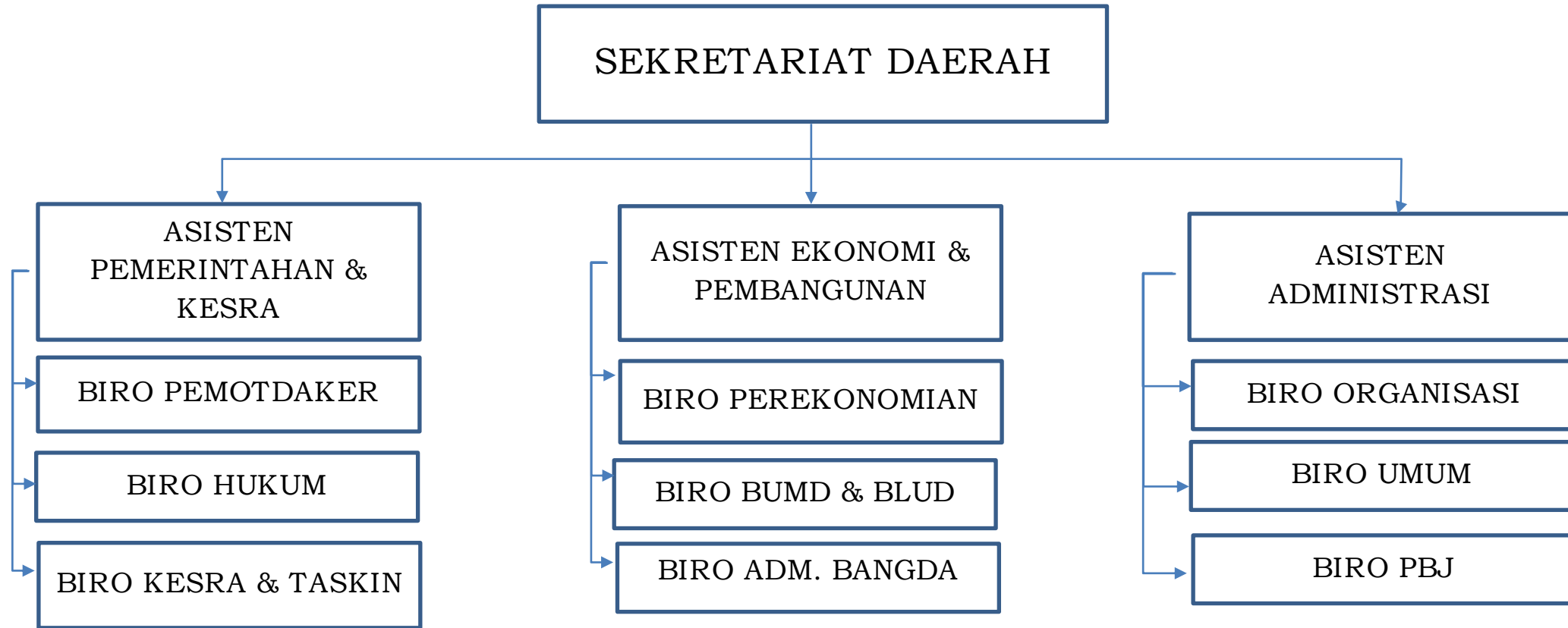
b. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Sekretaris Daerah membawahkan:

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama; Biro Hukum; serta Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, yang membawahi Biro Perekonomian; Biro BUMD dan BLUD; serta Biro Administrasi Pembangunan Daerah;
- 3) Asisten Administrasi, yang membawahi Biro Organisasi; Biro Umum; serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariah Daerah Provinsi Jawa Tengah



2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan dan pembangunan didukung sumberdaya antara lain:

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah didukung oleh aparatur sipil negara (ASN) berjumlah sekitar 513 orang. Komposisi pegawai Sekretariat Daerah cukup beragam dari segi jenjang kepangkatan dan kualifikasi. Data profil pegawai menunjukkan bahwa PNS di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebar pada berbagai golongan, dengan proporsi terbesar pada golongan III dan IV yang mempunyai pengetahuan di bidang Pemerintahan, hukum, informatika, dan manajemen. Hal ini menggambarkan banyaknya pegawai pada level pelaksana dan administrator, sehingga peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM menjadi perhatian penting. Pola pembinaan pegawai di Sekretariat Daerah selama ini belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan kinerja. sehingga program pengembangan SDM terus diupayakan agar pegawai memiliki kompetensi yang sesuai tuntutan tugas.

Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel Komposisi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Kondisi per 1 Januari 2025.

Tabel 2.1

Komposisi PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Kondisi Bulan per 1 Januari 2025

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN						GOLONGAN KEPANGKATAN				JABATAN/ESELON				
		L	P	SD +SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	I/P3 K	II	III	IV	I	II	STRUKTURA L+III	JFT	JFU
1	Sekretaris Daerah	1						1	0				1	1				
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1						1					1		1			
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	1							1				1		1			
4	Asisten Administrasi	1							1				1		1			
5	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja sama	22	25	0	3	0	28	16	0	9	0	25	13	0	1	2	13	31
6	Biro Hukum	30	17	0	2	3	31	11	0	7	1	32	7	0	1	1	36	9
7	Biro Kesra	18	22	0	0	5	25	10	0	6	1	26	7	0	0	0	9	31
8	Biro Perekonomian	21	14	0	2	7	15	11	0	2	6	22	5	0	1	1	3	30
9	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	19	16	0	2	1	23	9	0	6	1	19	9	0	1	1	15	18

Renstra Setda 2025-2029

No.	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN						GOLONGAN KEPANGKATAN				JABATAN/ESELON				
		L	P	SD +SMP	SMA	DIII	S1	S2	S3	I/P3 K	II	III	IV	I	II	STRUKTURA L+III	JFT	JFU
10	Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa *)	61	22	0	3	5	55	17	3	14	4	56	9	0	0	5	56	22
11	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	21	13	0	2	1	19	12	0	7	1	18	8	0	0	1	16	17
12	Biro Organisasi	25	23	0	2	5	25	16	0	3	3	34	8	0	1		21	26
13	Biro Umum	102	38	7	42	12	64	15	0	15	26	92	7	0	0	11	12	117
JUMLAH		323	190	7	58	39	285	119	5	69	43	324	77	1	8	22	181	301

Sumber : Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Jateng, 1 Januari 2025

b. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan Prasarana: Kantor Sekretariat Daerah menempati kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jl. Pahlawan No. 9, Semarang.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah diperlukan sarana dan prasarana penunjang. Adapun sarana dan prasarana penunjang/aset yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak, sebagaimana tercantum pada tabel Rekapitulasi Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel Rekapitulasi Aset Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2.2
Sarana dan Prasarana Penunjang

NO.	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG
1	2	3	4
1	1.3.1.01	TANAH	15
2	1.3.2.01	ALAT BESAR	40
4	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	315
5	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	19
6	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	-
7	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	8.815
8	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	1.787
9	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	13
10	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	-
	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	8
11	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	1.936
12	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	-
13	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	-
14	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-
15	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-
16	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	-
17	1.3.2.16	ALAT PERAGA	-

NO.	KODE BIDANG BARANG	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG
18	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-
19	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	-
20	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	25
21	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	45
22	1.3.3.02	MONUMEN	-
23	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	-
24	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	-
25	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-
26	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	-
27	1.3.4.03	INSTALASI	-
28	1.3.4.04	JARINGAN	-
29	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	10.747
30	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/ KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	52
31	1.3.5.03	HEWAN	-
32	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	-
33	1.3.5.05	TANAMAN	-
34	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-
35	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-
36	1.3.6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGGERJAAN	-
		JUMLAH	23.817

Sumber : Biro Umum Sekretariat Daerah Prov. Jateng, 31 Desember 2024

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kinerja pelayanan OPD merupakan capaian kinerja OPD yang diperoleh dari perbandingan antara capaian kinerja pelayanan OPD dengan kinerja yang semula ditargetkan, serta dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Dalam kurun waktu RPJMD sebelumnya, kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan beberapa capaian positif di bidang tata kelola pemerintahan. Salah satu indikator kinerja utama adalah peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Provinsi Jawa Tengah berhasil mempertahankan predikat “BB” (Sangat Baik) atas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

selama empat tahun berturut-turut sejak 2020, dan meningkat menjadi predikat “A” (Memuaskan) atas evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024. Capaian ini menandakan bahwa perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah berlangsung dengan baik dan sesuai prinsip akuntabilitas.

Upaya digitalisasi dan integrasi sistem informasi juga telah membuahkan hasil. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemprov Jawa Tengah meningkat signifikan dari skor 2,74 pada tahun 2021 menjadi 4,26 pada tahun 2023 (skala 5), meraih predikat “memuaskan” sebagai salah satu yang tertinggi secara nasional. Penghargaan *Digital Government Award* yang diterima Jawa Tengah tahun 2024 dari Presiden RI merupakan pengakuan atas kemajuan tersebut. Peningkatan indeks SPBE ini menunjukkan bahwa berbagai inovasi e-government (misalnya aplikasi LaporGub, Open Data Jateng, e-Planning, e-Budgeting) yang dikoordinasikan Sekretariat Daerah telah diimplementasikan efektif, sehingga mendorong transparansi dan kecepatan layanan administrasi publik.

Di samping itu, Sekretariat Daerah juga berperan dalam memfasilitasi perumusan produk hukum dan kebijakan daerah. Dalam periode lalu, Sekretariat Daerah melalui Biro Hukum telah mengoordinasikan penyusunan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur strategis, serta menjalin kerja sama antar daerah. Namun, kinerja fungsi koordinatif ini masih akan ditingkatkan untuk memastikan sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Tingkat kesesuaian antara perencanaan dan realisasi program terus dievaluasi; sebelumnya masih dijumpai ketidaksesuaian rencana kerja dengan realisasi kegiatan di beberapa perangkat daerah. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi pembangunan daerah agar pelaksanaan program sesuai rencana dan target kinerja tercapai.

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Strategis Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Tahun 2024-2026, capaian sampai dengan tahun 2024 sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(5)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
A. Renstra Tahun 2018-2023																			
Persentase Kebijakan yang Efektif	%				80	81	83	84		86,08	81	80,4	80		108%	100%	97%	95%	
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%				75	81	83	84		83,13	81	86,5	85		111%	100%	104%	101%	
Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	%				76	76	78	79		77,50	76	Na	Na		102%	100%	Na	Na	
Nilai IKM Setda	%				Na	Na	78	78,5		Na	Na	85,8	78,5		Na	Na	110%	100%	
Nilai Sakip Setda	%				Na	Na	73,77	73,97		Na	Na	77,2	73,97		Na	Na	105%	100%	
Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%				85	85	85	85		100	85	Na	Na		118%	100%	Na	Na	
Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%				85	85	85	85		100	85	Na	Na		118%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%				70	75	85	90		70	75	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Efektivitas Kebijakan bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	%				Na	Na	90	90		Na	Na	100	100		Na	Na	111%	111%	
Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%				80	85	85	85		80,65	85	Na	Na		101%	100%	Na	Na	
Presentase peningkatan kualitas layanan keagamaan	%				Na	Na	40	45		Na	Na	42,9	45		Na	Na	107%	100%	
Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	%				93	91	93	94		100	91	Na	Na		108%	100%	Na	Na	
Persentase efektifitas produk hukum daerah	%				Na	Na	95	95		Na	Na	100	100		Na	Na	105%	105%	
Persentase Efektivitas Penyelesaian Masalah Hukum	%				Na	Na	95	95		Na	Na	100	100		Na	Na	105%	105%	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	%				87	87	93	94		100	87	Na	Na		115%	100%	Na	Na	
Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%				75	83	84	85		99	83	Na	Na		133%	100%	Na	Na	
Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%				Na	Na	88	89		Na	Na	91,97	92		Na	Na	105%	103%	
Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%				82	82	84	85		99	82	Na	Na		121%	100%	Na	Na	
Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD	%				81	82	83	84		85	82	Na	Na		105%	100%	Na	Na	
Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	%				90	91	93	94		100	91	Na	Na		111%	100%	Na	Na	
peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%				90	91	93	94		100	91	Na	Na		111%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	%				90	91	93	94		100	91	Na	Na		111%	100%	Na	Na	
Nilai Kematangan Organisasi Daerah	skor				29	22	28	31		31,84	22	Na	Na		110%	100%	Na	Na	
Presentase OPD dengan nilai Kematangan Organisasi dalam kategori minimal sedang	%				Na	Na	75,61	85,37		Na	Na	100	100		Na	Na	132%	117%	
presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%				70,00	64.32	89	100		93,22	64,32	Na	Na		133%	####	Na	Na	
Persentase OPD yang predikat SAKIP nya A	%				Na	Na	60,98	85,37		Na	Na	65,85	86,00		Na	Na	108%	101%	
Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%				78	78	87	92		83,67	78	Na	Na		107%	100%	Na	Na	
Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	%				50	40	70	85		68,57	40	Na	Na		137%	100%	Na	Na	
Persentase OPD dengan Nilai PMPRB nya B ke	%				Na	Na	83,67	87,76		Na	Na	91,8	93		Na	Na	110%	106%	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%				70	84	92	96		70	84	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah bidang bidang SDA	%				Na	Na	80	82		Na	Na	82,6	82		Na	Na	103%	100%	
Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang	%				85	85	85	85		70	85	Na	Na		82%	100%	Na	Na	
Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	%				70	89	93	95		70	89	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Efektivitas Pelayanan	%				30	65	67	70		32	65	92,2	93		107%	100%	138%	133%	
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%				71	85	85	85		85,71	85	Na	Na		121%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	%				70	84	92	96		80	84	Na	Na		114%	100%	Na	Na	
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%				80	100	100	100		100	100	Na	Na		125%	100%	Na	Na	
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%				80	85	85	85		83,33	85	Na	Na		104%	100%	Na	Na	
Persentase capaian kinerja perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat	%				Na	Na	85	90		Na	Na	86,7	90		Na	Na	102%	100%	
Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	%				80	100	100	100		40	100	Na	Na		50%	100%	Na	Na	
Efektifitas kebijakan perekonomian daerah	%				Na	Na	76	78		Na	Na	76,9	78		Na	Na	101%	100%	
Ketercapaian Laba BUMD	%				Na	Na	70	75		Na	Na	98,2	99		Na	Na	140%	132%	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
BIRO PEMOTDAKER																			
Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang	%				Na	Na	90	90		Na	Na	100	100		Na	Na	111%	111%	
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	%				100	100	100	100		100,00	100,00	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	%				100	100	100	100		100,00	100,00	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Efektivitas kerjasama daerah	%				Na	Na	90	95		Na	Na	100	100		Na	Na	111%	105%	
Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase tertib administrasi pemerintahan	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%				Na	Na	90	95		Na	Na	100	100		Na	Na	111%	105%	
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Pemotdaker dan Asisten	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
BIRO ORGANISASI																			
Presentase Capaian Administrasi Kepegawaian (Biro	%				100	100	100	100		100	100	100	100		100%	100%	100%	100%	
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan (Biro Organisasi)	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Dis	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	%				85	87	92	97		85	82,50	Na	Na		100%	95%	Na	Na	
Persentase Kabupaten/Kota yang Indeks Reformasi Birokrasinya meningkat	%				Na	Na	85,71	91		Na	Na	85,71	91		Na	Na	100%	100%	
Persentase Kabupaten/Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	%				45	57	71	85		45	88,57	Na	Na		100%	155%	Na	Na	
Persentase OPD yang nilai PMPRB nya meningkat	%				Na	Na	91,84	95,92		Na	Na	91,84	95,92		Na	Na	100%	100%	
Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%				51	31	40	48		51	52,78	Na	Na		100%	170%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%				Na	Na	77,14	80		Na	Na	77,1	80		Na	Na	100%	100%	
Persentase OPD yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya	%				Na	Na	29,27	34,15		Na	Na	29,3	34,15		Na	Na	100%	100%	
Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	%				84	85	85	86		84	89,5	Na	Na		100%	105%	Na	Na	
Efektifitas Pelaksanaan Analisis Jabatan	%				Na	Na	85,36	87,8		Na	Na	85,4	87,8		Na	Na	100%	100%	
Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%				67,99	79	89,19	100		67,99	79,44	85,9	89,47		100%	101%	96%	89%	
Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	%				100	83	92	100		100	100	Na	Na		100%	120%	Na	Na	
Persentase OPD yang nilai SAKIP nya meningkat	%				Na	Na	73,17	85,37		Na	Na	87,8	85,37		Na	Na	120%	100%	
Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	%				30,36	35	47,06	60		34,25	42,66	73,7	85,63		113%	122%	157%	144%	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)					
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%				100	51	57	63		100	100	Na	Na		100%	196%	Na	Na		
BIRO KESRA																				
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na		
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat,	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na		
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial,	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na		
Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	%				85	90	95	100		85	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na		
Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan	%				85	90	95	100		85	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na		

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang	%				85	90	95	100		85	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%				85	90	95	100		85	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang	%				85	85	95	100		85	85	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan dasar	%				Na	Na	90	95		Na	Na	91,64	95		Na	Na	102%	100%	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian kinerja program bidang pelayanan non dasar	%				Na	Na	90	95		Na	Na	100	100		Na	Na	111%	105%	
Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%				Na	Na	40	42		Na	Na	40	42		Na	Na	100%	100%	
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Kesejahteraan Rakyat	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Kesra	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
BIRO HUKUM																			
Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	%				91	92	93	94		100	92	Na	Na		110%	100%	Na	Na	
Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	%				Na	Na	95	96		Na	Na	100	100		Na	Na	105%	104%	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase efektifitas produk hukum daerah	%				93	93	93	93		100	100	Na	Na		108%	108%	Na	Na	
Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%				91	92	93	94		100	92	Na	Na		110%	100%	Na	Na	
Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	%				91	92	93	94		100	92	Na	Na		110%	100%	Na	Na	
Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji	%				91	92	93	94		100	92	Na	Na		110%	100%	Na	Na	
Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%				Na	Na	95	96		Na	Na	100	100		Na	Na	105%	104%	
Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dievaluasi atau difasilitasi	%				Na	Na	95	95		Na	Na	100	100		Na	Na	105%	105%	
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Hukum	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Hukum	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
BIRO ISDA																			
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Kelautan	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	%				85	90	95	100		85	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	%				85	90	95	100		85	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	%				85	90	95	100		85	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%				100	90	95	100		100	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%				100	90	95	100		100	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%				100	90	95	100		100	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%				Na	Na	90	95		Na	Na	97,1	95		Na	Na	108%	100%	
Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%				Na	Na	95	96		Na	Na	99	96		Na	Na	104%	100%	
Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%				Na	Na	87	90		Na	Na	93,4	90		Na	Na	107%	100%	
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Infrastruktur dan SDA dan Asisten Ekbang	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
BIRO PEREKONOMIAN																			
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal	%				80	80	80	80		80	80	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian,	%				85	90	93	96		85	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	%				85	88	90	93		85	88	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Perwisata	%				90	93	95	97		90	93	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	%				89	90	93	95		89	90	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	%				90	75	96	98		90	75	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%				85	87	90	92		85	87	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%				83	85	89	90		83	85	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase tingkat kesehatan BUMD	%				82	70	88	90		82	70	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%				Na	Na	80	82		Na	Na	87,5	82		Na	Na	109%	100%	
Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%				Na	Na	75	77		Na	Na	75	77		Na	Na	100%	100%	
Tingkat Kesehatan BUMD Aneka Usaha	%				Na	Na	75	80		Na	Na	85,7	80		Na	Na	114%	100%	
Tingkat Kesehatan BUMD Jasa Keuangan	%				Na	Na	80	85		Na	Na	94,6	85		Na	Na	118%	100%	
Nilai kemandirian BLUD	%				Na	Na	50	55		Na	Na	69,3	55		Na	Na	139%	100%	
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Presentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
BIRO APBJ																			
Persentase Aduan dan Sengketa yang	%				73	76	79	80		73	76	Na	Na		100%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	%				73	76	79	80		73	76	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Keberhasilan Pengadaan	%				91	92	93	95		91	92	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Permasalahan Kelembagaan	%				Na	Na	90	92		Na	Na	90	92		Na	Na	100%	100%	
Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	%				Na	Na	85	90		Na	Na	95,27	90		Na	Na	112%	100%	
Persentase Fasilitas Pengadaan	%				Na	Na	93	95		Na	Na	94,80	95		Na	Na	102%	100%	
Persentase Capaian Administrasi	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
BIRO ADM. BANGDA																			
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan	%				85	85	85	85		100	85	Na	Na		118%	100%	Na	Na	
Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai	%				80	81	84	85		80,68	81	Na	Na		101%	100%	Na	Na	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	%				87	88	88	88		95,24	88	Na	Na		109%	100%	Na	Na	
Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai	%				84	84	89	90		84,35	84	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%				100	100	100	100		100	100	Na	Na		100%	100%	Na	Na	
Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
Persentase realisasi bantuan	%				Na	Na	83	85		Na	Na	99,6	85		Na	Na	120%	100%	

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%				Na	Na	80	85		Na	Na	92	85		Na	Na	115%	100%	
Capaian Pelaksanaan APBD	%				Na	Na	98	98,5		Na	Na	99,09	98,5		Na	Na	101%	100%	
Capaian Pelaksanaan APBN	%				Na	Na	95	95,50		Na	Na	98,99	95,50		Na	Na	104%	100%	
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
Persentase Capaian Administrasi Umum dan Keuangan Biro Adpem	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah	%				Na	Na	100	100		Na	Na	100	100		Na	Na	100%	100%	
B. Renstra 2024-2026																			
Indeks Kematangan Kebijakan	Angka				Na	Na	Na	Na	36,1	Na	Na	Na	Na	39,93					110,6
Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	%				Na	Na	Na	Na	76	Na	Na	Na	Na	74,33					97,8

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup	%				Na	Na	Na	Na	90	Na	Na	Na	Na	93,72					104,1
Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup perekonomian dan	%				Na	Na	Na	Na	90	Na	Na	Na	Na	96,83					107,6
Persentase capaian kinerja program perangkat daerah lingkup administrasi, organisasi dan pembangunan daerah	%				Na	Na	Na	Na	80	Na	Na	Na	Na	86,3					107,9
Indeks Kepuasan Masyarakat	%				Na	Na	Na	Na	82	Na	Na	Na	Na	86,25					105,2
Indeks Manajemen Risiko	Angka				Na	Na	Na	Na	3	Na	Na	Na	Na	2,89					96,33
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA																			
Tingkat efektivitas kerjasama daerah	%				Na	Na	Na	Na	95	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	105,3
Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	%				Na	Na	Na	Na	95	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	105,3

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti	%				Na	Na	Na	Na	95	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	105,3
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
BIRO HUKUM																			
Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%				Na	Na	Na	Na	96	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	104,2
Persentase rancangan produk hukum kabupaten/kota yang dikaji	%				Na	Na	Na	Na	96	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	104,2

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum yang tertangani	%				Na	Na	Na	Na	96	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	104,2
Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%				Na	Na	Na	Na	96	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	104,2
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Hukum	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT																			
Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	%				Na	Na	Na	Na	81	Na	Na	Na	Na	81	Na	Na	Na	Na	100
Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	%				Na	Na	Na	Na	82	Na	Na	Na	Na	82	Na	Na	Na	Na	100
Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	%				Na	Na	Na	Na	54	Na	Na	Na	Na	54	Na	Na	Na	Na	100

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
BIRO PEREKONOMIAN																			
Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	%				Na	Na	Na	Na	83	Na	Na	Na	Na	83	Na	Na	Na	Na	100
Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian mikro yang diusulkan sebagai kebijakan	%				Na	Na	Na	Na	78	Na	Na	Na	Na	78	Na	Na	Na	Na	100
Persentase ketercapaian laba BUMD jasa keuangan	%				Na	Na	Na	Na	85	Na	Na	Na	Na	89,88	Na	Na	Na	Na	105,7
Persentase ketercapaian laba BUMD aneka usaha	%				Na	Na	Na	Na	81	Na	Na	Na	Na	100,7	Na	Na	Na	Na	124,3
Persentase nilai kemandirian BLUD	%				Na	Na	Na	Na	55	Na	Na	Na	Na	71,78	Na	Na	Na	Na	130,5

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
BIRO INFRASTRUKTUR DAN SDA																			
Presentase capaian kinerja program bidang pertanian	%				Na	Na	Na	Na	87	Na	Na	Na	Na	89,01	Na	Na	Na	Na	102,3
Presentase capaian kinerja program bidang lingkungan hidup dan pertambangan	%				Na	Na	Na	Na	85	Na	Na	Na	Na	99,3	Na	Na	Na	Na	116,8
Presentase capaian kinerja program bidang infrastruktur	%				Na	Na	Na	Na	85	Na	Na	Na	Na	97,33	Na	Na	Na	Na	114,5
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro ISDA dan Asisten Ekbang	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA																			
Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	%				Na	Na	Na	Na	90	Na	Na	Na	Na	94,78	Na	Na	Na	Na	105,3

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas pengadaan secara elektronik	%				Na	Na	Na	Na	80	Na	Na	Na	Na	88,67	Na	Na	Na	Na	110,8
Persentase pendampingan proses pengadaan barang/jasa, kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ) dan SDM fungsional pengelola pengadaan barang/jasa	%				Na	Na	Na	Na	81	Na	Na	Na	Na	81,25	Na	Na	Na	Na	100,3
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH																			
Capaian Pelaksanaan APBD	%				Na	Na	Na	Na	98,7	Na	Na	Na	Na	99,76	Na	Na	Na	Na	101,1
Capaian Pelaksanaan APBN	%				Na	Na	Na	Na	95,5	Na	Na	Na	Na	96,72	Na	Na	Na	Na	101,3

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi bantuan keuangan	%				Na	Na	Na	Na	85	Na	Na	Na	Na	99,21	Na	Na	Na	Na	116,7
Persentase Pemenuhan data dan Informasi bagi Pengendalian dan Analisis Pelaksanaan Pembangunan daerah	%				Na	Na	Na	Na	85	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	117,6
Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di Realisasi	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah	%				Na	Na	Na	Na	90	Na	Na	Na	Na	90	Na	Na	Na	Na	100
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100

BIRO ORGANISASI

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kabupaten/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	%				Na	Na	Na	Na	14,29	Na	Na	Na	Na	54,29	Na	Na	Na	Na	379,9
Persentase kabupaten/kota yang meningkat skor kematangan organisasinya	%				Na	Na	Na	Na	85,71	Na	Na	Na	Na	85,71	Na	Na	Na	Na	100
Persentase perangkat daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%				Na	Na	Na	Na	50	Na	Na	Na	Na	57,7	Na	Na	Na	Na	115,4
Persentase perangkat daerah yang skor kematangan organisasinya dalam kategori tinggi	%				Na	Na	Na	Na	66	Na	Na	Na	Na	66	Na	Na	Na	Na	100
Persentase unit pelayanan publik (UPP) yang mengimplementasikan standar pelayanan	%				Na	Na	Na	Na	88,73	Na	Na	Na	Na	88,73	Na	Na	Na	Na	100
Persentase perangkat daerah dengan nilai SAKIP A	%				Na	Na	Na	Na	64,28	Na	Na	Na	Na	64,28	Na	Na	Na	Na	100

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan hasil analisis jabatan secara efektif	%				Na	Na	Na	Na	88,1	Na	Na	Na	Na	92	Na	Na	Na	Na	104,4
Persentase perangkat daerah yang nilai penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB)nya A	%				Na	Na	Na	Na	60	Na	Na	Na	Na	61,22	Na	Na	Na	Na	102
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
BIRO UMUM																			
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun					Rasio Capaian Tahun/Sampai Dengan Tahun (%)				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100
Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol	%				Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100	Na	Na	Na	Na	100

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Peayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Uraian	dikatif Renstra PD pada Tahun (Rp.000)					APBD pada Tahun (Rp.000)					Realisasi Anggaran Tahun/Sampai dengan Tahun (Rp.000)					Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun/Sampai Dengan Tahun (Rp.000)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I	PENDAPATAN DAERAH (PAD)	-	-	-	-	-	326.000.000	812.600.000	832.000.000	800.000.000	1.010.040.000	440.106.000	485.600.000	616.000.000	826.840.000	896.140.000	135%	60%	74%	103%	Na	20,73	(13,18)
	Retribusi Daerah	-	-	-	-	-	326.000.000	812.600.000	832.000.000	800.000.000	1.010.040.000	440.106.000	485.600.000	616.000.000	826.840.000	896.140.000	135%	60%	74%	103%	Na	20,73	(13,18)
II	BELANJA DAERAH	-	-	-	-	-	164.828.221.000	644.715.876.000	628.782.550.000	675.016.997.000	640.487.566.000	159.553.415.257	588.580.305.652	614.386.948.554	656.153.301.617	615.983.500.637	97%	91%	98%	97%	Na	53,37	66,34
	BELANJA OPERASI	-	-	-	-	-	159.544.548.000	640.691.373.000	624.032.738.000	656.033.805.000	628.542.066.000	154.279.892.637	584.603.803.452	609.709.620.380	637.319.365.175	604.331.779.535	97%	91%	98%	97%	Na	55,67	69,46
	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	93.102.759.000	103.630.731.000	107.526.291.000	114.268.943.000	123.537.963.000	89.710.867.139	102.464.923.893	104.585.679.751	109.202.844.869	110.022.961.259	96%	99%	97%	96%	Na	(0,05)	(4,60)
	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	66.441.789.000	152.406.532.000	89.888.837.000	108.543.747.000	99.258.603.000	64.569.025.498	108.946.745.559	87.164.830.629	105.889.105.306	95.755.318.276	97%	71%	97%	98%	Na	12,16	0,18
	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	384.654.110.000	426.617.610.000	433.221.115.000	405.745.500.000	405.745.500.000	373.192.134.000	417.959.110.000	422.227.415.000	398.553.500.000	398.553.500.000	Na	Na	98%	97%	Na	3,16	12,00
	BELANJA MODAL	-	-	-	-	-	5.283.673.000	4.024.503.000	4.749.812.000	18.983.192.000	11.945.500.000	5.273.522.620	3.976.502.200	4.677.328.174	18.833.936.442	11.651.721.102	100%	99%	98%	99%	Na	(11,63)	(23,53)
	Belanja Modal Pealatan dan Mesin	-	-	-	-	-	5.273.770.000	3.377.167.000	4.749.812.000	18.983.192.000	11.945.500.000	5.263.619.620	3.340.114.200	4.677.328.174	18.833.936.442	11.651.721.102	100%	99%	98%	99%	Na	(8,99)	(20,03)
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-	-	-	-		193.350.000					191.053.000				Na	Na	#DIV/0!	Na	Na	Na	Na
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	9.903.000	453.986.000				9.903.000	445.335.000				100%	98%	#DIV/0!	Na	Na	Na	Na
III	PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



2.4. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.5

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Belum Optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fungsi koordinasi antar-OPD belum efektif. 2. Monitoring dan evaluasi belum maksimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forum koordinasi belum optimal. 2. Validasi data indikator kinerja belum berjalan optimal, menyebabkan laporan Monev tidak mencerminkan kondisi faktual.
2.	Harmonisasi Kebijakan dan Regulasi Lemah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan masih kurang optimal. 2. Penyusunan Perda dan Pergub sering terlambat. 3. Penyesuaian kebijakan daerah lambat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekurangan analisis kebijakan dan Perancang Perundang-undangan. 2. Koordinasi Biro Hukum dan biro teknis kurang. 3. Perubahan regulasi pusat sering terjadi tanpa sinkronisasi.
3.	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Kurang Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Analisis Dampak Program. 2. Keterlambatan penyerapan anggaran. 3. Indikator kinerja belum terukur dengan baik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis <i>cost-benefit</i> dan efektivitas program belum digunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan rencana kerja. 2. Kekurangan SDM analisis perencanaan. 3. Minim pelatihan teknis perencanaan.
4.	Kualitas dan Kapasitas SDM Belum Merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi teknis ASN belum memadai. 2. Penguasaan teknologi informasi masih rendah. 3. Distribusi pegawai antar-biro belum seimbang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minim pelatihan berbasis kinerja 2. Resistensi ASN senior terhadap transformasi digital. 3. Rekrutmen dan rotasi pegawai belum berbasis kompetensi.
5.	Transformasi Digital dan Integrasi Sistem Belum Maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi pelayanan publik belum terintegrasi. 2. Infrastruktur TI belum memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap OPD historisnya mengembangkan aplikasi sendiri dengan database dan platform terpisah, tanpa <i>interoperabilitas</i> satu sama lain. 2. Kurangnya investasi pengembangan TI.

Bertolak dari permasalahan dan tantangan di atas, terdapat beberapa isu strategis yang harus menjadi fokus perhatian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ke depan. Isu strategis ini merupakan kondisi-kondisi krusial yang akan memengaruhi keberhasilan pencapaian visi-misi pembangunan daerah, dan karenanya perlu diutamakan dalam perumusan kebijakan dan program Sekretariat Daerah:

1. Sinergi Kebijakan dan Koordinasi Lintas Sektor. Menguatkan peran Sekretariat Daerah sebagai koordinator adalah isu strategis berikutnya. Diperlukan peningkatan sinergitas kebijakan daerah antar perangkat daerah maupun antara provinsi dengan kabupaten/kota. Isu ini mencakup penguatan mekanisme perencanaan terpadu (melalui forum-forum koordinasi, executive briefing, dll.), integrasi sistem informasi perencanaan dan keuangan, serta penajaman tugas Asisten Sekda dalam mengawal program prioritas lintas sektor. Keberhasilan menangani isu ini akan diukur dari semakin selarasnya dokumen perencanaan (RKPD, Renstra OPD) dengan pelaksanaan di lapangan, minimnya tumpang tindih program antar OPD, serta efektifnya pelaksanaan kebijakan strategis yang melibatkan banyak sektor (misalnya penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan lain-lain).
2. Peningkatan *Good Governance* melalui Reformasi Birokrasi. Tata kelola pemerintahan yang baik (akuntabel, transparan, efektif) tetap menjadi isu strategis utama. Hal ini mencakup percepatan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan seluruh OPD, penyederhanaan proses layanan administrasi, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja. Tujuan strategisnya adalah meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator keberhasilan untuk isu ini antara lain perbaikan skor akuntabilitas (SAKIP) dan indeks reformasi birokrasi, serta meningkatnya kepuasan pemangku kepentingan terhadap kinerja pemerintah provinsi.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur. Sekretariat Daerah juga mengemban isu strategis terkait peningkatan kualitas layanan internal pemerintahan, seperti layanan administrasi umum, kesekretariatan, keprotokolan, dan kehumasan pemerintah. Pelayanan administratif yang cepat, tepat, dan berorientasi pengguna (*user-friendly*) menjadi agenda strategis, sejalan dengan semangat menghadirkan birokrasi yang melayani. Di samping itu, pembinaan terhadap ASN di lingkungan Sekretariat Daerah dan OPD lain perlu diperkuat untuk memastikan aparatur memiliki disiplin dan kompetensi sesuai kebutuhan. Fokus ini selaras dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dan pembinaan ASN di Sekretariat Daerah. Indikatornya dapat berupa peningkatan skor kepuasan unit-unit OPD terhadap pelayanan Sekretariat Daerah, serta hasil evaluasi kepatuhan standar layanan public.
4. Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Mengingat tren kemajuan teknologi, isu strategis lain adalah melanjutkan dan memperluas implementasi *e-government* atau SPBE di Pemprov Jawa Tengah. Sekretariat Daerah harus mendorong integrasi berbagai aplikasi dan database lintas dinas (sejalan arahan Presiden mengenai integrasi layanan digital, serta memastikan pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Transformasi digital ini

diharapkan meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempersempit peluang korupsi, sekaligus memudahkan akses informasi bagi publik. Tantangan strategisnya adalah membangun infrastruktur TI yang andal, standar keamanan siber, serta meningkatkan kapabilitas ASN dalam memanfaatkan teknologi. Keberhasilan isu ini dapat dipantau melalui peningkatan Indeks SPBE yang sudah mencapai level memuaskan (4,26) pada 2023 dengan target naik ke kategori sangat memuaskan di masa mendatang, dan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik digital di provinsi Jawa Tengah.

5. Penguatan Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemangku Kepentingan. Sekretariat Daerah juga memiliki peran strategis dalam menjembatani hubungan antara pemerintah provinsi dengan DPRD, pemerintah pusat, swasta, serta masyarakat. Isu strategis di sini adalah bagaimana memastikan sinergi dengan para pemangku kepentingan eksternal. Ini mencakup optimalisasi fungsi fasilitasi Sekretariat Daerah dalam kerjasama antardaerah, kemitraan dengan dunia usaha/BUMN, serta koordinasi dengan instansi vertikal. Rendahnya sinergitas stakeholder di masa lalu menjadi pembelajaran bahwa forum komunikasi yang rutin dan terpadu perlu ditingkatkan. Outcome strategis yang diharapkan ialah terjalinnya koordinasi yang erat dalam penanganan isu-isu lintas wilayah (misal: pengendalian inflasi regional, penanganan bencana, investasi, dll.), sehingga Pemprov Jateng dapat bertindak proaktif dan kolaboratif bersama stakeholder untuk mencapai sasaran pembangunan.

Isu-isu strategis di atas akan menjadi landasan perumusan arah kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ke depan. Dengan fokus pada penguatan tata kelola, koordinasi, pelayanan administrasi, transformasi digital, dan kemitraan strategis, diharapkan Sekretariat Daerah dapat semakin berperan optimal sebagai lokomotif birokrasi dalam menyukseskan agenda pembangunan Jawa Tengah. Guna melengkapi identifikasi isu di atas, disusun analisis SWOT untuk menilai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kekuatan (*Strengths*) mencakup hal-hal positif internal seperti dukungan kuat dari pimpinan daerah dan struktur organisasi Sekretariat Daerah yang lengkap hingga tingkat biro. serta komitmen Pemprov terhadap transparansi dan inovasi dalam tata kelola. Kelemahan (*Weaknesses*) meliputi kelemahan internal yang masih harus diperbaiki, antara lain koordinasi lintas OPD yang belum optimal, keterbatasan SDM baik dari segi jumlah maupun kompetensi khusus, serta proses perencanaan dan evaluasi yang belum terintegrasi sepenuhnya secara digital.

Dari sisi lingkungan luar, Peluang (*Opportunities*) bagi Sekretariat Daerah antara lain dukungan kebijakan nasional di bidang reformasi birokrasi dan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang sejalan dengan upaya Pemprov Jateng, perkembangan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan untuk efisiensi administrasi, tingginya tuntutan publik terhadap transparansi yang mendorong inovasi pelayanan, serta potensi kerjasama yang lebih erat dengan pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder lain dalam pembangunan daerah. Sementara itu, Ancaman (*Threats*) eksternal yang dihadapi mencakup perubahan regulasi dari pemerintah pusat yang sangat cepat dan sering (menuntut penyesuaian daerah yang juga cepat). keterbatasan anggaran terutama dalam situasi ekonomi tertentu yang dapat memengaruhi dukungan pendanaan bagi penguatan kelembagaan, resistensi atau kendala budaya organisasi di internal birokrasi terhadap perubahan, serta

kompleksitas permasalahan lintas sektor dan wilayah (seperti kemiskinan, pengangguran, bencana) yang memerlukan koordinasi intensif dan solusi inovatif.

Hasil analisis SWOT tersebut tersaji dalam diagram empat kuadran di atas, yang akan menjadi referensi dalam merumuskan strategi Sekretariat Daerah. Dengan memahami kekuatan yang perlu dimaksimalkan, kelemahan yang harus diminimalisir, serta bagaimana memanfaatkan peluang dan mengantisipasi ancaman, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat menyusun langkah-langkah strategis yang lebih tepat sasaran. Fokus utamanya adalah mengoptimalkan peran Sekretariat Daerah sebagai pendukung Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga berbagai isu strategis dapat diatasi dan target pembangunan daerah dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 2.27.

Analisa SWOT Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

SWOT	Penjabaran SWOT
Strength (Kekuatan)	<ul style="list-style-type: none"> Struktur organisasi lengkap dan jelas — terdiri dari tiga asisten dan sembilan biro dengan pembagian tugas yang spesifik sehingga koordinasi internal lebih mudah dilakukan. Komitmen pimpinan tinggi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan inovasi tata kelola pemerintahan. Capaian kinerja positif — Jawa Tengah mempertahankan predikat A untuk SAKIP dan meraih Indeks SPBE 4,26 (memuaskan) pada 2023. Integrasi sistem informasi — penerapan aplikasi e-Planning, e-Budgeting, Open Data Jateng, LaporGub mendukung pelayanan administrasi publik yang lebih transparan. Hubungan baik dengan stakeholder — sudah terjalin komunikasi strategis dengan DPRD, pemerintah pusat, BUMN, dan pihak swasta.
Weakness (Kelemahan)	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi lintas OPD belum optimal — masih ditemukan tumpang tindih program antar perangkat daerah. Kualitas dan distribusi SDM belum merata — beberapa biro kekurangan tenaga fungsional ahli, sementara fungsi administratif relatif berlebih. Budaya kerja kurang adaptif — sebagian ASN kurang responsif terhadap perubahan, khususnya transformasi digital. Perumusan kebijakan dan harmonisasi regulasi masih lambat, sehingga kadang tertinggal dalam penyesuaian terhadap regulasi pusat. Sistem perencanaan dan evaluasi masih belum sepenuhnya terintegrasi antar OPD dan biro.
Opportunity (Peluang)	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan kebijakan nasional — pemerintah pusat mendorong percepatan reformasi birokrasi dan integrasi SPBE yang selaras dengan visi Pemprov. Perkembangan teknologi informasi — memberikan peluang untuk mempercepat digitalisasi pelayanan publik dan integrasi data lintas sektor. Tuntutan publik terhadap transparansi — memacu Sekretariat Daerah untuk menghadirkan layanan administrasi yang cepat, terbuka, dan berbasis digital. Kerja sama antardaerah dan lintas sektor — membuka peluang sinergi kebijakan dengan kabupaten/kota, BUMD, swasta, dan stakeholder lainnya. Potensi dukungan dana pusat dan internasional — melalui program-program percepatan reformasi birokrasi, transformasi digital, dan peningkatan kualitas layanan publik
Threats (Tantangan)	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan regulasi pusat yang cepat — memaksa daerah melakukan penyesuaian kebijakan dengan segera agar tidak terjadi kekosongan hukum. Keterbatasan anggaran daerah — dapat menghambat program penguatan kelembagaan dan inovasi pelayanan publik. Resistensi budaya organisasi — sebagian pegawai senior masih enggan beradaptasi dengan pola kerja baru berbasis teknologi. Kompleksitas permasalahan lintas sektor — seperti pengentasan kemiskinan, inflasi, investasi, dan bencana, yang menuntut koordinasi intensif. Ancaman keamanan siber — meningkatnya ketergantungan pada aplikasi digital menuntut proteksi data dan infrastruktur TI yang lebih kuat.

2.5. Isu Strategis Perangkat Daerah

Tabel 2.6
Perumusan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk besar dan struktur sosial-budaya yang mendukung gotong royong dan kolaborasi antar sektor	Kurangnya forum koordinasi strategis yang rutin antara Setda, OPD, dan pemangku kepentingan eksternal	Pentingnya integrasi kebijakan pembangunan lintas sektor untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial-ekonomi	Agenda SDGs (<i>Sustainable Development Goals</i>): Perlunya sinergi lintas sektor untuk mencapai target SDG, terutama SDG 16 (<i>institusi pemerintah yang efektif dan inklusif</i>) dan SDG 17 (<i>kemitraan pembangunan</i>)	Prioritas pembangunan nasional 2025–2029: Penanggulangan kemiskinan, peningkatan SDM, transformasi digital, dan pemerataan infrastruktur menuntut koordinasi lintas sektor di daerah.	Kompleksitas masalah ketahanan pangan, energi, dan bencana alam di Jawa Tengah memerlukan sinergi kebijakan antar-OPD, kabupaten/kota, dan pihak swasta	Sinergi Kebijakan dan Koordinasi Lintas Sektor
Indeks SPBE Pemprov Jateng mencapai 4,26 (<i>memuaskan</i>), salah satu tertinggi nasional, sebagai modal penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang transparan dan efisien	Implementasi reformasi birokrasi belum berdampak langsung pada outcome publik, meskipun regulasi dan program sudah banyak dijalankan	Reformasi birokrasi diarahkan agar kebijakan lintas sektor selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan	SDGs 2030 menempatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan inklusif sebagai kunci pembangunan berkelanjutan (SDG 16)	RPJMN 2025–2029 menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu agenda prioritas nasional untuk mewujudkan birokrasi bersih, efektif, dan melayani	Kualitas layanan publik di kabupaten/kota Jawa Tengah masih bervariasi, memerlukan dukungan Setda untuk pembinaan dan harmonisasi pelayanan publik lintas wilayah	Peningkatan <i>Good Governance</i> melalui Reformasi Birokrasi
Tingginya komitmen pimpinan daerah terhadap kualitas	Budaya pelayanan prima belum sepenuhnya	Pembinaan aparatur diperlukan agar kebijakan pelayanan	SDGs 2030 mendorong prinsip pelayanan publik inklusif, adil,	Peningkatan kompetensi ASN nasional menjadi program prioritas untuk	Kesenjangan kualitas layanan publik antar	Peningkatan Kualitas Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
layanan publik memberi potensi besar bagi Setda untuk memimpin pembinaan aparatur dan peningkatan pelayanan	tertanam pada aparatur, terutama di level teknis	publik mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan	dan berkualitas (SDG 16 dan SDG 10)	mendukung transformasi layanan publik yang responsif dan efisien	kabupaten/kota di Jawa Tengah	
Sudah tersedia berbagai aplikasi layanan publik seperti e-Planning, e-Budgeting, e-Controlling, LaporanGub, Open Data Jateng, dan Jateng Smart Province	Belum optimalnya integrasi aplikasi layanan publik antar-OPD, menyebabkan data masih tersebar	pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama dalam integrasi data spasial dan non-spasial untuk perencanaan berbasis bukti	Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) mendorong penggunaan teknologi digital untuk memperluas keterbukaan data dan partisipasi publik (SDG 16 dan SDG 17)	Pemerintah pusat mendorong penerapan Satu Data Indonesia untuk mendukung kebijakan berbasis data akurat dan terintegrasi	antangan Jawa Tengah dalam mengintegrasikan aplikasi layanan publik antar-OPD agar masyarakat mendapat layanan cepat, mudah, dan transparan	Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki jejaring kelembagaan yang luas, baik dengan DPRD, instansi vertikal, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal	Belum maksimalnya pemanfaatan kemitraan swasta dan potensi CSR untuk mendukung pembangunan daerah	Pembangunan berkelanjutan, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil	Tuntutan global terhadap pemerintahan inklusif, transparan, dan kolaboratif memerlukan peran Setda sebagai fasilitator hubungan antar pihak	RPJMN 2025–2029 menekankan kolaborasi antar-pemangku kepentingan untuk percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan penurunan ketimpangan	Potensi CSR daerah, forum investasi, dan kolaborasi lintas kabupaten/kota belum dimanfaatkan optimal untuk mendukung pembangunan regional	Penguatan Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemangku Kepentingan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Provinsi Jawa Tengah

Reformasi Birokrasi di Jawa Tengah telah dilaksanakan dengan memperhatikan 8 (delapan) area perubahan meliputi: (1). Manajemen Perubahan; (2). Deregulasi Kebijakan; (3). Penataan dan Penguatan Organisasi; (4). Penataan Tatalaksana; (5). Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; (6). Penguatan Akuntabilitas; (7). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan (8). Penguatan Pengawasan. Sekretariat Daerah Jawa Tengah memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah terutama dalam perumusan kebijakan daerah, selain itu sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan di Jawa Tengah. Rumusan Kebijakan kemudian dituangkan kedalam regulasi yang diharapkan menjadi sarana mencapai target-target pembangunan dan mampu menjawab kebutuhan perubahan lingkungan strategis yang cepat, dinamis, kompleks, tidak terduga, dan tidak pasti di era VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity*) saat ini.

Dalam rangka memperkuat Tusi Sekretariat Daerah dan melaksanakan amanah kebijakan Pusat telah dilaksanakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan penyederhaaan birokrasi tersebut meliputi: penyederhanaan struktur organisasi; penyetaraan jabatan; dan penyesuaian sistem kerja. Pejabat struktural yang disetarkan umumnya menjadi analis kebijakan untuk meningkatkan kualitas perumusan kebijakan. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat secara efektif mengungkit hasil-hasil kinerja pembangunan daerah. Selain itu, kebijakan yang dihasilkan dapat menyesuaikan terhadap kebutuhan penyelesaian permasalahan yang ada di msyarakat.

a. Tujuan Sekretariat Provinsi Jawa Tengah

Guna memecahkan permasalahan serta menangani isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai pada tahun 2025-2029 ditetapkan dua tujuan Setda, yaitu: 1. Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah dan 2. Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintergrasi dan dinamis.

b. Sasaran Sekretariat Provinsi Jawa Tengah

Guna mencapai hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan Sekretriati Daerah Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka rumusan Sasaran yang akan di capai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 adalah:

Tujuan pertama, Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah memiliki satu sasaran, yaitu: Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil. Sedangkan Tujuan kedua, Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintergrasi dan dinamis memiliki dua sasaran, yaitu:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah; dan
- 2) Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Risiko Perangkat Daerah.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, Sekretariat Daerah dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 merumuskan sejumlah program, yaitu Sasaran “Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil” akan diwujudkan melalui tujuh program, yaitu: (1). Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; (2). Program Kesejahteraan Rakyat; (3). Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; (4). Program Perekonomian dan Pembangunan; (5). Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa; (6). Program Kebijakan Administrasi Pembangunan; (7). Program Penataan Organisasi.

Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah” dan “Meningkatnya Manajemen Risiko Perangkat Daerah” keduanya diwujudkan melalui Program Administrasi Umum.

Adapun Tujuan dan Sasaran serta indikator dan targetnya diuraikan dalam tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah		Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	66,3	66,32	66,35	66,4	66,4	66,6	66,6	66,8	66,8
	Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	%	Na	Na	Na	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5
		Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	%	Na	Na	Na	44	44	44	44	44	44
		Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	Na	Na	Na	37	37	37	37	37	37

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		TARGET CAPAIAN						Kondisi Akhir	
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintergrasi dan dinamis		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Angka	Na	76	76	76	76	76	76	76	76	76
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Na	82	82,5	83	84	85	86	87	87	87
	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen risiko perangkat daerah	Nilai MRI Perangkat Daerah	Angka	Na	Na	3	3	3	3	3	3	3	3

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Strategi merupakan serangkaian tahapan atau langkah yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran Perangkat Daerah (PD) akan dicapai. Sementara itu, kebijakan berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan strategi yang dipilih agar lebih fokus dalam mencapai tujuan dan sasaran PD. Arah kebijakan dirancang untuk menjembatani strategi dengan sasaran secara lebih operasional, sehingga strategi yang disusun menjadi lebih spesifik, terfokus, konkret, dan dapat diterapkan. Selain itu, kebijakan berperan dalam mengarahkan pemilihan kegiatan agar sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Sekretariat Daerah memiliki kekuatan Struktur organisasi lengkap dan jelas, terdiri dari tiga asisten dan sembilan biro dengan pembagian tugas yang spesifik sehingga koordinasi internal lebih mudah dilakukan namun memiliki kelemahan koordinasi lintas OPD belum optimal, masih ditemukan tumpang tindih program antar perangkat daerah. Sedangkan peluang untuk yang ada yaitu kerja sama antar daerah dan lintas sektor, membuka peluang sinergi kebijakan dengan kabupaten/kota, BUMD, swasta, dan stakeholder lainnya. Tantangan yang dihadapi berupa perubahan regulasi pusat yang cepat, memaksa daerah melakukan penyesuaian kebijakan dengan segera. Oleh karena itu, Renstra Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 merumuskan arah kebijakan antara lain memperkuat forum koordinasi antar perangkat daerah secara berkala dan tematik; penguatan kelembagaan perangkat daerah yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan; mendorong kolaborasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program prioritas daerah dan mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terintegrasi dan berbasis digital.

Sekretariat Daerah pada konteks pelaksanaan reformasi birokrasi di Sekretariat Daerah, memiliki kekuatan berupa agenda untuk meningkatkan kualitas layanan melalui survei IKM secara periodik, tersedianya dokumen manajemen risiko dan dokumen rencana kinerja tahunan namun memiliki kelemahan hasil survei IKM, dokumen manajemen risiko dan rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan kualitas pelayanan. Sedangkan peluang untuk yang ada yaitu adanya arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait reformasi pelayanan publik. Tantangan yang dihadapi berupa belum optimalnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan yang semakin berkualitas. Oleh karena itu, Renstra Sekretariat Daerah merumuskan arah kebijakan berupa peningkatan indeks kepuasan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah dan peningkatan efektifitas manajemen resiko melalui sinkronisasi agenda biro-biro lingkup Sekretariat Daerah. Perumusan strategi dan arah kebijakan dituangkan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah	Meningkatnya Sinergi Kebijakan yang Adaptif dan Berorientasi Hasil	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat forum koordinasi antar-SKPD secara berkala dan tematik 2. Penguatan peran Sekretariat daerah dalam harmonisasi, sinkronisasi, dan pembentukan produk hukum daerah 3. Peningkatan sinergi kerja sama daerah, baik dalam negeri maupun luar negeri 4. Penguatan kelembagaan perangkat daerah yang adaptif dan responsif terhadap dinamika pembangunan
		Meningkatkan koordinasi, sinergi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kolaborasi antar SKPD dalam pelaksanaan program prioritas daerah 2. Mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja SKPD yang terintegrasi dan berbasis digital 3. Peningkatan tata kelola pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan berintegritas 4. Peningkatan kualitas pelayanan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>publik yang cepat, transparan, dan terstandar</p> <p>5. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mewujudkan ketertiban penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>6. Penguatan tata kelola BUMD yang sehat, profesional, dan berorientasi kinerja</p>
Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintegritas dan dinamis	Meningkatnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi digital untuk layanan dan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi untuk seluruh Biro	Digitalisasi Layanan Biro serta standarisasi dan optimalisasi proses bisnis layanan biro
	Meningkatnya manajemen risiko Sekretariat Daerah	Mengotimalkan peran Tim Manajemen Risiko dalam pengelolaan Risiko Setda	Pembudayaan risiko sebagai bagian dari tata kelola organisasi

3.3. Manajemen Risiko Strategis Sekretariat Daerah

Manajemen risiko merupakan proses pengelolaan terhadap risiko mulai dari identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko, termasuk rencana pemantauan dan rencana komunikasi. Proses manajemen risiko dalam penyusunan Renstra PD dilakukan pada konteks strategis sampai dengan operasional. Untuk level strategis perangkat daerah dilakukan proses manajemen risiko pada konteks risiko strategis yang hasilnya sebagaimana tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.3
Rencana Tindak Pengendalian Terhadap Risiko Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025-2029

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Resiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	MOU tidak terlaks	12	Tidak sinkronnya tujuan antar Pemerintah Provinsi daerah dengan Pemerintahan Luar daerah	Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana.	1. Pembahasan perencanaan kerja sama yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan para pihak	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan	2026
		Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan	16	Kurangnya sosialisasi dan komunikasi	Tertundanya penetapan lokasi pembangunan	1. Perubahan trase/desain	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan	2026
		Gagal tercapainya kesepakatan batas	16	Perbedaan persepsi atau kepentingan antar daerah	Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah	1.Melakukan Delineasi/koreksi garis batas daerah 2. Fasilitasi penyelesaian sengketa garis batas daeah antar Kab/kota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan	2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Resiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kegagalan dalam fasilitasi penyelesaian perkara di pengadilan karena kelemahan dalam pembuktian	10	Kelemahan pembuktian dalam penyelesaian perkara di pengadilan	Potensi pengeluaran keuangan atau aset daerah karena putusan Pengadilan akibat kelemahan dalam pembuktian	- Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah - Meningkatkan kapasitas SDM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan	2026
	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan masih parsial	12	Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika regulasi	Rekomendasi kebijakan belum mendorong ketahanan pangan di Jawa Tengah	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka monitoring capaian kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - Menyusun	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Resiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan		
		Pembagian dividen yang tidak sesuai ketentuan	9	Adanya intervensi politis dalam proses pembahasan dividen untuk mengarahkan hasil pembagian laba	1. Proses pembahasan menjadi tidak objektif 2. Potensi kerugian daerah		Asisten Ekonomi dan Pembangunan	2026
		Hasil keputusan rakor tidak ditindaklanjuti oleh masing-masing	12	Instansi memiliki Program Prioritas yang Berbeda	potensi penyimpangan atau kegagalan program tidak terdeteksi dini	Monev pelaksanaan hasil rekomendasi	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	- TW II (Mei) - TW IV (Nopember)

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Resiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		instansi						
		Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah atau program strategis tidak tercapai	12	1. Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD kurang mendukung dalam upaya pencapaian indikator kinerja 2. Kebijakan yang tidak tepat sasaran atau adanya kebijakan yang tumpang tindih antar OPD	Penilaian kinerja pemerintah daerah turun	Menyusun rekomendasi hasil koordinasi dan pengendalian	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	2026
	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	realisasi belanja tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan barang/jasa	20	Kurangnya pemahaman mengenai metode pemilihan pengadaan barang/jasa	realisasi belanja tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan barang/jasa	1. Melaksanakan Monev PBJ meliputi review RUP, pendampingan RUP dan Sosialisasi peraturan PBJ anggaran murni. 2. Melaksanakan Monev PBJ meliputi review RUP, pendampingan RUP dan Sosialisasi peraturan PBJ	Asisten Administrasi	2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Resiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						anggaran perubahan.		
		Perencanaan pengadaan tidak matang	16	- Pemahaman PA/KPA/PPK OPD yang belum seragam dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang jasa - PA/KPA/PPK Kurang cermat dalam menetapkan RUP (Rencana Umum Pengadaan)	- Menghambat pelaksanaan pengadaan barang jasa - berpotensi aduan	1. Sosialisasi Buku Saku Perencanaan PBJ 2. Penerapan Kertas Kerja Perencanaan Pengadaan Barang Jasa sampai dengan Pelaksanaan PBJ	Asisten Administrasi	2026
		Konsep kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku	12	Perubahan regulasi belum tersosialisasi	Pemberian TPP tidak tepat sasaran	Penyusunan konsep TPP berbasis murni kelas jabatan, evidence sesuai yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, dan dinamika	Asisten Administrasi	2026

Tujuan/Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Resiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						manajemen kepegawaian dengan berpedoman terhadap ketersediaan anggaran Daerah		
		Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan	12	Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat	Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan	Melaksanakan rakor/sosialisasi regulasi kelembagaan	Asisten Administrasi	2026
		Proses pembangunan ZI tidak berjalan	12	Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI	Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik	Sosialisasi dan Pencanaan pembangunan ZI kepada seluruh OPD	Asisten Administrasi	2026

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Bab IV, maka diperlukan rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja serta pendanaan indikatif tahun 2025-2029.

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pembangunan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 secara rinci tertuang dalam tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baselin Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah *								357.354.186.000		354.802.970.000		360.148.707.000		362.208.808.000		364.419.941.000	Sekretariat Daerah	
				Indeks Kualitas Kebijakan *	Angka	66,32	66,4			66,4		66,6		66,6		66,8	Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi							357.354.186.000		354.802.970.000		360.148.707.000		362.208.808.000		364.419.941.000	Sekretariat Daerah	
				Indeks kematangan Kebijakan Lingkup	Angka	N/A	37	345.287.892.000	37	341.251.002.000	37	346.220.472.000	37	347.548.940.000	37	349.253.673.000	Sekretariat Daerah	
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI					2.715.000.000		3.390.000.000		3.990.000.000		4.092.925.000		4.568.956.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN	
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang		Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti ***	%	N/A	100	1.035.000.000	100	1.450.000.000	100	1.740.000.000	100	1.707.925.000	100	1.786.000.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah ****					1.035.000.000		1.450.000.000		1.740.000.000		1.707.925.000		1.786.000.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN	
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kerjasama antar		Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti ****	%	N/A	100	500.000.000	100	700.000.000	100	760.000.000	100	697.925.000	100	710.000.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
			Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah *****					500.000.000		700.000.000		760.000.000		697.925.000		710.000.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah		Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi *****	Dokumen	N/A	8	380.000.000	9	450.000.000	10	460.000.000	11	465.000.000	12	470.000.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasilitasi kerjasama antar pemerintah dalam
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah		Jumlah naskah kerjasama antar pemerintah luar negeri *****	Dokumen	N/A	4	120.000.000	4	250.000.000	5	300.000.000	5	232.925.000	6	240.000.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasilitasi kerjasama antar pemerintah luar
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kerjasama antar		Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang	%	N/A	100	200.000.000	100	300.000.000	100	380.000.000	100	400.000.000	100	405.000.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baselin Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta *****					200.000.000		300.000.000		380.000.000		400.000.000		405.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta		Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi *****	Dokumen	N/A	4	100.000.000	4	150.000.000	4	190.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasilitasi kerjasama lembaga badan usaha dan swasta dalam negeri
		Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Badan Usaha/Swasta		Jumlah naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta Luar Negeri	Dokumen	N/A	4	100.000.000	4	150.000.000	4	190.000.000	4	200.000.000	4	205.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasilitasi kerjasama lembaga badan usaha dan swasta luar negeri
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama		Persentase rekomendasi evaluasi kerjasama	%	N/A	95	335.000.000	95	450.000.000	95	600.000.000	95	610.000.000	95	671.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama *****					335.000.000		450.000.000		600.000.000		610.000.000		671.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi *****	Laporan	N/A	4	135.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	4	205.000.000	4	256.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA evaluasi kerjasama luar
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi *****	Laporan	N/A	4	100.000.000	4	150.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	4	205.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Evaluasi kerjasama dalam
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama		Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri *****	%	N/A	100	100.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000	100	205.000.000	100	210.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA fasilitasi ijin perjalanan luar negeri KDH WKDH 35 kab kota dan provinsi serta
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang		Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan,	%	N/A	100	900.000.000	100	1.040.000.000	100	1.180.000.000	100	1.200.000.000	100	1.220.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
			Pelaksanaan Tugas Pemerintahan *****					900.000.000		1.040.000.000		1.180.000.000		1.200.000.000		1.220.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Meningkatnya Kualitas rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang	Dokumen	N/A	8	900.000.000	8	1.040.000.000	8	1.180.000.000	8	1.200.000.000	8	1.220.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan *****					520.000.000		550.000.000		620.000.000		630.000.000		640.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
		Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan *****	Dokumen	N/A	4	520.000.000	4	550.000.000	4	620.000.000	4	630.000.000	4	640.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Kelurahan 35 kab
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum *****					180.000.000		220.000.000		260.000.000		265.000.000		270.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	N/A	4	180.000.000	4	220.000.000	4	260.000.000	4	265.000.000	4	270.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasilitasi terkait Pertanahan, Trantibum dan Aduan Masyarakat
			Fasilitasi Penataan Wilayah *****					200.000.000		270.000.000		300.000.000		305.000.000		310.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah *****	Dokumen	N/A	4	200.000.000	4	270.000.000	4	300.000.000	4	305.000.000	4	310.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasilitasi Penegasan Batas Daerah; Penyusunan Kode data: dan Rupa
		Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang		Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah ***	%	N/A	100	780.000.000	100	900.000.000	100	1.070.000.000	100	1.185.000.000	100	1.562.956.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
			Pelaksanaan Otonomi Daerah ****					780.000.000		900.000.000		1.070.000.000		1.185.000.000		1.562.956.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Meningkatnya Kualitas Tertib Administrasi KDH dan DPRD		Persentase layanan fasilitasi KDH dan	%	N/A	100	200.000.000	100	240.000.000	100	290.000.000	100	400.000.000	100	762.956.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD *****					200.000.000		240.000.000		290.000.000		400.000.000		762.956.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala	Dokumen	N/A	7	200.000.000	9	240.000.000	12	290.000.000	35	400.000.000	35	762.956.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasilitasi Adm KDH DPRD Ke
		Meningkatnya Kualitas Pengembangan Otonomi dan		Jumlah rekomendasi pelaksanaan	Dokumen	N/A	3	180.000.000	3	210.000.000	3	280.000.000	3	285.000.000	3	290.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan *****					180.000.000		210.000.000		280.000.000		285.000.000		290.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi	Dokumen	N/A	4	180.000.000	4	210.000.000	4	280.000.000	4	285.000.000	4	290.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasilitasi 35 kab kota dan
		Meningkatnya Kualitas Tertib Administrasi Evaluasi dan Penyelenggaraan		Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan	%	N/A	100	400.000.000	100	450.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	510.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan					400.000.000		450.000.000		500.000.000		500.000.000		510.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN	
		Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan	Laporan	N/A	37	400.000.000	37	450.000.000	37	500.000.000	37	500.000.000	37	510.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	BIRO PEMERINTAHAN,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA Fasilitasi penyusunan LPPD 35 kab kota dan
			PROGRAM KESEJAHTERAN RAKYAT					340.259.994.000		334.905.700.000		337.315.700.000		338.265.700.000		339.215.700.000	BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT	
		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dasar		Persentase capaian kinerja program Kesejahtera	%	N/A	85	825.000.000	86	825.000.000	87	825.000.000	88	825.000.000	89	825.000.000	BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT	
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan					825.000.000		825.000.000		825.000.000		825.000.000		825.000.000	BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT	
		Meningkatkan kualitas kebijakan		Jumlah rekomendasi kebijakan	Dokumen	N/A	4	825.000.000	4	825.000.000	4	825.000.000	4	825.000.000	4	825.000.000	BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT	
			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang					275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000	BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi,	Dokumen	N/A	4	275.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000	BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA TENGAH
			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang					275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000	BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baselin Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi,	Dokumen	N/A	4	185.000.000	4	185.000.000	4	185.000.000	4	185.000.000	4	185.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA TENGAH
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan	Dokumen	N/A	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang					275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi,	Dokumen	N/A	4	185.000.000	4	185.000.000	4	185.000.000	4	185.000.000	4	185.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA TENGAH
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan	Dokumen	N/A	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	4	90.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan Non		Persentase capaian kinerja program Kesejahtera	%	N/A	85	1.725.000.000	86	1.725.000.000	87	1.725.000.000	88	1.725.000.000	89	1.725.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar ****					1.725.000.000		1.725.000.000		1.725.000.000		1.725.000.000		1.725.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Meningkatkan kualitas kebijakan Non		Jumlah rekomendasi kebijakan	Dokumen	N/A	4	1.725.000.000	4	1.725.000.000	4	1.725.000.000	4	1.725.000.000	4	1.725.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata					275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2026		2027		2028		2029		2030				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan,		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan	Dokumen	N/A	4	275.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000	4	275.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA TENGAH	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi				1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Dokumen	N/A	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	4	450.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengentasan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	Dokumen	N/A	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan Fasilitas		Persentase fasilitas keagamaan dalam	%	N/A	63	337.709.994.000	64	332.355.700.000	65	334.765.700.000	66	335.715.700.000	67	336.665.700.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Fasilitas Pembinaan Mental					337.709.994.000		332.355.700.000		334.765.700.000		335.715.700.000		336.665.700.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
		Meningkatnya kualitas Pembinaan Mental Spiritual		Prosentase realisasi hibah keagamaan sesuai	%	N/A	85	333.000.000.000	85	328.450.000.000	85	331.030.000.000	90	331.936.000.000	90	332.801.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		
			Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual *****					333.000.000.000		328.450.000.000		331.030.000.000		331.936.000.000		332.801.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT		

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terkelolanya Sarana dan Prasarana		Jumlah Sarana dan Prasarana	Unit	N/A	2500	332.550.000.000	2500	328.000.000.000	2500	330.580.000.000	2500	331.486.000.000	2500	332.351.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA
		Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual		Jumlah dokumen laporan pelaksanaan	Dokumen	N/A	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	2	450.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT Biro Kesejahteraan
		Meningkatnya kualitas Pembinaan		Prosentase pelaksanaan pelayanan	%	N/A	100	4.709.994.000	100	3.905.700.000	100	3.735.700.000	100	3.779.700.000	100	3.864.700.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Fasilitas Kelembagaan Bina Spiritual					4.709.994.000		3.905.700.000		3.735.700.000		3.779.700.000		3.864.700.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Terlaksananya Fasilitas Kelembagaan		Jumlah Lembaga Bina	Lembaga	N/A	4	2.559.994.000	4	1.755.700.000	4	1.585.700.000	4	1.629.700.000	4	1.714.700.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA
		Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Penyelenggaraan		Jumlah Fasilitas Pelaksanaan	Dokumen	N/A	1	2.150.000.000	1	2.150.000.000	1	2.150.000.000	1	2.150.000.000	1	2.150.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT JAWA TENGAH
			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM ***					2.312.898.000		2.955.302.000		4.914.772.000		5.190.315.000		5.469.017.000	BIRO HUKUM	
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah		Indeks Reformasi Hukum ***	Angka	91,4	92	843.129.000	92,5	1.065.401.000	93	1.727.843.000	93,5	1.820.974.000	94	1.961.744.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitas Penyusunan Perundang-undangan ****					843.129.000		1.065.401.000		1.727.843.000		1.820.974.000		1.961.744.000	BIRO HUKUM	
		Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum Daerah		Presentase rancangan Produk Hukum Pengaturan yang dihasilkan	%	N/A	89,5	456.963.000	90	582.917.000	90,5	944.693.000	91	1.019.824.000	91,5	1.115.730.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan					456.963.000		582.917.000		944.693.000		1.019.824.000		1.115.730.000	BIRO HUKUM	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum		Jumlah Produk Hukum	Dokumen	N/A	40	456.963.000	45	582.917.000	50	944.693.000	55	1.019.824.000	60	1.115.730.000	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM JAWA TENGAH, JAWA
		Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum Daerah		Presentase rancangan Produk Hukum Penetapan yang dihasilkan	%	N/A	91	64.361.000	92	82.110.000	93	140.975.000	94	144.148.000	95	157.172.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Penetapan *****					64.361.000		82.110.000		140.975.000		144.148.000		157.172.000	BIRO HUKUM	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum		Jumlah Produk Hukum	Dokumen	N/A	250	64.361.000	300	82.110.000	350	140.975.000	400	144.148.000	450	157.172.000	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM JAWA TENGAH, JAWA
		Meningkatnya Kualitas Database Dokumentasi Produk Hukum Daerah		Presentase penataan database peraturan perundang-undangan melalui	%	N/A	91	175.530.000	92	220.545.000	93	355.727.000	94	367.725.000	95	388.080.000	BIRO HUKUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baselin e Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya *****					175.530.000		220.545.000		355.727.000		367.725.000		388.080.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum yang Didokumen	Dokumen	N/A	350	175.530.000	400	220.545.000	450	355.727.000	500	367.725.000	550	388.080.000	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM
		Meningkatnya Kualitas Database Dokumentasi Produk Hukum Daerah		Presentase Hasil Anev Peraturan Perundang-Undangan	%	N/A	30	146.275.000	35	179.829.000	40	286.448.000	45	289.277.000	50	300.762.000	BIRO HUKUM	
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya *****					146.275.000		179.829.000		286.448.000		289.277.000		300.762.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		Jumlah Produk Hukum yang dilakukan	Dokumen	N/A	13	146.275.000	14	179.829.000	15	286.448.000	16	289.277.000	17	300.762.000	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Kabupaten/ Kota		Persentase Efektifitas Pengawasan Produk	%	N/A	96	490.313.000	97	637.884.000	98	1.042.438.000	99	1.088.466.000	100	1.159.389.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan ****					490.313.000		637.884.000		1.042.438.000		1.088.466.000		1.159.389.000	BIRO HUKUM	
		Meningkatnya Pengawasan Produk Hukum Daerah		Presentase rancangan produk hukum	%	N/A	96	490.313.000	97	637.884.000	98	1.042.438.000	99	1.088.466.000	100	1.159.389.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota *****					490.313.000		637.884.000		1.042.438.000		1.088.466.000		1.159.389.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum		Jumlah Produk Hukum Kabupaten/	Dokumen	N/A	125	145.000.000	130	203.580.000	135	330.984.000	140	343.210.000	145	363.825.000	BIRO HUKUM	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH BIRO
		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota		Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang	Dokumen	N/A	130	190.313.000	135	217.152.000	140	355.727.000	145	372.628.000	150	397.782.000	BIRO HUKUM	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH BIRO HUKUM
		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota		Jumlah Produk Hukum Kabupaten/ Kota yang	Dokumen	N/A	130	155.000.000	135	217.152.000	140	355.727.000	145	372.628.000	150	397.782.000	BIRO HUKUM	35 Kabupaten/Kota, JAWA TENGAH BIRO HUKUM
		Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan		Capaian Pemberian Bantuan Hukum ***	%	N/A	100	827.916.000	100	1.058.616.000	100	1.815.052.000	100	1.941.588.000	100	1.959.804.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitasi Bantuan					827.916.000		1.058.616.000		1.815.052.000		1.941.588.000		1.959.804.000	BIRO HUKUM	
		Meningkatnya Penyelesaian Perkara		Presentase bantuan hukum yang	%	N/A	100	827.916.000	100	1.058.616.000	100	1.815.052.000	100	1.941.588.000	100	1.959.804.000	BIRO HUKUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum *****					827.916.000		1.058.616.000		1.815.052.000		1.941.588.000		1.959.804.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian		Jumlah Masalah Hukum	Kasus	N/A	12	301.326.000	12	386.802.000	12	622.909.000	12	666.808.000	12	698.544.000	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM JAWA TENGAH, JAWA
		Terlaksananya bantuan hukum kepada masyarakat tidak		Jumlah Pemberian Bantuan Hukum	Kasus	N/A	340	526.590.000	340	671.814.000	340	1.192.143.000	340	1.274.780.000	340	1.261.260.000	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
		Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan		Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Angka	99,8	86	151.540.000	87	193.401.000	88	329.439.000	89	339.287.000	90	388.080.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitasi Bantuan					151.540.000		193.401.000		329.439.000		339.287.000		388.080.000	BIRO HUKUM	
		Meningkatnya Pelaksanaan HAM Daerah		Presentase Fasilitasi HAM	%	N/A	100	77.233.000	100	98.397.000	100	167.694.000	100	172.585.000	100	194.040.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM *****					77.233.000		98.397.000		167.694.000		172.585.000		194.040.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Fasilitasi Implementasi		Jumlah Fasilitasi Implementasi	Laporan	N/A	4	77.233.000	4	98.397.000	4	167.694.000	4	172.585.000	4	194.040.000	BIRO HUKUM	35 Kabupaten/Kota, JAWA
		Meningkatnya Penanganan masalah hukum		Presentase masalah hukum non litigasi yang	%	N/A	85	74.307.000	85	95.004.000	85	161.745.000	85	166.702.000	85	194.040.000	BIRO HUKUM	
			Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM *****					74.307.000		95.004.000		161.745.000		166.702.000		194.040.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non		Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM	Kasus	N/A	20	74.307.000	20	95.004.000	20	161.745.000	20	166.702.000	20	194.040.000	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM JAWA TENGAH, JAWA TENGAH
				Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi	Angka	N/A	44	8.047.952.000	44	8.845.000.000	44	8.997.000.000	44	9.484.000.000	44	9.730.000.000	Sekretariat Daerah	
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ***					2.647.952.000		3.335.000.000		3.430.000.000		3.490.000.000		3.550.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian		Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro	%	N/A	80	347.000.000	80	485.000.000	80	500.000.000	80	515.000.000	80	520.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					347.000.000		485.000.000		500.000.000		515.000.000		520.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Meningkatnya kualitas koordinasi		Jumlah dokumen rekomendasi	Dokumen	N/A	4	347.000.000	4	485.000.000	4	500.000.000	4	515.000.000	4	520.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro *****					347.000.000		485.000.000		500.000.000		515.000.000		520.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	N/A	4	347.000.000	4	485.000.000	4	500.000.000	4	515.000.000	4	520.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN Koordinasi, Monitoring dan
		Meningkatnya kualitas rekomendasi kebijakan perekonomian mikro		Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian,	%	N/A	85	797.000.000	85	1.000.000.000	85	1.050.000.000	85	1.065.000.000	85	1.080.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian					797.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		1.065.000.000		1.080.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Meningkatkan kualitas kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan	Dokumen	N/A	4	797.000.000	4	1.000.000.000	4	1.050.000.000	4	1.065.000.000	4	1.080.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro *****					797.000.000		1.000.000.000		1.050.000.000		1.065.000.000		1.080.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan	Dokumen	N/A	4	450.000.000	4	525.000.000	4	570.000.000	4	580.000.000	4	585.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN Koordinasi, Monitoring dan
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan	Dokumen	N/A	4	347.000.000	4	475.000.000	4	480.000.000	4	485.000.000	4	495.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang		Persentase capaian kinerja program	%	N/A	85	338.000.000	85	430.000.000	85	435.000.000	85	445.000.000	85	460.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam ****					338.000.000		430.000.000		435.000.000		445.000.000		460.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan		Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan	Dokumen	N/A	2	338.000.000	2	430.000.000	2	435.000.000	2	445.000.000	2	460.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan					338.000.000		430.000.000		435.000.000		445.000.000		460.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi	Dokumen	N/A	4	338.000.000	4	430.000.000	4	435.000.000	4	445.000.000	4	460.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baselin e Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)	Target (20)	Rp (21)		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang		Persentase capaian kinerja program	%	N/A	85	347.000.000	85	465.000.000	85	475.000.000	85	480.000.000	85	490.000.000	BIRO PEREKONOMIA N	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam ****					347.000.000		465.000.000		475.000.000		480.000.000		490.000.000	BIRO PEREKONOMIA N	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan		Jumlah rekomendasi kebijakan Energi	Dokumen	N/A	2	347.000.000	2	465.000.000	2	475.000.000	2	480.000.000	2	490.000.000	BIRO PEREKONOMIA N	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air					347.000.000		465.000.000		475.000.000		480.000.000		490.000.000	BIRO PEREKONOMIA N	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	Dokumen	N/A	4	347.000.000	4	465.000.000	4	475.000.000	4	480.000.000	4	490.000.000	BIRO PEREKONOMIA N	BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian,		Persentase capaian kinerja program bidang	%	N/A	87	818.952.000	87	955.000.000	87	970.000.000	87	985.000.000	87	1.000.000.000	BIRO PEREKONOMIA N	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam ****					818.952.000		955.000.000		970.000.000		985.000.000		1.000.000.000	BIRO PEREKONOMIA N	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi		Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian ****	Dokumen	N/A	2	301.452.000	2	340.000.000	2	345.000.000	2	350.000.000	2	355.000.000	BIRO PEREKONOMIA N	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan					301.452.000		340.000.000		345.000.000		350.000.000		355.000.000	BIRO PEREKONOMIA N	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan	Dokumen	N/A	4	301.452.000	4	340.000.000	4	345.000.000	4	350.000.000	4	355.000.000	BIRO PEREKONOMIA N	BIRO PEREKONOMIAN
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan		Jumlah Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai	Laporan	N/A	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	BIRO PEREKONOMIA N	BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi		Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan ****	Dokumen	N/A	2	277.500.000	2	315.000.000	2	320.000.000	2	325.000.000	2	330.000.000	BIRO PEREKONOMIA N	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan					277.500.000		315.000.000		320.000.000		325.000.000		330.000.000	BIRO PEREKONOMIA N	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baselin e Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi	Dokumen	N/A	4	277.500.000	4	315.000.000	4	320.000.000	4	325.000.000	4	330.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi		Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan,	Dokumen	N/A	4	240.000.000	4	300.000.000	4	305.000.000	4	310.000.000	4	315.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan					240.000.000		300.000.000		305.000.000		310.000.000		315.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi	Dokumen	N/A	8	240.000.000	8	300.000.000	8	305.000.000	8	310.000.000	8	315.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	BIRO PEREKONOMIAN
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ***					2.075.000.000		2.185.000.000		2.202.000.000		2.219.000.000		2.315.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		Meningkatnya Capaian Kinerja BUMD Jasa Keuangan		Persentase ROA (Return On Aset) BUMD	%	N/A	1,95	875.000.000	2	915.000.000	2,05	922.000.000	2,08	930.000.000	2,1	955.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan					875.000.000		915.000.000		922.000.000		930.000.000		955.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	
		Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Evaluasi kebijakan BUMD		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengemban	Dokumen	N/A	4	875.000.000	4	915.000.000	4	922.000.000	4	930.000.000	4	955.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan					875.000.000		915.000.000		922.000.000		930.000.000		955.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi	Dokumen	N/A	4	475.000.000	4	490.000.000	4	495.000.000	4	500.000.000	4	505.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan	Dokumen	N/A	4	400.000.000	4	425.000.000	4	427.000.000	4	430.000.000	4	450.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya Capaian Kinerja BUMD Jasa Aneka Usaha		Persentase ROA (Return On Aset) BUMD	%	N/A	2,3	800.000.000	2,5	840.000.000	2,65	850.000.000	2,85	857.000.000	3	900.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan				800.000.000		840.000.000			850.000.000		857.000.000		900.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	
		Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi Evaluasi kebijakan BUMD		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengemban	Dokumen	N/A	4	800.000.000	4	840.000.000	4	850.000.000	4	857.000.000	4	900.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum,				800.000.000		840.000.000			850.000.000		857.000.000		900.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi	Dokumen	N/A	4	400.000.000	4	420.000.000	4	425.000.000	4	430.000.000	4	450.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan	Dokumen	N/A	4	400.000.000	4	420.000.000	4	425.000.000	4	427.000.000	4	450.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		Meningkatnya capaian kinerja BLUD		Persentase nilai kemandirian BLUD ***	%	N/A	55	400.000.000	55,25	430.000.000	55,6	430.000.000	55,75	432.000.000	56	460.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan				400.000.000		430.000.000			430.000.000		432.000.000		460.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan	Dokumen	N/A	2	200.000.000	2	215.000.000	2	215.000.000	2	215.000.000	2	230.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian				200.000.000		215.000.000			215.000.000		215.000.000		230.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	Dokumen	N/A	2	200.000.000	2	215.000.000	2	215.000.000	2	215.000.000	2	230.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan koordinasi		Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan	Dokumen	N/A	2	200.000.000	2	215.000.000	2	215.000.000	2	217.000.000	2	230.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah					200.000.000		215.000.000		215.000.000		217.000.000		230.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan	Dokumen	N/A	2	200.000.000	2	215.000.000	2	215.000.000	2	217.000.000	2	230.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNA					3.325.000.000		3.325.000.000		3.365.000.000		3.775.000.000		3.865.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan		Persentase realisasi bantuan keuangan ***	%	85	86	1.000.000.000	87	1.000.000.000	88	1.000.000.000	89	1.100.000.000	90	1.110.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ****					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.110.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas pelaksanaan pembangunan		Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan	Dokumen	N/A	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.000.000.000	4	1.100.000.000	4	1.110.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah *****					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.110.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi	Laporan	N/A	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	550.000.000	4	560.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN >Pengendalian Kab/Kota Wilayah I, JAWA TENGAH
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi	Laporan	N/A	4	500.000.000	4	500.000.000	4	500.000.000	4	550.000.000	4	550.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN >Pengendalian Kab/Kota Wilayah II, JAWA TENGAH
		Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan Teknis		Persentase tingkat ketercapaian kinerja	%	N/A	86,5	300.000.000	87	300.000.000	87,5	300.000.000	88	325.000.000	88,5	335.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ****					300.000.000		300.000.000		300.000.000		325.000.000		335.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Meningkatnya kualitas pelaporan dan evaluasi		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi	Dokumen	N/A	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	325.000.000	4	335.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan					300.000.000		300.000.000		300.000.000		325.000.000		335.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Analisis	Dokumen	N/A	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	325.000.000	4	335.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN >Evaluasi Kinerja
		Meningkatnya kualitas Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan		Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangun	%	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	560.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ****					500.000.000		500.000.000		500.000.000		550.000.000		560.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan teknis		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis	Dokumen	N/A	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	550.000.000	1	560.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah ****					325.000.000		325.000.000		325.000.000		350.000.000		360.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa	Laporan	N/A	4	325.000.000	4	325.000.000	4	325.000.000	4	350.000.000	4	360.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN >Pelaporan APBD
			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan					175.000.000		175.000.000		175.000.000		200.000.000		200.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan	Dokumen	N/A	4	175.000.000	4	175.000.000	4	175.000.000	4	200.000.000	4	200.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN >IKU Daerah Jawa Tengah, JAWA
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi		Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan	%	N/A	90	1.525.000.000	91	1.525.000.000	92	1.565.000.000	93	1.800.000.000	94	1.860.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah ****					1.525.000.000		1.525.000.000		1.565.000.000		1.800.000.000		1.860.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas pelaksanaan pembangunan		Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan	Dokumen	N/A	4	1.525.000.000	4	1.525.000.000	4	1.565.000.000	4	1.800.000.000	4	1.860.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD ****					1.325.000.000		1.325.000.000		1.355.000.000		1.550.000.000		1.600.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia yang		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan	Laporan	N/A	12	475.000.000	12	475.000.000	12	485.000.000	12	550.000.000	12	560.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baselin e Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang bersumber dari		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan	Laporan	N/A	12	250.000.000	12	250.000.000	12	260.000.000	12	300.000.000	12	310.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang infrastruktur yang bersumber dari APBD		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan	Laporan	N/A	12	200.000.000	12	200.000.000	12	210.000.000	12	250.000.000	12	260.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan bidang		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi	Laporan	N/A	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	450.000.000	4	470.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN ****					200.000.000		200.000.000		210.000.000		250.000.000		260.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi	Laporan	N/A	4	200.000.000	4	200.000.000	4	210.000.000	4	250.000.000	4	260.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN >Pengendalian Pembangunan OPD yang bersumber
				Indeks kematangan Kebijakan	Angka	N/A	29,5	4.018.342.000	29,5	4.706.968.000	29,5	4.931.235.000	29,5	5.175.868.000	29,5	5.436.268.000	Sekretariat Daerah	
			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					1.739.028.000		2.144.018.000		2.344.018.000		2.461.268.000		2.601.268.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah		Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan	%	66	71	257.352.000	72	322.352.000	73	347.352.000	74	364.102.000	75	384.102.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan ****					257.352.000		322.352.000		347.352.000		364.102.000		384.102.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya efektifitas penataan kelembagaan dan analisis jabatan di Jawa Tengah		Jumlah Dokumen Rekomendasi fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi ****	Dokumen	4	2	257.352.000	2	322.352.000	2	347.352.000	2	364.102.000	2	384.102.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi *****					257.352.000		322.352.000		347.352.000		364.102.000		384.102.000	BIRO ORGANISASI	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi *****	Dokumen	N/A	2	150.000.000	2	200.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	2	225.000.000	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI Kelembagaan Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi		Jumlah laporan fasilitasi penilaian tingkat kematangan organisasi *****	Laporan	N/A	2	107.352.000	2	122.352.000	2	122.352.000	2	139.102.000	2	159.102.000	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI Kelembagaan OPD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah		Persentase Kabupaten/ Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya ***	%	85,71	91,43	207.400.000	91,43	272.400.000	91,43	297.400.000	91,43	314.150.000	91,43	334.150.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan ****					207.400.000		272.400.000		297.400.000		314.150.000		334.150.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya efektivitas penataan kelembagaan dan analisis jabatan di Jawa Tengah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/ Kota ****	Dokumen	4	1	207.400.000	1	272.400.000	1	297.400.000	1	314.150.000	1	334.150.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota *****					207.400.000		272.400.000		297.400.000		314.150.000		334.150.000	BIRO ORGANISASI	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/ Kota *****	Dokumen	N/A	4	207.400.000	4	272.400.000	4	297.400.000	4	314.150.000	4	334.150.000	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI Kelembagaan Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baselin e Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah		Persentase Perangkat Daerah yang mengimple mentasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif ***	%	92	92	207.800.000	92	272.800.000	92	297.800.000	92	314.550.000	92	334.550.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan ****					207.800.000		272.800.000		297.800.000		314.550.000		334.550.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya efektifitas penataan kelembagaan dan analisis jabatan di Jawa Tengah		Jumlah Dokumen Rekomenda si Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota ****	Dokumen	4	1	207.800.000	1	272.800.000	1	297.800.000	1	314.550.000	1	334.550.000	BIRO ORGANISASI	
			Penataan Analisis Jabatan *****					207.800.000		272.800.000		297.800.000		314.550.000		334.550.000	BIRO ORGANISASI	
		Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaa n Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan *****	Dokumen	N/A	4	207.800.000	4	272.800.000	4	297.800.000	4	314.550.000	4	334.550.000	BIRO ORGANISASI	Analisis Jabatan OPD dan Kab/Kota, JAWA TENGAH BIRO ORGANISASI
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah		Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A ***	%	N/A	59,52	140.000.000	66,66	155.000.000	64,28	180.000.000	69,04	196.750.000	73,8	216.750.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ****					140.000.000		155.000.000		180.000.000		196.750.000		216.750.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya efektifitas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah		Jumlah Dokumen Rekomenda si Pelaksanaa n RB di OPD ****	Dokumen	4	2	140.000.000	2	155.000.000	2	180.000.000	2	196.750.000	2	216.750.000	BIRO ORGANISASI	
			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *****					140.000.000		155.000.000		180.000.000		196.750.000		216.750.000	BIRO ORGANISASI	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Reformasi Birokrasi		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *****	Dokumen	N/A	4	140.000.000	4	155.000.000	4	180.000.000	4	196.750.000	4	216.750.000	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI Pembinaan RB OPD, JAWA TENGAH
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah		Persentase Kabupaten/ Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB ***	%	N/A	71,42	155.860.000	74,28	155.860.000	77,14	180.860.000	80	180.860.000	82,85	180.860.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja *****					155.860.000		155.860.000		180.860.000		180.860.000		180.860.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya efektivitas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah		Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota *****	Dokumen	4	2	155.860.000	2	155.860.000	2	180.860.000	2	180.860.000	2	180.860.000	BIRO ORGANISASI	
			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi *****					155.860.000		155.860.000		180.860.000		180.860.000		180.860.000	BIRO ORGANISASI	
		Terlaksananya Reformasi Birokrasi		Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota *****	Dokumen	N/A	4	155.860.000	4	155.860.000	4	180.860.000	4	180.860.000	4	180.860.000	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI Pembinaan RB Kab/Kota, JAWA TENGAH
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah		Persentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat ***	%	64,28	70	235.160.000	70	300.150.000	70	325.150.000	70	341.900.000	70	361.900.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja *****					235.160.000		300.150.000		325.150.000		341.900.000		361.900.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya efektivitas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah		Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya *****	Dokumen	4	2	235.160.000	2	300.150.000	2	325.150.000	2	341.900.000	2	361.900.000	BIRO ORGANISASI	
			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja *****					235.160.000		300.150.000		325.150.000		341.900.000		361.900.000	BIRO ORGANISASI	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baselin e Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja *****	Dokumen	N/A	2	125.000.000	2	175.000.000	2	200.000.000	2	203.000.000	2	203.000.000	BIRO ORGANISASI	AKIP OPD dan Kab/Kota, JAWA TENGAH BIRO ORGANISASI
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Jumlah fasilitasi pembangunan zona integritas unit kerja dan Kab/Kota *****	Laporan	N/A	15	110.160.000	15	125.150.000	15	125.150.000	15	138.900.000	15	158.900.000	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI Zona Integritas unit kerja dan Kab/Kota, JAWA TENGAH
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik di Jawa Tengah		Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan ***	%	57,7	93	271.140.000	94	336.140.000	95	361.140.000	96	377.890.000	97	397.890.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ****					271.140.000		336.140.000		361.140.000		377.890.000		397.890.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan *****	Dokumen	4	2	271.140.000	2	336.140.000	2	361.140.000	2	377.890.000	2	397.890.000	BIRO ORGANISASI	
			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan *****					271.140.000		336.140.000		361.140.000		377.890.000		397.890.000	BIRO ORGANISASI	
		Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan *****	Dokumen	N/A	4	271.140.000	4	336.140.000	4	361.140.000	4	377.890.000	4	397.890.000	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI Tatalaksana UPP dan Kab/Kota, JAWA TENGAH
		Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik di Jawa Tengah		Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas ***	%	N/A	39,21	264.316.000	45,75	329.316.000	52,28	354.316.000	58,82	371.066.000	65,35	391.066.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ****					264.316.000		329.316.000		354.316.000		371.066.000		391.066.000	BIRO ORGANISASI	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik ****	Dokumen	4	2	264.316.000	2	329.316.000	2	354.316.000	2	371.066.000	2	391.066.000	BIRO ORGANISASI	
			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik *****					264.316.000		329.316.000		354.316.000		371.066.000		391.066.000	BIRO ORGANISASI	
		Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik *****	Dokumen	N/A	4	264.316.000	4	329.316.000	4	354.316.000	4	371.066.000	4	391.066.000	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI UP P dan Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ***					2.279.314.000		2.562.950.000		2.587.217.000		2.714.600.000		2.835.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa		Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa ***	%	N/A	92	1.112.084.000	93	1.226.300.000	94	1.236.725.000	95	1.290.500.000	96	1.345.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa *****					1.112.084.000		1.226.300.000		1.236.725.000		1.290.500.000		1.345.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan strategi, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa		Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa ****	Dokumen	N/A	4	1.112.084.000	4	1.226.300.000	4	1.236.725.000	4	1.290.500.000	4	1.345.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa *****					526.584.000		550.000.000		552.000.000		565.000.000		575.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa *****	Laporan	N/A	12	526.584.000	12	550.000.000	12	552.000.000	12	565.000.000	12	575.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai pagu diatas 200 juta bagi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa *****					320.500.000		370.900.000		373.000.000		390.000.000		410.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa *****	Laporan	N/A	4	180.000.000	4	210.300.000	4	211.000.000	4	220.000.000	4	230.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Jumlah Fasilitas Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Bagi SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		Terlaksananya pengelolaan e-katalog lokal		Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal *****	Laporan	N/A	4	140.500.000	4	160.600.000	4	162.000.000	4	170.000.000	4	180.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
		Meningkatnya kualitas pengelolaan strategi, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa		Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif *****	%	N/A	75	265.000.000	75	305.400.000	75	311.725.000	75	335.500.000	75	360.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa *****					265.000.000		305.400.000		311.725.000		335.500.000		360.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa *****	Laporan	N/A	4	190.000.000	4	220.000.000	4	225.000.000	4	240.000.000	4	255.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Jumlah Fasilitas Penyusunan Rencana Umum Pengadaan di Seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DKI JAKARTA
		Terlaksananya kualitas dokumen SHB		Jumlah Laporan Penyusunan SHB *****	Laporan	N/A	2	75.000.000	2	85.400.000	2	86.725.000	2	95.500.000	2	105.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Jumlah Fasilitas Penyusunan SHB Bagi SKPD Di Lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, DKI JAKARTA

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik		Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik ***	%	N/A	85	556.900.000	86	654.350.000	88	658.700.000	90	695.900.000	91	735.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ****					556.900.000		654.350.000		658.700.000		695.900.000		735.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa		Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa ****	Dokumen	N/A	4	556.900.000	4	654.350.000	4	658.700.000	4	695.900.000	4	735.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik *****					176.000.000		223.300.000		225.000.000		230.000.000		245.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik		Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik *****	Laporan	N/A	4	176.000.000	4	223.300.000	4	225.000.000	4	230.000.000	4	245.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Jumlah fasilitasi sistem dan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik bagi seluruh SKPD Provinsi dan Pelaku UMKM dan UMKK di Provinsi Jawa Tengah., JAWA TENGAH
			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa *****					250.400.000		280.700.000		282.700.000		305.900.000		320.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa *****	Laporan	N/A	4	250.400.000	4	280.700.000	4	282.700.000	4	305.900.000	4	320.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa SKPD Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa ****					130.500.000		150.350.000		151.000.000		160.000.000		170.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa ****	Laporan	N/A	4	130.500.000	4	150.350.000	4	151.000.000	4	160.000.000	4	170.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Jumlah Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, JAWA TENGAH
		Meningkatnya Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM		Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPEJ ***	%	N/A	83	610.330.000	85	682.300.000	86	691.792.000	88	728.200.000	90	755.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa ****					610.330.000		682.300.000		691.792.000		728.200.000		755.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Meningkatnya kualitas pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan serta pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa		Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa ****	Dokumen	N/A	4	610.330.000	4	682.300.000	4	691.792.000	4	728.200.000	4	755.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa ****					125.000.000		142.300.000		143.792.000		152.900.000		160.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa ****	Orang	N/A	8	125.000.000	8	142.300.000	8	143.792.000	8	152.900.000	8	160.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Pelaksanaan Pembinaan, Bimtek dan Workshop SDM PBJ di Pemprov Jawa Tengah, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa *****					175.330.000		215.000.000		218.000.000		225.300.000		235.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa *****	Dokumen	N/A	4	175.330.000	4	215.000.000	4	218.000.000	4	225.300.000	4	235.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Pembinaan Kelembagaan melalui pendampingan, sosialisasi dan Bintek Kelembagaan UKPBJ Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah., JAWA TENGAH
			Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa *****					310.000.000		325.000.000		330.000.000		350.000.000		360.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
		Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa *****	Dokumen	N/A	4	310.000.000	4	325.000.000	4	330.000.000	4	350.000.000	4	360.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA Pendampingan Hukum dan permasalahan PEJ serta Bimbingan Hukum Bidang Pengadaan Barjas untuk SKPD Pemerintah Provinsi Jawa tengah, JAWA TENGAH
Meningkatkan kualitas tata kelolaperangkat daerah berintegritas dan dinamis di Sekretariat Daerah *								257.107.143.000		280.256.729.000		308.267.626.000		338.696.850.000		372.193.418.000	Sekretariat Daerah	
				Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah *	Angka	76	76		76		76		76		76		Sekretariat Daerah	
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah di Sekretariat Daerah **							256.857.143.000		280.006.729.000		308.017.626.000		338.361.850.000		371.848.418.000	Sekretariat Daerah	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
				Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Sekretariat Daerah **	Angka	82	83	256.857.143.000	84	280.006.729.000	85	308.017.626.000	86	338.361.850.000	87	371.848.418.000	Sekretariat Daerah	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					252.801.804.000		275.444.013.000		302.988.415.000		333.287.256.000		366.615.982.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah		Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda ***	%	100	100	218.430.804.000	100	237.635.913.000	100	261.399.505.000	100	287.539.455.000	100	316.293.400.000	BIRO UMUM	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ****					114.386.262.000		126.186.917.000		141.805.610.000		158.986.171.000		174.195.451.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan administrasi keuangan		Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun ****	Dokumen	N/A	12	114.386.262.000	12	126.186.917.000	12	141.805.610.000	12	158.986.171.000	12	174.195.451.000	BIRO UMUM	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN *****					111.811.262.000		123.354.417.000		138.689.860.000		155.558.846.000		170.425.393.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *****	Orang/Bulan	N/A	12	111.811.262.000	12	123.354.417.000	12	138.689.860.000	12	155.558.846.000	12	170.425.393.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****					2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN *****	Dokumen	N/A	12	2.000.000.000	12	2.200.000.000	12	2.420.000.000	12	2.662.000.000	12	2.928.200.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****					450.000.000		495.000.000		544.500.000		598.950.000		658.845.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *****	Dokumen	N/A	12	450.000.000	12	495.000.000	12	544.500.000	12	598.950.000	12	658.845.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****					125.000.000		137.500.000		151.250.000		166.375.000		183.013.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD *****	Laporan	N/A	12	125.000.000	12	137.500.000	12	151.250.000	12	166.375.000	12	183.013.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah *****					800.000.000		880.000.000		968.000.000		1.064.800.000		1.171.280.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah *****	Dokumen	N/A	12	800.000.000	12	880.000.000	12	968.000.000	12	1.064.800.000	12	1.171.280.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****					500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD *****	Dokumen	N/A	12	500.000.000	12	550.000.000	12	605.000.000	12	665.500.000	12	732.050.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****					300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD *****	Laporan	N/A	12	300.000.000	12	330.000.000	12	363.000.000	12	399.300.000	12	439.230.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah ****					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah		Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah ****	Laporan	N/A	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	BIRO UMUM	
			Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah *****	Laporan	N/A	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					11.325.000.000		12.457.500.000		13.703.250.000		15.073.575.000		16.580.933.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Bagian Rumah Tangga Setda		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda ****	%	100	100	11.325.000.000	100	12.457.500.000	100	13.703.250.000	100	15.073.575.000	100	16.580.933.000	BIRO UMUM	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor *****					550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000		805.255.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	550.000.000	12	605.000.000	12	665.500.000	12	732.050.000	12	805.255.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					700.000.000		770.000.000		847.000.000		931.700.000		1.024.870.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	700.000.000	12	770.000.000	12	847.000.000	12	931.700.000	12	1.024.870.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga *****					600.000.000		660.000.000		726.000.000		798.600.000		878.460.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	600.000.000	12	660.000.000	12	726.000.000	12	798.600.000	12	878.460.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor *****					175.000.000		192.500.000		211.750.000		232.925.000		256.218.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	175.000.000	12	192.500.000	12	211.750.000	12	232.925.000	12	256.218.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan *****				300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		439.230.000	BIRO UMUM		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	300.000.000	12	330.000.000	12	363.000.000	12	399.300.000	12	439.230.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Fasilitasi Kunjungan Tamu *****				6.000.000.000		6.600.000.000		7.260.000.000		7.986.000.000		8.784.600.000	BIRO UMUM		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *****	Laporan	N/A	12	6.000.000.000	12	6.600.000.000	12	7.260.000.000	12	7.986.000.000	12	8.784.600.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****				3.000.000.000		3.300.000.000		3.630.000.000		3.993.000.000		4.392.300.000	BIRO UMUM		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	3.000.000.000	12	3.300.000.000	12	3.630.000.000	12	3.993.000.000	12	4.392.300.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah *****				14.700.000.000		16.170.000.000		17.787.000.000		19.565.700.000		25.211.605.000	BIRO UMUM		
		Meningkatnya layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan *****	Paket	N/A	2	14.700.000.000	2	16.170.000.000	2	17.787.000.000	2	19.565.700.000	2	25.211.605.000	BIRO UMUM	
			Pengadaan Mebel *****				700.000.000		770.000.000		847.000.000		931.700.000		1.024.870.000	BIRO UMUM	107	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Tersedianya Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan *****	Paket	N/A	4	700.000.000	4	770.000.000	4	847.000.000	4	931.700.000	4	1.024.870.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****				14.000.000.000		15.400.000.000		16.940.000.000		18.634.000.000		24.186.735.000	BIRO UMUM		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	30	14.000.000.000	40	15.400.000.000	40	16.940.000.000	40	18.634.000.000	40	24.186.735.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya *****				0		0		0		0		0	BIRO UMUM		
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan *****	Unit	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****				30.826.448.000		33.909.093.000		37.300.002.000		41.030.002.000		45.133.003.000	BIRO UMUM		
		Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bagian Rumah Tangga Setda		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda ****	Laporan	N/A	12	30.826.448.000	12	33.909.093.000	12	37.300.002.000	12	41.030.002.000	12	45.133.003.000	BIRO UMUM	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik *****				9.000.000.000		9.900.000.000		10.890.000.000		11.979.000.000		13.176.900.000	BIRO UMUM		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	9.000.000.000	12	9.900.000.000	12	10.890.000.000	12	11.979.000.000	12	13.176.900.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor *****					1.200.000.000		1.320.000.000		1.452.000.000		1.597.200.000		1.756.920.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	1.200.000.000	12	1.320.000.000	12	1.452.000.000	12	1.597.200.000	12	1.756.920.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor *****					20.626.448.000		22.689.093.000		24.958.002.000		27.453.802.000		30.199.183.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *****	Laporan	N/A	12	20.001.448.000	12	22.001.593.000	12	24.201.752.000	12	26.621.927.000	12	29.284.120.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum *****	Laporan	N/A	12	125.000.000	12	137.500.000	12	151.250.000	12	166.375.000	12	183.013.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah *****	Laporan	N/A	2	500.000.000	2	550.000.000	2	605.000.000	2	665.500.000	2	732.050.000	BIRO UMUM	Biro umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					13.600.000.000		14.960.000.000		16.456.000.000		18.101.600.000		19.911.760.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan *****	Unit	N/A	833	13.600.000.000	833	14.960.000.000	833	16.456.000.000	833	18.101.600.000	833	19.911.760.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan *****					400.000.000		440.000.000		484.000.000		532.400.000		585.640.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya *****	Unit	N/A	5	400.000.000	5	440.000.000	5	484.000.000	5	532.400.000	5	585.640.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan *****					4.000.000.000		4.400.000.000		4.840.000.000		5.324.000.000		5.856.400.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *****	Unit	N/A	182	4.000.000.000	182	4.400.000.000	182	4.840.000.000	182	5.324.000.000	182	5.856.400.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pemeliharaan Mebel *****					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara *****	Unit	N/A	30	100.000.000	30	110.000.000	30	121.000.000	30	133.100.000	30	146.410.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya *****					2.000.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		2.662.000.000		2.928.200.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *****	Unit	N/A	300	2.000.000.000	300	2.200.000.000	300	2.420.000.000	300	2.662.000.000	300	2.928.200.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya *****				6.500.000.000		7.150.000.000		7.865.000.000		8.651.500.000		9.516.650.000	BIRO UMUM		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	17	6.500.000.000	17	7.150.000.000	17	7.865.000.000	17	8.651.500.000	17	9.516.650.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya *****				600.000.000		660.000.000		726.000.000		798.600.000		878.460.000	BIRO UMUM		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *****	Unit	N/A	300	600.000.000	300	660.000.000	300	726.000.000	300	798.600.000	300	878.460.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ****				32.743.094.000		33.017.403.000		33.319.143.000		33.651.057.000		34.016.163.000	BIRO UMUM		

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Bagian Rumah Tangga Setda		Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda ****	%	100	100	32.743.094.000	100	33.017.403.000	100	33.319.143.000	100	33.651.057.000	100	34.016.163.000	BIRO UMUM	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ****					2.743.094.000		3.017.403.000		3.319.143.000		3.651.057.000		4.016.163.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ****	Orang/Bulan	N/A	2	2.743.094.000	2	3.017.403.000	2	3.319.143.000	2	3.651.057.000	2	4.016.163.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ****					30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000		30.000.000.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ****	Orang/Bulan	N/A	2	30.000.000.000	2	30.000.000.000	2	30.000.000.000	2	30.000.000.000	2	30.000.000.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah		Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan ***	%	100	100	8.611.000.000	100	9.472.100.000	100	10.419.310.000	100	11.461.241.000	100	12.607.366.000	BIRO UMUM	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					35.000.000		38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.244.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan ****	%	100	100	35.000.000	100	38.500.000	100	42.350.000	100	46.585.000	100	51.244.000	BIRO UMUM	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					35.000.000		38.500.000		42.350.000		46.585.000		51.244.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	12	35.000.000	12	38.500.000	12	42.350.000	12	46.585.000	12	51.244.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ****					40.000.000		44.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan		Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan ****	Laporan	N/A	12	40.000.000	12	44.000.000	12	48.400.000	12	53.240.000	12	58.564.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****					40.000.000		44.000.000		48.400.000		53.240.000		58.564.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *****	Laporan	N/A	12	40.000.000	12	44.000.000	12	48.400.000	12	53.240.000	12	58.564.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *****					236.000.000		259.600.000		285.560.000		314.116.000		345.528.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan		Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan *****	%	100	100	236.000.000	100	259.600.000	100	285.560.000	100	314.116.000	100	345.528.000	BIRO UMUM	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *****					176.000.000		193.600.000		212.960.000		234.256.000		257.682.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan *****	Paket	N/A	8	176.000.000	8	193.600.000	8	212.960.000	8	234.256.000	8	257.682.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *****					60.000.000		66.000.000		72.600.000		79.860.000		87.846.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *****	Orang	N/A	2	60.000.000	2	66.000.000	2	72.600.000	2	79.860.000	2	87.846.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah ****					7.800.000.000		8.580.000.000		9.438.000.000		10.381.800.000		11.419.980.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan ****	%	100	100	7.800.000.000	100	8.580.000.000	100	9.438.000.000	100	10.381.800.000	100	11.419.980.000	BIRO UMUM	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah *****					3.500.000.000		3.850.000.000		4.235.000.000		4.658.500.000		5.124.350.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	3.500.000.000	12	3.850.000.000	12	4.235.000.000	12	4.658.500.000	12	5.124.350.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah *****					2.500.000.000		2.750.000.000		3.025.000.000		3.327.500.000		3.660.250.000	BIRO UMUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun									Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi	
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	2.500.000.000	12	2.750.000.000	12	3.025.000.000	12	3.327.500.000	12	3.660.250.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah *****				1.800.000.000		1.980.000.000		2.178.000.000		2.395.800.000		2.635.380.000	BIRO UMUM		
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan *****	Paket	N/A	12	1.500.000.000	12	1.650.000.000	12	1.815.000.000	12	1.996.500.000	12	2.196.150.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		Jumlah Paket Kebutuhan Staf Ahli Gubernur Disediakan *****	Paket	N/A	N/A	300.000.000	N/A	330.000.000	N/A	363.000.000	N/A	399.300.000	N/A	439.230.000	BIRO UMUM	BIRO UMUM
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan ****				500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000	BIRO UMUM		
		Meningkatnya layanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan		Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan ****	Laporan	N/A	12	500.000.000	12	550.000.000	12	605.000.000	12	665.500.000	12	732.050.000	BIRO UMUM	
			Penyiapan Materi Pimpinan *****				500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		732.050.000	BIRO UMUM		
		Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan		Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan *****	Dokumen	N/A	12	500.000.000	12	550.000.000	12	605.000.000	12	665.500.000	12	732.050.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan keuangan di Biro Umum dan Sekretariat Daerah		Persentase tingkat pelayanan umum dan keuangan perangkat daerah pada Bagian Humas dan Protokol ***	%	100	100	25.760.000.000	100	28.336.000.000	100	31.169.600.000	100	34.286.560.000	100	37.715.216.000	BIRO UMUM	
			Administrasi Umum					100.000.000		110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Bagian Humas dan Protokol		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol ****	%	100	100	100.000.000	100	110.000.000	100	121.000.000	100	133.100.000	100	146.410.000	BIRO UMUM	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan *****					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	BIRO UMUM	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *****	Dokumen	N/A	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD *****	Dokumen	N/A	4	50.000.000	4	55.000.000	4	60.500.000	4	66.550.000	4	73.205.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan ****					23.700.000.000		26.070.000.000		28.677.000.000		31.544.700.000		34.699.170.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan Bagian Humas dan Protokol		Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian Humas dan Protokol ****	Laporan	N/A	12	23.700.000.000	12	26.070.000.000	12	28.677.000.000	12	31.544.700.000	12	34.699.170.000	BIRO UMUM	
			Fasilitasi Komunikasi Pimpinan ****					20.000.000.000		22.000.000.000		24.200.000.000		26.620.000.000		29.282.000.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan ****	Laporan	N/A	12	20.000.000.000	12	22.000.000.000	12	24.200.000.000	12	26.620.000.000	12	29.282.000.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan ****					3.700.000.000		4.070.000.000		4.477.000.000		4.924.700.000		5.417.170.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan		Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan ****	Laporan	N/A	12	3.700.000.000	12	4.070.000.000	12	4.477.000.000	12	4.924.700.000	12	5.417.170.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Fasilitasi Keprotokolan ****					1.960.000.000		2.156.000.000		2.371.600.000		2.608.760.000		2.869.636.000	BIRO UMUM	
		Meningkatnya layanan fasilitasi keprotokolan		Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun ****	Laporan	N/A	12	1.960.000.000	12	2.156.000.000	12	2.371.600.000	12	2.608.760.000	12	2.869.636.000	BIRO UMUM	
			Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara ****					1.800.000.000		1.980.000.000		2.178.000.000		2.395.800.000		2.635.380.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara ****	Laporan	N/A	12	1.800.000.000	12	1.980.000.000	12	2.178.000.000	12	2.395.800.000	12	2.635.380.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *****					110.000.000		121.000.000		133.100.000		146.410.000		161.051.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *****	Laporan	N/A	12	110.000.000	12	121.000.000	12	133.100.000	12	146.410.000	12	161.051.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan *****					50.000.000		55.000.000		60.500.000		66.550.000		73.205.000	BIRO UMUM	
		Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan		Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan *****	Laporan	N/A	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	BIRO UMUM	Biro Umum, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH					929.526.000		1.022.000.000		1.121.956.000		1.058.031.000		1.083.000.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra		Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan *****	%	N/A	100	929.526.000	100	1.022.000.000	100	1.121.956.000	100	1.058.031.000	100	1.083.000.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah *****					929.526.000		1.022.000.000		1.121.956.000		1.058.031.000		1.083.000.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra ****	%	N/A	100	929.526.000	100	1.022.000.000	100	1.121.956.000	100	1.058.031.000	100	1.083.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					880.000.000		910.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.020.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****	Laporan	12	12	450.000.000	12	470.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	510.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	OPD Provinsi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah bagi Biro pemotda KS di 35 kab kota dan provinsi lain, DKI JAKARTA
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ****	Laporan	N/A	12	430.000.000	12	440.000.000	12	500.000.000	12	500.000.000	12	510.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	OPD Provinsi penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di 35 kab kota dan provinsi lain, DKI JAKARTA
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****					49.526.000		112.000.000		121.956.000		58.031.000		63.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****	Dokumen	N/A	12	34.526.000	12	95.000.000	12	100.000.000	12	36.031.000	12	40.000.000	BIRO PEMERINTAHAN ,OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	OPD Provinsi Pelaksanaan Penyusunan dokumen penatausahaan arsip dinamis bagi biro pemotda ks, JAWA TENGAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat *****	Dokumen	N/A	12	15.000.000	12	17.000.000	12	21.956.000	12	22.000.000	12	23.000.000	BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJA SAMA	OPD Provinsi->Pelaksanaan Penyusunan dokumen penatausahaan arsip dinamis bagi Asisten Pemkesra, JAWA TENGAH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					387.694.000		466.790.000		717.136.000		723.189.000		740.163.000	BIRO HUKUM	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Hukum		Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum ***	%	100	100	387.694.000	100	466.790.000	100	717.136.000	100	723.189.000	100	740.163.000	BIRO HUKUM	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****					219.357.000		271.440.000		420.622.000		441.270.000		460.845.000	BIRO HUKUM	
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Biro Hukum		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum ****	%	100	100	219.357.000	100	271.440.000	100	420.622.000	100	441.270.000	100	460.845.000	BIRO HUKUM	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****					219.357.000		271.440.000		420.622.000		441.270.000		460.845.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan *****	Orang	N/A	1000	219.357.000	1100	271.440.000	1200	420.622.000	1300	441.270.000	1400	460.845.000	BIRO HUKUM	BIRO HUKUM
			Administrasi Umum Perangkat					168.337.000		195.350.000		296.514.000		281.919.000		279.318.000	BIRO HUKUM	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Hukum		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum ****	%	100	100	168.337.000	100	195.350.000	100	296.514.000	100	281.919.000	100	279.318.000	BIRO HUKUM	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					146.275.000		169.763.000		259.196.000		245.150.000		242.735.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****	Laporan	N/A	12	146.275.000	12	169.763.000	12	259.196.000	12	245.150.000	12	242.735.000	BIRO HUKUM	JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					22.062.000		25.587.000		37.318.000		36.769.000		36.583.000	BIRO HUKUM	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	12	22.062.000	12	25.587.000	12	37.318.000	12	36.769.000	12	36.583.000	BIRO HUKUM	JAWA TENGAH, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Kesejahteraan Rakyat		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat ***	%	N/A	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	BIRO KESEJAHTERAN RAKYAT	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat ****	%	N/A	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	100	550.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****	Laporan	N/A	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****					150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****	Dokumen	N/A	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	JAWA TENGAH OPD Provinsi
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					420.524.000		420.524.000		420.480.000		447.255.000		447.255.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Administrasi Pembangunan Daerah		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah ***	%	100	100	420.524.000	100	420.524.000	100	420.480.000	100	447.255.000	100	447.255.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					420.524.000		420.524.000		420.480.000		447.255.000		447.255.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Administrasi Pembangunan Daerah		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pembangunan Daerah ****	%	N/A	100	420.524.000	100	420.524.000	100	420.480.000	100	447.255.000	100	447.255.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					345.000.000		345.000.000		345.000.000		360.000.000		360.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	24	345.000.000	24	345.000.000	24	345.000.000	24	360.000.000	24	360.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	OPD Provinsi Penyelenggaraan koordinasi Biro Administrasi Pembangunan, JAWA TENGAH
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					75.524.000		75.524.000		75.480.000		87.255.000		87.255.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	16	75.524.000	16	75.524.000	16	75.480.000	16	87.255.000	16	87.255.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Arsip Biro Administrasi Pembangunan Daerah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN					245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Perekonomian		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian ***	%	N/A	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah *****					245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000		245.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Perekonomian		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian ****	%	N/A	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	100	245.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000		225.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	OPD Provinsi Rapat internal, Koordinasi dan Konsultasi, JAWA TENGAH
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	BIRO PEREKONOMIAN	OPD Provinsi Rapat internal, Koordinasi dan Konsultasi, JAWA TENGAH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***					655.000.000		718.000.000		730.030.000		742.351.000		794.418.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan		Persentase tingkat pelayanan umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan ***	%	N/A	100	655.000.000	100	718.000.000	100	730.030.000	100	742.351.000	100	794.418.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah ****					655.000.000		718.000.000		730.030.000		742.351.000		794.418.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan ****	%	N/A	100	655.000.000	100	718.000.000	100	730.030.000	100	742.351.000	100	794.418.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					600.000.000		655.000.000		665.000.000		675.000.000		715.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	250.000.000	12	280.000.000	12	285.000.000	12	290.000.000	12	300.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan *****	Laporan	N/A	12	350.000.000	12	375.000.000	12	380.000.000	12	385.000.000	12	415.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****					55.000.000		63.000.000		65.030.000		67.351.000		79.418.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	12	35.000.000	12	38.000.000	12	40.030.000	12	42.351.000	12	45.000.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan *****	Dokumen	N/A	12	20.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	34.418.000	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	BIRO PEMBINAAN BUMD DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH				642.169.000		855.982.000		955.982.000		1.003.732.000		1.036.982.000	BIRO ORGANISASI		
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum, dan kepegawaian Perangkat Daerah di Biro Organisasi dan Asisten Administrasi		Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi ***	%	N/A	100	642.169.000	100	855.982.000	100	955.982.000	100	1.003.732.000	100	1.036.982.000	BIRO ORGANISASI	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ****				140.312.000		205.312.000		230.312.000		244.062.000		264.062.000	BIRO ORGANISASI		
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Biro Organisasi		Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi ****	%	N/A	100	140.312.000	100	205.312.000	100	230.312.000	100	244.062.000	100	264.062.000	BIRO ORGANISASI	
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya *****				0		0		0		0		0	BIRO ORGANISASI		
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan *****	Paket	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****					99.574.000		164.574.000		164.574.000		164.574.000		179.574.000	BIRO ORGANISASI	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian *****	Dokumen	N/A	4	99.574.000	4	164.574.000	4	164.574.000	4	164.574.000	4	179.574.000	BIRO ORGANISASI	Kepegawaian Sekretariat Daerah, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi *****					40.738.000		40.738.000		65.738.000		79.488.000		84.488.000	BIRO ORGANISASI	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan *****	Orang	N/A	12	40.738.000	16	40.738.000	19	65.738.000	22	79.488.000	25	84.488.000	BIRO ORGANISASI	OPD Provinsi Pendidikan dan Pelatihan Setda Prov Jateng, JAWA TENGAH
			Administrasi Umum Perangkat					501.857.000		650.670.000		725.670.000		759.670.000		772.920.000	BIRO ORGANISASI	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi *****	%	N/A	100	501.857.000	100	650.670.000	100	725.670.000	100	759.670.000	100	772.920.000	BIRO ORGANISASI	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****					451.596.000		560.000.000		625.000.000		645.000.000		655.000.000	BIRO ORGANISASI	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *****	Laporan	N/A	12	181.596.000	12	230.000.000	12	270.000.000	12	280.000.000	12	285.000.000	BIRO ORGANISASI	Koordinasi pada Biro Organisasi, JAWA TENGAH OPD Provinsi

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Output/Outcome (7)	Program (4)	Indikator Kinerja (8)	Satuan (9)	Baseline Tahun (10)	Target dan Pagu Indikatif Tahun								Unit Kerja Perangkat Daerah (22)	Lokasi (23)		
							2026		2027		2028		2029				2030	
							Target (12)	Rp (13)	Target (14)	Rp (15)	Target (16)	Rp (17)	Target (18)	Rp (19)			Target (20)	Rp (21)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi *****	Laporan	N/A	12	270.000.000	12	330.000.000	12	355.000.000	12	365.000.000	12	370.000.000	BIRO ORGANISASI	Koordinasi pada Asisten Administrasi, JAWA TENGAH OPD Provinsi
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****				50.261.000		90.670.000		100.670.000		114.670.000		117.920.000	BIRO ORGANISASI		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD *****	Dokumen	N/A	12	30.261.000	12	55.261.000	12	60.261.000	12	70.261.000	12	72.261.000	BIRO ORGANISASI	Biro Organisasi, JAWA TENGAH OPD Provinsi
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi *****	Dokumen	N/A	12	20.000.000	12	35.409.000	12	40.409.000	12	44.409.000	12	45.659.000	BIRO ORGANISASI	OPD Provinsi Penatausahaan arsip Asisten Administrasi, JAWA TENGAH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***				225.426.000		284.420.000		288.627.000		305.036.000		335.618.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA		
		Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa ***	%	N/A	100	225.426.000	100	284.420.000	100	288.627.000	100	305.036.000	100	335.618.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah *****				225.426.000		284.420.000		288.627.000		305.036.000		335.618.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA		

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa ****	%	N/A	100	225.426.000	100	284.420.000	100	288.627.000	100	305.036.000	100	335.618.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****				200.379.000		254.020.000		257.227.000		270.000.000		290.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ****	Laporan	N/A	12	200.379.000	12	254.020.000	12	257.227.000	12	270.000.000	12	290.000.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	Jumlah Fasilitas penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi di 35 Kab/Kota dan LKPP RI, DKI JAKARTA OPD Provinsi
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****				25.047.000		30.400.000		31.400.000		35.036.000		45.618.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD ****	Dokumen	N/A	12	25.047.000	12	30.400.000	12	31.400.000	12	35.036.000	12	45.618.000	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	OPD Provinsi Penatausahaan Arsip Dinamis pada di Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa, JAWA TENGAH
	Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah di Sekretariat Daerah **						250.000.000		250.000.000		250.000.000		335.000.000		345.000.000	Sekretariat Daerah		
				Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah Sekretariat Daerah **	Angka	N/A	3	250.000.000	3	250.000.000	3	250.000.000	3	335.000.000	3	345.000.000	Sekretariat Daerah	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI ***				250.000.000		250.000.000		250.000.000		335.000.000		345.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		

Tujuan	Sasaran	Output/Outcome	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
							2026		2027		2028		2029		2030			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(7)	(4)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah di Sekretariat Daerah		Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah ***	%	N/A	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	335.000.000	100	345.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ****				250.000.000		250.000.000		250.000.000		335.000.000		345.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi Sekretariat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan ****	%	N/A	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	335.000.000	100	345.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *****				100.000.000		100.000.000		100.000.000		135.000.000		135.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	Dokumen	N/A	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	135.000.000	4	135.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	OPD Provinsi Perencanaan Biro-biro lingkup Sekretariat
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah *****				150.000.000		150.000.000		150.000.000		200.000.000		210.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	N/A	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	200.000.000	6	210.000.000	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Evaluasi pelaksanaan APBD dan kinerja Biro-biro lingkup Setda

Tabel 4.2

Sub Kegiatan Perangkat Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama			
1.	Pengembangan <i>sister province</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dan identifikasi program kerjasama 2. Implementasi joint working group sesuai bidang yang disepakati 3. Forum Kerjasama Sister Province (<i>Liaison Officer</i>) 	20 negara selama 5 tahun	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah; Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Daerah; Sub Kegiatan: Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
2.	Penguatan Tata Kelola CSR untuk Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan SK dan Peraturan Gubernur tindaklanjut Perda TJSLP; 2. Fasilitasi Rapat/Sosialisasi/Rakor identifikasi pemetaan TJSLP; 3. Fasilitasi Rapat/Sosialisasi/Rakor verifikasi data TJSLP; 4. Monitoring dan evaluasi data TJSLP; 5. Pengembangan Aplikasi; 6. Fasilitasi Rapat/Sosialisasi/Rakor Bisnis Forum TJSLP berdasarkan hasil pemetaan (Atas, Menengah, Kecil) 	Laporan pelaksanaan tahunan	<p>Program Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha</p> <p>Kegiatan Penguatan Tata kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan</p>
3	Pemberdayaan Diaspora	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemetaan potensi dan kebutuhan Pemprov Jawa Tengah sesuai prioritas Gubernur 2. Forum Diaspora (Negara Terpilih) 	12 Negara selama 5 tahun	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
		<p>dan menyusun program kerja(work plan)</p> <p>3. Pelaksanaan program kerja di bidang Ekonomi (trade, investment and SMEs), Pendidikan, Tenaga kerja dan Promosi Budaya)</p> <p>4. perluasan networking dengan INGO</p>		
	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan			
4.	Memastikan lulusan pesantren dapat melakukan Penyetaraan Ijazah dan mendapatkan pengakuan untuk mudah kerja dan setara lulusan sekolah negeri dan swasta	Rapat koordinasi dan monitoring	Teridentifikasinya santri lulusan pondok	Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual, Sub Kegiatan : Fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana Pendidikan keagamaan
5	Pesantren Obah melalui Penambahan Dana Pengembangan Pesantren	<p>1. Pembuatan Sistem Data dan Informasi Pesantren Daerah</p> <p>2. Rapat koordinasi dan monitoring</p> <p>3. Fasilitasi hibah peningkatan sarana prasarana ponpes</p>	Peningkatan kualitas pesantren dan SDM pesantren Target : 5.364 pesantren / 100.000 santri	Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual, Sub Kegiatan : Fasilitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana Pendidikan keagamaan
6.	Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan	1. Pemberian hibah kepada lembaga pendidikan keagamaan untuk peningkatan kualitas sarpras	Membantu upaya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana	Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
	guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, Guru, Santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi	pendidikan 2. Rapat koordinasi dan monitoring	dan prasarana di lembaga pendidikan keagamaan, sehingga proses Kegiatan Belajar Mengajar dapat berjalan dengan optimal Target : lembaga pendidikan keagamaan Volume : 2.000 lembaga pendidikan keagamaan	bina spiritual, Sub Kegiatan : Faslitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana Pendidikan
7.	BOSDa Madrasah Aliyah	1. Pemberian hibah kepada Madrasah Aliyah untuk mencukupi biaya operasional madrasah 2. Rapat koordinasi dan monitoring	Memenuhi kebutuhan biaya operasional di Madrasah Aliyah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, Target : siswa MA volume : 200.000 siswa	Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan, Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan bina spiritual, Sub Kegiatan : Faslitasi pelaksanaan hibah sarana prasarana Pendidikan keagamaan
8.	Peningkatan kualitas hidup lansia	Koordinasi, pemantauan & evaluasi pelaksanaan kebijakan melalui pertemuan dengan unsur terkait	Laporan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup lansia	Program : Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
9.	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan day care untuk buruh di Kawasan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monev ketersediaan daycare untuk buruh di Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri; 2. Fasilitasi dan koordinasi terkait upaya pemenuhan daycare pada Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Monev ketersediaan daycare untuk buruh di Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri 2. Laporan Fasilitasi dan koordinasi terkait upaya pemenuhan daycare pada Kawasan Ekonomi Khusus/Kawasan Industri 	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
	Biro Hukum			
10.	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan yang sedang menghadapi permasalahan hukum melalui LBH yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	100 Perkara	<p>Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</p> <p>Kegiatan Bantuan Hukum</p> <p>Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum</p>
	Biro Perekonomian			
11.	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan	1. Fasilitasi dan koordinasi Pendampingan Sertifikasi Halal,	Laporan Fasilitasi dan koordinasi	Program Perekonomian dan Pembangunan; Kegiatan:

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
	Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian; Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
12.	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	1. Fasilitas penyusunan lembaga masyarakat ekonomi syariah 2. Fasilitasi penyusunan road map pengembangan ekonomi dan keuangan syariah	1. Terbentuknya kelembagaan KDEKS 2. Tersusunnya Roadmap	Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
13.	Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan dan ketersediaan <i>day care</i> untuk buruh di Kawasan Industri	1. Fasilitasi dan koordinasi pemberian Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan	Laporan Fasilitasi dan Koordinasi pemberian Pupuk mudah bagi petani, subsidi solar bagi nelayan	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
14.	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	1. Fasilitasi dan koordinasi Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah	Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
			Tangga) secara Gratis	
15.	Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Fasilitasi dan koordinasi Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hilirisasi Produk Unggulan dengan semangat Ekonomi Hijau	Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
16.	Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)	1. Fasilitasi dan Koordinasi Mendorong Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)	Laporan Program Santri Preneur (Santri Pengusaha)	Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
17.	Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	1. Fasilitasi dan Koordinasi Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Program Asuransi gagal panen bagi petani dan nelayan melalui Jamkrida	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
18.	Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok	Fasilitasi dan koordinasi Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok	Laporan Fasilitasi dan koordinasi Operasi Pasar untuk Menjaga Stabilitas Harga Bahan Pokok	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
				Kelautan, dan Perikanan
19.	Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	Fasilitasi dan Koordinasi Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Penghapusan hutang Petani, nelayan, UMKM	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan: Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam Sub Kegiatan: Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
	Biro BUMD dan BLUD			
20.	Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas	1. Fasilitasi dan Koordinasi Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas	Surat Edaran Pegawai BUMD dan BLUD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas	Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan, Pembinaan dan Pengembangan BUMD Keuangan
		2. Monitoring dan evaluasi ketersediaan pegawai BUMD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas.	Laporan Monitoring dan evaluasi ketersediaan pegawai BUMD di Jawa Tengah sebanyak 3% dapat menerima penyandang Disabilitas.	Koordinasi, Sinkronisasi Perencanaan, Pembinaan dan Pengembangan BUMD Jasa Produksi
21.	Fasilitasi Restrukturisasi Proses Bisnis dan Tata Kelola BUMD	1. Penyusunan Pergub tentang Tata Kelola BUMD 2. Reformasi Struktur Organisasi 3. Peningkatan kompetensi SDM	1. Tersusunnya Pergub dan rencana aksi tentang Tata Kelola	Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan BUMD Keuangan

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
		BUMD 4. Penyusunan Rencana Aksi Tata Kelola BUMD	BUMD 2. Tersusunnya struktur organisasi dan peningkatan kompetensi BUMD	
22.	Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	Fasitasi dan Koordinasi Pembelian hasil panen petani dan nelayan	Laporan Fasitasi dan Koordinasi Pembelian hasil panen petani dan nelayan oleh BUMD Jateng Agro Berdikari	Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan:
23.	Membangun jaringan pasar (ekspor-supermarket marketplace) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (<i>E-Commerce</i>)	1. Penyusunan kajian kelayakan bisnis <i>e-Commerce</i> 2. Penyusunan regulasi jaringan pasar (ekspor-supermarket marketplace) milik Pemprov Jateng melalui BUMD (<i>E-Commerce</i>) 3. Fasilitasi dan Koordinasi dalam membuat platform E-Commerce (nomor 2 dan 3 dilaksanakan apabila hasil kajian bisnis dinyatakan layak)	1. Dokumen kajian kelayakan bisnis <i>e-Commerce</i> ; 2. Dokumen regulasi <i>e-Commerce</i> ; 3. Terbangunnya jaringan pasar (ekspor-supermarket marketplace) milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui BUMD (<i>E-Commerce</i>)	Program Perekonomian dan Pembangunan / Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian / Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
	Biro Administrasi Pembangunan Daerah			
24.	Pembangunan Infrastruktur	1. Fasilitasi dan koordinasi	1. Laporan Hasil	PROGRAM KEBIJAKAN

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
	melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	<p>Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur melalui RTLH,</p> <p>2. Fasilitasi dan koordinasi Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Pusat Rekreasi, dan</p> <p>3. Koordinasi/Fasilitasi, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Gelanggang Olah Raga</p>	<p>Koordinasi, Fasilitasi dan koordinasi Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur melalui RTLH</p> <p>2. Laporan Fasilitasi dan koordinasi Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pengembangan Pusat Rekreasi, dan</p> <p>3. Laporan Koordinasi/Fasilitasi, Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Gelanggang Olah Raga</p>	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN Kegiatan: Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Sub Kegiatan: Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
	Biro Organisasi			
25.	Mengefektifkan kembali Bakorwil sebagai Pusat Pelayanan Publik berbasis wilayah	Mengkoordinasikan dan mengoptimalkan rumah rakyat di kantor Gubernur Jalan Pahlawan dan 3 (tiga) gerai rumah rakyat di eks bakorwil dalam rangka	Penyelesaian aduan, data informasi dan pelayanan publik	Program Penataan Organisasi; Kegiatan: Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ;sub kegiatan: fasilitasi pelayanan publik

No.	Program Daerah	Rencana Aktivitas Riil	Output/ Target/ Volume	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
		menerima aduan, permintaan data informasi serta pelayanan publik lainnya		
26.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekspresi budaya	Penyusunan Kebijakan penggunaan baju adat daerah pada hari kamis minggu pertama dalam 1 bulan sekali, HUT Provinsi Jateng dan acara ceremonial tertentu	Surat Edaran Sekda tentang penggunaan baju adat daerah	Program Penataan Organisasi; Kegiatan: Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ;sub kegiatan: fasilitasi pelayanan publik
27.	Peningkatan TPP ASN	Penyusunan kebijakan penunjang terkait TPP berbasis kinerja dan kelas jabatan	Dokumen kajian umum kebijakan TPP, Dokumen Pengukuran kinerja, Dokumen evaluasi implementasi TPP	Program Penataan Organisasi; Kegiatan: Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan; Sub Kegiatan : Penataan Analisis Jabatan
28.	Penetapan Zona Integritas / Zona Anti Korupsi di OPD, BUMD, BLUD	Fasilitasi dan koordinasi pengembangan Zona Integritas Prov Jateng	100 % OPD yang terfasilitasi	Program Penataan Organisasi; Kegiatan: Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja ;sub kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
	Biro Umum			
29.	Kantor Gubernur Rumah Rakyat	Membuka gerai rumah rakyat di Kantor Gubernur Jalan Pahlawan	Terbangunnya gerai rumah rakyat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan; Kegiatan : Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; Sub Kegiatan: Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah

Tabel 4.3

Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline Tahun		TARGET CAPAIAN						Keterangan
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Kualitas Kebijakan	Angka	66,3	66,3	66,35	66,4	66,5	66,6	66,7	66,8	IKU
2	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	%	Na	Na	Na	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	IKU
3	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	%	Na	Na	Na	44	44	44	44	44	IKU
4	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	Na	Na	Na	37	37	37	37	37	IKU

Keterangan:

Na = merupakan indikator baru dan belum memiliki baseline

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci

NO	Indikator Kinerja Kunci	Base Line Tahun		Target Capaian Tahun						Ket
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif	Na	Na	Na	75	75	75	75	75	Biro PBJ

Keterangan:

Na = merupakan indikator baru dan belum memiliki baseline

BAB V PENUTUP

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaras dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2025-2029 serta sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi penyelenggaraan urusan Sekretariat Daerah oleh Biro-Biro pada tahun 2025-2029 dalam mencapai Tujuan Sekretariat Daerah yaitu “Meningkatkan Kualitas Kebijakan” dan pedoman dalam penyusunan Renja Tahunan.

Penetapan pagu pendanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dilakukan berdasarkan proyeksi yang diberikan oleh TAPD Provinsi Jawa Tengah. Pagu tersebut dimungkinkan mengalami perubahan dikarenakan ketersediaan anggaran belanja Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu, perlu kiranya penyusunan Renja Tahunan dilakukan dengan cermat agar sasaran pembangunan tetap dapat tercapai pada akhir masa periode Rencana Strategis pada tahun 2029. Dalam hal ketersediaan anggaran apabila tidak mencukupi, maka biro-biro lingkup Setda perlu menentukan prioritas dan inovasi di tingkat pelaksanaan sehingga target kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai. Inovasi pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi guna efisiensi pemanfaatan anggaran.

Kepada semua pihak yang terlibat dan memberikan kontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Lampiran Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Meningkatkan Kualitas Kebijakan Daerah

Meningkatkan sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil lingkup Asisten I

1. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dasar;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan non dasar;
4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan
5. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah;
6. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah kabupaten/kota;
7. Meningkatkan fasilitasi penyelesaian penanganan permasalahan hukum;

Meningkatkan sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil lingkup Asisten II

1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup; dan
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral
4. Meningkatkan kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan Daerah;
5. Meningkatkan kualitas kebijakan administrasi pembangunan Wilayah;
6. Meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan teknis pembangunan daerah
7. Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Keuangan;
8. Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Aneka Usaha; dan
9. Meningkatkan capaian kinerja BLUD.

Meningkatkan sinergi kebijakan yang adaptif dan berorientasi hasil lingkup Asisten III

1. Meningkatkan efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah;
2. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah;
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik di Jawa Tengah
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
6. Meningkatkan Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ

CASCADING SETDA 2025-2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	Meningkatkan kualitas kebijakan daerah	Indeks Kualitas Kebijakan	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan, kerjasama dan otonomi daerah	Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan kerjasama antar pemerintah, Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta.	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi								
										Persentase naskah kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta yang ditindaklanjuti				Fasilitasi Kerjasama Lembaga, Badan Usaha Dan Swasta	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi					
										Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama				Persentase rekomendasi evaluasi kerjasama daerah	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang Dievaluasi				
																	Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Dievaluasi				
																	Persentase layanan izin perjalanan ke Luar Negeri				
										Persentase rekomendasi bidang administrasi pemerintahan, penataan wilayah dan pemerintahan umum yang ditindaklanjuti				Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan umum	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Fasilitasi Penataan Wilayah	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah		
																	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
																	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan			Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Meningkatnya Kualitas Tertib Administrasi KDH dan DPRD	Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
									Meningkatnya Kualitas Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan
									Meningkatnya Kualitas Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pemenuhan dokumen evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
					PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah	Indeks Reformasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Perundang - Undangan	Meningkatnya Harmonisasi Produk Hukum Daerah	Presentase rancangan Produk Hukum Pengaturan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang ² an	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun
										Presentase rancangan Produk Hukum Penetapan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang ² an	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun
									Meningkatnya Kualitas Database Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Presentase penataan database peraturan perundang-undangan melalui pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk hukum yang didokumentasi dan dikelola informasinya
										Presentase Hasil Anev Peraturan Perundang-Undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan			Jumlah Produk Hukum yang dilakukan Analisis dan Evaluasi
					PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Kab/ Kota	Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota		Meningkatnya Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	Presentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dikaji	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi
													Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Wilayah II
													Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi Wilayah III
					PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Meningkatnya Fasilitasi Penyelesaian Penanganan Permasalahan Hukum	Capaian Pemberian Bantuan Hukum	Fasilitasi Bantuan Hukum	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Perdata/TUN	Presentase bantuan hukum yang tertangani	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												Terlaksananya bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	Jumlah Pemberian Bantuan Hukum
							Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Fasilitasi Bantuan Hukum	Meningkatnya Pelaksanaan HAM Daerah	Presentase Fasilitasi HAM Daerah	Fasilitasi Penyelesaian masalah hukum Non Litigasi dan HAM	Terlaksananya Fasilitasi Implementasi Kebijakan HAM	Jumlah Fasilitasi Implementasi HAM Daerah
								Meningkatnya Penyelesaian Penanganan masalah Hukum nonlitigasi	Presentase masalah hukum nonlitigasi yang tertangani			Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Hukum Non Litigasi yang diselesaikan
					PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatkan kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan dasar	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas kebijakan Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan
											Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
											Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
											Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial
											Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Meningkatkan kualitas Pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan Non dasar	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Meningkatkan kualitas kebijakan Non Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata
											Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Des
						Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan	Persentase rekomendasi kebijakan pengentasan kemiskinan yang ditindaklanjuti		Meningkatnya kualitas fasilitasi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan	Jumlah rekomendasi kebijakan pengentasan kemiskinan		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan
						Meningkatkan kualitas pelaksanaan Fasilitas Keagamaan dalam kondisi baik	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya kualitas Pembinaan Mental Spiritual	Prosentase realisasi hibah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola
												Jumlah dokumen laporan pelaksanaan hibah keagamaan	
										Prosentase pelaksanaan pelayanan keagamaan	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi
												Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatkan kualitas Pelaksanaan kebijakan perekonomian makro	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Meningkatkan kualitas kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan ekonomi makro	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	
				Meningkatkan kualitas Pelaksanaan kebijakan perekonomian mikro		Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan kualitas kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	
													Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
							Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
								Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan						Jumlah Laporan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)
								Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
						Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup	Persentase capaian kinerja program bidang Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Lingkungan Hidup	Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
							Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Energi Sumber Daya Mineral						Persentase capaian kinerja program bidang Energi Sumber Daya Mineral	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Energi Sumber Daya Mineral

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Keuangan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi Evaluasi kebijakan BUMD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, perencanaan, pembinaan dan pengembangan BUMD Jasa Keuangan
				Meningkatkan Capaian Kinerja BUMD Jasa Aneka Usaha		Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha						
				Meningkatkan capaian kinerja BLUD		Persentase nilai kemandirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi						
					PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Meningkatkan capaian kinerja BLUD	Persentase nilai kemandirian BLUD	Meningkatkan kualitas pelaksanaan korodinasi Kebijakan dan Koordinasi BLUD	Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan BLUD	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD
				Meningkatkan capaian kinerja BLUD		Persentase nilai kemandirian BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan BLUD			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	
				Meningkatkan kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan daerah		Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Pengendalian Administrasi Pembangunan APBD	Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Manusia yang bersumber dari APBD
											Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang infrastruktur yang bersumber dari APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang infrastruktur yang bersumber dari APBD	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan bidang PU dan Perhubungan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan bidang PU dan Perhubungan
												Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang bersumber dari APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA yang bersumber dari APBD
											Pengendalian Administrasi Pembangunan APBN	Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
						Meningkatnya kualitas kebijakan bidang administrasi pembangunan Kewilayahan	Persentase realisasi bantuan keuangan		Meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Pengendalian Administrasi Pembangunan Wilayah	Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
						Meningkatkan kualitas Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah yang di usulkan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan daerah	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan daerah	Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah
											Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah
							Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah		Meningkatnya kualitas pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan
				Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas pengelolaan strategi, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
										Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya kualitas dokumen SHB	Jumlah Laporan Penyusunan SHB
												Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa (4 Laporan)
												Terlaksananya pengelolaan e-katalog lokal	Jumlah Laporan Pengelolaan e katalog lokal
						Meningkatnya kualitas pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
											Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
											Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
						Meningkatnya Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas pembinaan sumber daya manusia, pembinaan kelembagaan serta pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis oeneadaan barang dan iasa	Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
											Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
											Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
					PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Meningkatnya efektivitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Meningkatnya efektifitas penataan kelembagaan dan analisis jabatan di Jawa Tengah	Jumlah Dokumen Rekomendasi fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													Jumlah laporan fasilitasi penilaian tingkat kematangan organisasi
							Persentase Kabupaten/Kota yang meningkat Skor Kematangan Organisasinya			Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
							Prosentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan hasil Analisis Jabatan secara efektif			Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Penataan Analisis Jabatan	Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan
						Meningkatnya efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja di Jawa Tengah	Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya efektivitas pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di OPD	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
							Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pelaksanaan RB di kab/kota			Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Pelaksanaan RB di Kab/kota
							prosentase Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP meningkat			Jumlah OPD dan Kab/Kota yang difasilitasi AKIP nya	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
										Jumlah dokumen fasilitasi pembangunan Zona Integritas Unit Kerja dan Kabupaten/Kota			Jumlah fasilitasi pembangunan zona integritas unit kerja dan Kab/Kota
						Meningkatnya efektivitas pelaksanaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik di Jawa Tengah	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan		Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan tatalaksana pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan
							Persentase UPT yang memperoleh nilai IPP (Indeks Pelayanan Publik) Mandiri A - (Sangat Baik) ke atas			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik
2	Meningkatkan kualitas tata kelola perangkat daerah berintergrasi dan dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya kualitas administrasi pelayanan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setra	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi keuangan	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
											Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
											Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
											Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
								Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Bagian Rumah Tangga Setda	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
											Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
											Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
											Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
											Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
											Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Biro Umum

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya layananana Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
											Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
											Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya layanan jasa pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
											Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
											Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bagian Rumah Tangga Setda	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
													Jumlah peringatan hari besar nasional dan daerah
													Jumlah Penilaian pelayanan Biro umum
								Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Bagian Rumah Tangga Setda	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Daerah
											Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah
				Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	
											Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Biro Umum
								Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Meningkatnya layanan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah	Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga kepala daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan
											Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan
											Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan
								Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya layanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Penyiapan Materi Pimpinan	Terlaksananya penyiapan materi pimpinan	Jumlah Paket Kebutuhan Staf Ahli Gubernur Disediakan
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Meningkatnya layanan fasilitasi materi dan komunikasi pimpinan Bagian Humas dan Protokol	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian Humas dan Protokol	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya fasilitasi komunikasi pimpinan		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
											Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Terlaksananya pengelolaan dokumentasi pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Bagian Humas dan Protokol	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
											Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
							Fasilitasi Keprotokolan	Meningkatnya layanan fasilitasi keprotokolan	Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun		Fasilitasi dan Pelaksanaan Acara	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu kepala daerah dan wakil kepala daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
											Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Terlaksananya pengelolaan hubungan keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama dan Asisten Pemerintahan Kesra	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
													Jumlah dokumen penatausahaan arsip Dinamis Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
													Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum Biro Hukum	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Hukum	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Hukum	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Hukum	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Biro Hukum	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Hukum	Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan DBHCHT
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Kesejahteraan Rakyat	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Kesejahteraan Rakyat	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Kesejahteraan Rakyat	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro Perekonomian	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Perekonomian	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Perekonomian	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum di Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro BUMD dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
												Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
												Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Ekonomi dan Pembangunan	
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum Biro Adm. Bangda	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembaneunan Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Adm. Bangda	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Biro Adm. Bangda
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Adm. Bangda	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Biro Adm. Bangda
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KINERJA PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						Meningkatnya kualitas pelayanan umum, dan kepegawaian Perangkat Daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
												Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada perangkat daerah di Asisten Administrasi	
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
												Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah di Asisten Administrasi	
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah Biro Organisasi	Persentase layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai dengan standar layanan Biro Organisasi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
											Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya pendataan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
											Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
			Meningkatnya kualitas pengelolaan risiko perangkat daerah	Indeks Manajemen Risiko		Meningkatnya kualitas perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Sekretariat Daerah
											Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah

Tabel
Identifikasi Risiko

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/ Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA								
1	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	MoU tidak terlaksana	Risiko Strategis	Tidak sinkronnya tujuan antar Pemerintah Provinsi daerah dengan Pemerntahan Luar daerah	Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana.	Pemprov
2	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan	Risiko Strategis	Kurangnya sosialisasi dan komunikasi	Tertundanya penetapan lokasi pembangunan	Instansi pengusul, masyarakat terdampak, Gubernur
3	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Gagal tercapainya kesepakatan batas	Risiko Strategis	Perbedaan persepsi atau kepentingan antar daerah	Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah	Pemkab/Pemkot, Masyarakat
4	Sasaran Program	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase tertib administrasi pelaksanaan otonomi daerah	Dokumen LPPD tidak dapat disusun tepat waktu	Risiko Operasional	Keterlambatan pedoman teknis dari Kemendagri	Keterlambatan penyampaian LPPD ke pusat, mempengaruhi proses EPPD	Biro Pemotdaker
5	Sasaran Program	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	Terlambatnya penyusunan atau revisi naskah kerja sama	Risiko Reputasi	Kurangnya komitmen dari anggota tim terhadap usulan kerjasama	Gagalnya inisiasi kerja sama dan menurunnya kepercayaan pihak luar negeri terhadap Jawa Tengah	Pemprov, Biro Pemotdaker
6	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase layanan fasilitasi KDH dan DPRD	Usulan pengesahan DPRD tidak sesuai prosedur	Risiko Operasional	Kelengkapan berkas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tertundanya pengesahan penggantian antar waktu DPRD	Biro Pemotdaker, legislatif

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah rekomendasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan SPM	Daerah tidak dapat memenuhi target SPM	Risiko Operasional	Indikator SPM tidak sesuai dengan perencanaan daerah	Kinerja Pemerintahan Daerah dinilai kurang optimal	OPD teknis, Biro Pemotdaker
8	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	Ketidakpatuhan terhadap peraturan atau kegagalan dalam menjalankan kontrak kerjasama	Risiko Kemitraan	Tidak pahamnya OPD Provinsi dan Pemkab/Kot terhadap regulasi kemitraan	Berkurangnya kepercayaan mitra luar negeri terhadap Pemda	Pemprov, Publik
9	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase naskah kerjasama antar pemerintah yang ditindaklanjuti	Pelaksanaan kerjasama luar negeri kurang maksimal	Risiko Kemitraan	Kurangnya partisipasi Pemda terhadap pelaksanaan kerjasama	Menghambat aktivitas bisnis dan pembangunan	Pemprov, masyarakat
10	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase rekomendasi evaluasi kerjasama daerah	Evaluasi pelaksanaan kerjasama tidak dapat dilakukan	Risiko Operasional	Tidak ada instrumen Monev terkait pelaksanaan kerjasama	Tidak termonitornya pelaksanaan kerjasama di lingkup Pemprov Jawa Tengah	Pemprov
11	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPD	Masyarakat merasa memiliki tanah negara atau tanah aset milik pemerintah	Risiko Operasional	Terjadi pembiaran penguasaan aset pemerintah oleh masyarakat	Potensi konflik sosial dan pelanggaran hukum	Masyarakat terdampak, Gubernur
12	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Target sertifikasi tanah tidak tercapai	Risiko Operasional	Ketidaksinkronan data pertanahan & keterlambatan kebijakan daerah	Hak atas tanah masyarakat tidak jelas, sengketa tanah	Masyarakat penerima PTSL, Pemprov
13	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Gangguan ketertiban di kantor Gubernur	Risiko Operasional	Koordinasi pengamanan yang lemah	Terganggunya pelayanan dan keamanan lingkungan	Pengunjuk rasa, ASN, Pemprov
14	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Keterlambatan LKPJ	Risiko Operasional	Data dari OPD tidak lengkap atau lambat masuk	Rekomendasi DPRD tidak optimal, turunnya kepercayaan	Gubernur, DPRD, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Sasaran Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan, penataan wilayah dan LKPJ	Nama rupabumi tidak terbakukan	Risiko Operasional	Data tidak valid atau belum diverifikasi	Kesalahan pada peta atau dokumen resmi	Masyarakat, Pemda, Badan Informasi Geospasial
BIRO HUKUM								
16	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegagalan dalam fasilitasi penyelesaian perkara di pengadilan karena kelemahan dalam pembuktian	Risiko Legal	Kelemahan pembuktian dalam penyelesaian perkara di pengadilan	Potensi pengeluaran keuangan atau aset daerah karena putusan Pengadilan akibat kelemahan dalam pembuktian	OPD Provinsi Jawa Tengah
17	Sasaran Program	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan	Risiko Legal	Ketidakhadiran Perangkat Daerah teknis terkait dalam hal pencermatan substansi teknis atau pembahasan dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah	Kebijakan baru Pemerintah Daerah terkait implementasi Produk Hukum Daerah tertunda	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat
18	Sasaran Program	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Efektifitas Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota	produk hukum daerah yang disusun tumpang tindih dan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya	Risiko Operasional	masih banyak perangkat daerah yang belum memahami pentingnya pengkajian produk hukum melalui analisis dan evaluasi termasuk dalam menindaklanjuti hasil kajian, analisis dan evaluasi	Banyak produk hukum yang tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan serta mengalami permasalahan dalam implementasinya	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Sasaran Program	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Reformasi Hukum	Raperda/Raperkada Kab/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Risiko Operasional	- Penyampaian draft Raperda/Raperkada belum mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan - Permohonan fasilitasi dan/atau evaluasi Raperda/Raperkada yang terlampau banyak	Uraian proses pemberian fasilitasi dan rekomendasi membutuhkan waktu lebih	Pemerintah Daerah kabupaten/kot a
20	Sasaran Program	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Capaian Pemberian Bantuan Hukum	Permasalahan / sengketa hukum yang diajukan tidak menemukan solusi	Risiko Reputasi	Tidak terselesaikannya sengketa hukum masyarakat	Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Biro Hukum	Masyarakat pengadu/ teradu
21	Sasaran Program	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Belum terpenuhinya akses masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam proses persidangan	Risiko Kemitraan	Kurangnya jumlah Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi untuk bekerjasama dengan Pemprov Jateng dalam penanganan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan	Masyarakat miskin dan kelompok rentan tidak mampu mengikuti proses persidangan	Masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya
22	Sasaran Program	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Capaian Pemberian Bantuan Hukum	Terjadinya fraud karena pengajuan permohonan pencairan biaya bantuan hukum tidak terverifikasi	Risiko Fraud	Tidak terlaksananya verifikasi permohonan pencairan bantuan hukum	Pemberian bantuan hukum tidak tepat sasaran	Masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya
23	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	Kesalahan atau penundaan kegiatan	Risiko Operasional	Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran	Pegawai Biro Hukum, PD terkait, masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Hukum	Presentase Fasilitasi HAM Daerah	Kabupaten kota tidak patuh dalam implementasi P5HAM	Risiko Kepatuhan	Tidak optimalnya pembinaan implementasi kabupaten kota peduli HAM	Kurang optimalnya kualitas pelayanan HAM di kabupaten kota	Masyarakat luas
25	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Penyusunan Perundang - Undangan	Presentase rancangan Produk Hukum Pengaturan yang dihasilkan Sesuai Kaidah Pembentukan Perundang-an	Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan	Risiko Legal	Perangkat Daerah pemrakarsa yang belum sepenuhnya memahami proses penyusunan/pembentukan Produk Hukum Penetapan yang sesuai kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan baru Pemerintah Daerah terkait implementasi Produk Hukum Daerah tertunda	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat
26	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Hukum	Presentase bantuan hukum yang tertangani	Tidak tersedianya Produk Hukum sebagai alat bukti pada saat terjadi sengketa di Pengadilan	Risiko Legal	Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum menyadari pentingnya pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum khususnya produk hukum untuk kebutuhan pelayanan informasi kepada stakeholder dan masyarakat	Potensi kalahnya Pemerintah Provinsi Jawa tengah dalam proses persidangan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Bantuan Hukum	Presentase bantuan hukum yang tertangani	Tidak terpenuhinya akses masyarakat dalam pencarian produk hukum	Risiko Legal	Terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum menyadari pentingnya pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum khususnya produk hukum untuk kebutuhan pelayanan informasi kepada stakeholder dan masyarakat	Masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen hukum yang tidak tersedia	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Masyarakat
28	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Penyusunan Perundang - Undangan	Presentase rancangan produk hukum Kabupaten/Kota yang dikaji	kabupaten/kota belum sepenuhnya memahami proses penyusunan/pembentukan produk hukum daerah sesuai kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Risiko Operasional	belum optimalnya pelaksanaan pemantauan/pembinaan terhadap produk hukum daerah kabupaten/kota	Raperda/Raperkada yang diajukan belum secara kualitas memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah	Pemerintah Daerah kabupaten/kota
29	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Penyusunan Perundang - Undangan	Meningkatnya Kualitas Database Dokumentasi Produk Hukum Daerah	Raperda/Raperkada yang dimohonkan fasilitasi masih banyak terdapat kekurangan baik terkait materi muatan maupun dasar hukum yuridisnya	Risiko Operasional	belum terdapatnya kesepahaman atas penyusunan/pembentukan produk hukum daerah serta permasalahan-permasalahan menyangkut implementasinya	tidak optimalnya implementasi dari Perda/Perkada yang sudah ditetapkan	Pemerintah Daerah kabupaten/kota
30	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	Hilangnya dokumen dan arsip di Biro Hukum	Risiko Operasional	Penyimpanan dokumen dan arsip belum baik dan benar	Terhambatnya layanan ketatausahaan di Biro Hukum	Pegawai Biro Hukum, PD terkait, masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	Penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada penyelewengan keuangan	Risiko Fraud	Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan	Kerugian keuangan daerah dan dokumen pertanggungjawaban tidak dapat diterima	Pegawai Biro Hukum, PD terkait, masyarakat
32	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	Keterlambatan dalam pemenuhan laporan atau data kepegawaian	Risiko Operasional	Kesalahan dalam pengisian data kepegawaian	Dokumen kepegawaian tidak dapat diproses ke tahapan selanjutnya	Pegawai Biro Hukum, PD terkait
33	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	Rusak dan/ atau hilangnya sarana dan prasarana perkantoran	Risiko Operasional	Lemahnya pengawasan dan penyimpanan sarana dan prasarana perkantoran	Terhambatnya layanan ketatausahaan di Biro Hukum	Pegawai Biro Hukum, PD terkait, masyarakat
34	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Hukum	Keterlambatan dalam pemenuhan laporan dan/ atau data laporan	Risiko Operasional	Tumpang tindihnya disposisi penyusunan laporan antar unit kerja	laporan tidak dapat disusun tepat waktu	PD terkait
Biro Kesejahteraan Rakyat								
35	Sasaran Program	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitas keagamaan dalam kondisi baik	Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan	Risiko Fraud	Penerima Hibah tidak memahami peraturan tentang proses penatausahaan hibah	Hibah tidak sesuai dengan peruntukan	Penerima Hibah
36	Sasaran Program	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan dasar	Tidak didaptkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Pendidikan, Sosial & Kesehatan	Risiko Operasional	1. Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang mempedomani target kinerja yg telah ditetapkan pada RKO 2. Kurang optimalnya kontrol masing-masing koordinator dalam memantau pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan	Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Sosial tidak tercapai sesuai target yg telah ditetapkan pada RKO	1. Sub Koordinator Sosial (pelaksana) 2. Koordinator Pelayanan Dasar (PPTK) 3. Kepala Biro Kesra (KPA) 4. Sekretaris Daerah (PA)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Sasaran Program	Program Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian kinerja program Kesejahteraan Rakyat bidang pelayanan non dasar	Tidak adanya informasi yang didapat terkait kebijakan maupun data yg update serta terintegrasi dengan OPD Ampuan dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Risiko Operasional	1. Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang cermat mempedomani rencana yang telah ditetapkan pada RKO 2. Kurang optimalnya dalam memantau/mengawasi pelaksanaan kegiatan. 3. Lemahnya koordinasi tugas dan fungsi Biro dengan OPD ampuan sehingga hasil Kebijakan dari Policy Brief belum bisa diimplementasikan oleh OPD ampuan	Capaian kinerja kegiatan Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak tercapai sesuai target yg telah ditetapkan pada RKO	1. 3 Sub Koordinator Bidang Non Pelayanan Dasar (pelaksana) 2. Koordinator Non Pelayanan Dasar selaku (PPTK) 3. Kepala Biro Kesra selaku (KPA) 4. Sekretaris Daerah selaku (PA)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Prosentase realisasi hibah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Terdapat usulan hibah yang tidak memenuhi standar masuk dalam DPA	Risiko Operasional	1. Sistem yang digunakan untuk inputing hibah belum dapat secara otomatis menolak berkas usulan yang tidak memenuhi standar; 2. Waktu verifikasi yang terbatas 3. Banyaknya usulan kegiatan hibah yang tidak didasari dengan data dukung yang lengkap	Hibah tidak dapat dicairkan	Penerima Hibah
39	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Prosentase realisasi hibah keagamaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Realisasi hibah pada akhir periode	Risiko Operasional	Keterlambatan pemenuhan kelengkapan administrasi hibah	Laporan realisasi pencairan hibah melebihi ketentuan	Biro Kesra
40	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar	Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar bidang Pendidikan tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	Risiko Operasional	(1) Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang cermat mempedomani rencana yang telah ditetapkan pada RKO, (2) Kurang optimalnya dalam memantau/ mengawasi pelaksanaan kegiatan	Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan (RKO)	Sub Koordinator Bidang Pendidikan (pelaksana)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar	Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar bidang Kesehatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	Risiko Operasional	(1) Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang cermat mempedomani rencana yang telah ditetapkan pada RKO, (2) Kurang optimalnya dalam memantau/ mengawasi pelaksanaan kegiatan	Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan (RKO)	Sub Koordinator Bidang Kesehatan (pelaksana)
42	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Pelayanan Dasar	Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar bidang Sosial tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	Risiko Operasional	(1) Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang cermat mempedomani rencana yang telah ditetapkan pada RKO, (2) Kurang optimalnya dalam memantau/ mengawasi pelaksanaan kegiatan	Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar Bidang Sosial tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan (RKO)	Sub Koordinator Bidang Sosial (pelaksana)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar	Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	Risiko Operasional	(1) Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang cermat mempedomani rencana yang telah ditetapkan pada RKO, (2) Kurang optimalnya dalam memantau/ mengawasi pelaksanaan kegiatan	Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan (RKO)	Sub Koordinator Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan (pelaksana)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Non Pelayanan Dasar	Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	Risiko Operasional	(1) Masing-masing pelaksana kegiatan belum/kurang cermat mempedomani rencana yang telah ditetapkan pada RKO, (2) Kurang optimalnya dalam memantau/ mengawasi pelaksanaan kegiatan	Capaian kinerja kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan (RKO)	Sub Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (pelaksana)
BIRO BUMD								
45	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Pembagian dividen yang tidak sesuai ketentuan	Risiko Fraud	Adanya intervensi politis dalam proses pembahasan dividen untuk mengarahkan hasil pembagian laba	1. Proses pembahasan menjadi tidak objektif 2. Potensi kerugian daerah	BUMD dan Pemerintah Daerah
46	Sasaran Program	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	Laporan kinerja tidak valid	Risiko Fraud	Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil	1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD 2. Keputusan yang diambil kurang tepat	BUMD dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Sasaran Program	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	Keterlambatan penyampaian laporan keuangan BUMD	Risiko Operasional	1. Proses audit yang lama 2. Keterlambatan penyusunan laporan keuangan	1. Penundaan pembahasan dividen 2. Berpengaruh pada perencanaan keuangan daerah	BUMD dan Pemerintah Daerah
48	Sasaran Program	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	Ketidakepakatan antara BUMD dan Pemda terkait besaran dividen	Risiko Operasional	Perbedaan kepentingan antara BUMD dan Pemda dalam alokasi laba	Proses pembahasan menjadi panjang dan dapat menghambat pencairan dividen	BUMD dan Pemerintah Daerah
49	Sasaran Program	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	Pemerintah Provinsi mendapatkan dividen yang lebih rendah dari periode sebelumnya	Risiko Operasional	Faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi (Inflasi, suku bunga tinggi, atau krisis ekonomi)	Berpengaruh terhadap penerimaan PAD	BUMD dan Pemerintah Daerah
50	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Keterlambatan Pengumpulan Laporan	Risiko Operasional	Laporan dari unit-unit di bawah BLUD (misal: poliklinik, instalasi rawat inap) tidak dikirim tepat waktu	Monev tidak dapat dilakukan sesuai jadwal triwulanan	Pemerintah Daerah
51	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Ketidakeengkapan Dokumen Persyaratan BLUD	Risiko Operasional	Tim penyusun tidak memahami secara detail regulasi dan persyaratan teknis BLUD	Proses penetapan BLUD tertunda atau bahkan ditola	BUMD dan Pemerintah Daerah
52	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Terdapat BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/commitment letter hasil evaluasi kinerja	Risiko Operasional	Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Jasa dan Produksi	Evaluasi Kinerja BUMD tidak memberikan nilai tambah	BUMD dan Pemerintah Daerah
53	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Terdapat BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/commitment letter hasil evaluasi kinerja	Risiko Operasional	Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Keuangan	Kinerja BUMD Keuangan tidak bertambah baik	BUMD Keuangan dan Pemerintah Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Triwulanan BUMD terlambat	Risiko Operasional	1. BUMD tidak mengisi form verifikasi dan evaluasi 2. Kurangnya koordinasi	1. Evaluasi kinerja tidak tepat waktu 2. Keterlambatan dalam pengambilan keputusan strategis	BUMD dan Pemerintah Daerah
55	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Non Keuangan	Keterlambatan penyusunan RKAP oleh BUMD	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi antara BUMD dan Pemerintah Daerah	1. RKAP tidak dapat disahkan tepat waktu 2. Menghambat operasional BUMD 3. Mengganggu perencanaan keuangan daerah	BUMD dan Pemerintah Daerah
BIRO PEREKONOMIAN								
56	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Hasil keputusan rakor tidak ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi	Risiko Operasional	Instansi memiliki Program Prioritas yang Berbeda	potensi penyimpangan atau kegagalan program tidak terdeteksi dini	Pemerintah Daerah
57	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan masih parsial	Risiko Strategis	Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika regulasi	Rekomendasi kebijakan belum mendorong ketahanan pangan di Jawa Tengah	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah 3. Swasta 4. Petani 5. Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Sasaran Program	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan perekonomian makro yang diusulkan sebagai kebijakan	Data Tidak Akurat atau Tidak Valid	Risiko Strategis	Cakupan Data yang Terbatas	Validitas data adalah fondasi utama keberhasilan monev. Tanpa data yang akurat, keputusan apa pun yang diambil untuk mengendalikan inflasi akan kehilangan pijakannya.	Pemerintah Daerah
59	Sasaran Program	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase capaian kinerja program bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2. Sinkronisasi program/kegiatan menjadi kurang efektif	Risiko Operasional	2. Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas	2. Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan kurang optimal.	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan serta Masyarakat
60	Sasaran Program	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase capaian kinerja program bidang	Rekomendasi kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi Sumber Daya Mineral menjadi parsial	Risiko Operasional	Tidak ada integrasi data Monev antar OPD	Rekomendasi tidak relevan	OPD sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral
61	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rekomendasi kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian menjadi parsial	Risiko Operasional	Tidak ada integrasi data Monev antar OPD	Rekomendasi tidak relevan	OPD sektor Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	Sasaran Program	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase capaian kinerja program bidang	Reputasi geopark menurun	Risiko Kemitraan	Pengembangan geopark tidak menjadi prioritas kegiatan.	rendahnya tingkat kunjungan wisatawan dan perekonomian wilayah sekitar geopark	OPD sektor pariwisata, Badan Pengelola Geopark, Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdapat wilayah Geopark.
63	Sasaran Program	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Pelaku usaha mengalami kendala dalam pengembangan Low Carbon Rice dan Sustainable Food	Risiko Kemitraan	evaluasi atas efektivitas hasil fasilitasi tidak mencakup seluruh objek yang diberikan fasilitas	tidak ada pengembangan low carbon rice dan suistainable food	OPD Ampuan, Stakeholder/mitra kerja terkait dan Masyarakat
64	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pengolahan dan penyajian data menjadi kurang efektif dan efisien.	Risiko Operasional	1. Keterbatasan sumber data/pengumpulan data	1. Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebijakan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat.	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan serta Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3. Gangguan/keterlambatan acara	Risiko Operasional	3. <i>Human Error</i> (Kurangnya partisipasi aktif peserta, kurangnya persiapan dan koordinasi tim panitia/peserta)	3. Kehadiran dan partisipasi peserta kurang maksimal/kendala administratif	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan serta Masyarakat
66	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Permintaan data/kegiatan prioritas di bidang penanaman modal, pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dipenuhi Kab/Kota	Risiko Operasional	1. Kurang/keterbatasan Pemkab/Pemkot atas pemahaman program/kegiatan/isu strategis/rekomendasi kebijakan prioritas	1. Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebijakan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat.	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Industri dan Perdagangan serta Masyarakat
67	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2. Belum ada sinkronisasi program/kegiatan prioritas daerah	Risiko Operasional	2. Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas/isu strategis daerah	2. Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan kurang optimal serta rekomendasi/kebijakan belum dijalankan oleh kab/Kota	
68	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Gangguan/keterlambatan acara	Risiko Operasional	1. <i>Human Error</i> (Kurangnya partisipasi aktif peserta, kurangnya persiapan dan koordinasi)	1. Kehadiran dan partisipasi peserta kurang maksimal/kendala administratif	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Pelaku Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
69	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2. Gangguan sistem/logistik/jaringan	Risiko Operasional	2. Kesalahan logistic/sistem/jaringan	2. Rapat terganggu/terlambat	Industri dan Perdagangan serta Masyarakat
70	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Pengolahan dan penyajian data menjadi kurang efektif dan efisien.	Risiko Operasional	1. Keterbatasan sumber data/pengumpulan data	1. Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebijakan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat.	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Investor, Pelaku Usaha, Pelaku Investasi, pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Masyarakat
71	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal.	2. Sinkronisasi program/kegiatan menjadi kurang efektif	Risiko Operasional	2. Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas	2. Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan kurang optimal.	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Investor, Pelaku Usaha.
72	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4. Gangguan sistem/logistik/jaringan	Risiko Operasional	4. Kesalahan logistic/sistem/jaringan	4. Acara Rakor terganggu/terlambat	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Investor, Pelaku Usaha, Pelaku Investasi, pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1, Permintaan data/kegiatan prioritas di bidang penanaman modal, pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dipenuhi Kab/Kota	Risiko Operasional	1. Kurang/keterbatasan Pemkab/Pemkot atas pemahaman program/kegiatan/isu strategis/rekomendasi kebijakan prioritas	1. Identifikasi permasalahan terhambat dan penyusunan rekomendasi/kebijakan kurang efektif, sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang kurang tepat.	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Investor, Pelaku Usaha, Pelaku Investasi, pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Masyarakat
74	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2. Belum ada sinkronisasi program/kegiatan prioritas daerah	Risiko Operasional	2. Kab/Kota dan atau OPD memiliki prioritas kebijakan/agenda lainnya atau belum mendukung program/kegiatan prioritas/isu strategis daerah	2. Pelaksanaan program/kegiatan daerah terganggu/berjalan kurang optimal serta rekomendasi/kebijakan belum dijalankan oleh kab/Kota	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Investor, Pelaku Usaha, Pelaku Investasi, pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Masyarakat
75	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Gangguan/keterlambatan acara	Risiko Operasional	1. <i>Human Error</i> (Kurangnya partisipasi aktif peserta, kurangnya persiapan dan koordinasi)	1. Kehadiran dan partisipasi peserta kurang maksimal/kendala administratif	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Investor, Pelaku Usaha, Pelaku Investasi, pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Masyarakat
76	Sasaran Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Penanaman Modal, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Gangguan sistem/logistik/jaringan	Risiko Operasional	2. Kesalahan logistic/sistem/jaringan	2. Rapat terganggu/terlambat	Pemprov Jateng, Pemkab/Pemkot, Investor, Pelaku Usaha, Pelaku Investasi, pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup	Penurunan fungsi DAS di Jawa Tengah	Risiko Operasional	Kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) menurun	Kerugian ekonomi masyarakat dan infrastruktur akibat banjir dan tanah longsor	OPD ampunan, stakeholder/mitra kerja terkait dan masyarakat
78	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup	Munculnya pola pengelolaan mangrove yang terpaku pada satu sektor	Risiko Operasional	Pengelolaan mangrove terpisah-pisah	Ekosistem mangrove tidak dapat hidup dengan optimal	OPD ampunan, stakeholder/mitra kerja terkait dan masyarakat
79	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Energi Sumber Daya Mineral	Pelaksanaan kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan rencana/target	Risiko Operasional	Menurunnya potensi manajemen energi pada sektor pemanfaatan energi	Output dari kegiatan manajemen energi tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan	Kementerian ESDM, Dinas ESDM, Pemerintah Kabupaten Kota
80	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	data kebutuhan pupuk bersubsidi tidak sesuai	Risiko Operasional	Penyaluran pupuk bersubsidi terhambat	pupuk tidak tersalurkan secara merata dan tepat sasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Pusat, provinsi, kab/kota, PT.PI • Petani, LMDH, Pembudidaya ikan
81	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	Rendahnya kualitas garam rakyat dan penurunan produktivitas dan hasil panen	Risiko Operasional	Produksi garam dan hasil budidaya perikanan darat/tambak mengalami penurunan	<ul style="list-style-type: none"> - Garam rakyat tidak terserap oleh Industri secara maksimal - Kerugian finansial bagi pembudidaya 	OPD Ampunan, Stakeholder/mitra kerja terkait dan Masyarakat
82	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tidak sesuainya kuota/alokasi BBM subsidi untuk nelayan	Risiko Operasional	Masih banyak kapal perikanan yang belum terdata	Nelayan kesulitan mendapatkan BBM pada saat akan melaut	OPD Ampunan, Stakeholder/mitra kerja terkait dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan	Rendahnya minat masyarakat pada konsumsi pangan lokal	Risiko Operasional	Adanya lahan produktif yang tidak digunakan masyarakat untuk budidaya bahan baku pangan lokal	1. Bahan Baku pangan local sangat terbatas 2. Kesulitan mendapatkan pelaku usaha pangan lokal	OPD Ampuan, Stakeholder/mitra kerja terkait dan Masyarakat
84	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan	Rendahnya penerapan fortifikasi beras	Risiko Operasional	Perencanaan berbasis data yang lemah	Fortifikasi bisa berjalan tanpa sasaran yang tepat (miskin data) dan tidak efektif menysasar kelompok membutuhkan	OPD Ampuan, Stakeholder/mitra kerja terkait dan Masyarakat
85	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	Kesenjangan penyebaran informasi dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait DBHCHT	Risiko Operasional	Keterbatasan data yang dimiliki Kab/Kota	tidak dapat mengidentifikasi permasalahan implementasi program dan memberikan rekomendasi/solusi	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Provinsi/Kab./Kota
86	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Hilangnya dokumen dan arsip di Biro Infrastruktur dan SDA	Risiko Operasional	Penyimpanan dokumen dan arsip belum baik dan benar	Terhambatnya layanan ketatausahaan di Biro Infrastruktur dan SDA	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA, OPD ampuan, K/L, stakeholder terkait, Masyarakat
87	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada penyelewengan keuangan	Risiko Fraud	Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan	Kerugian keuangan daerah dan dokumen pertanggungjawaban tidak dapat diterima	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA, OPD ampuan, K/L, stakeholder terkait, Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
88	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Keterlambatan dalam pemenuhan laporan atau data kepegawaian	Risiko Operasional	Kesalahan dalam pengisian data kepegawaian	Dokumen kepegawaian tidak dapat diproses ke tahapan selanjutnya	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA
89	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Rusak dan/ atau hilangnya sarana dan prasarana perkantoran	Risiko Operasional	Lemahnya pengawasan dan penyimpanan sarana dan prasarana perkantoran	Terhambatnya layanan ketatausahaan di Biro Hukum	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA, Biro Umum
90	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Keterlambatan dalam pemenuhan laporan dan/ atau data laporan	Risiko Operasional	Tumpang tindihnya disposisi penyusunan laporan antar unit kerja	laporan tidak dapat disusun tepat waktu	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA, OPD ampunan, K/L, stakeholder terkait, Masyarakat
91	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Rendahnya minat masyarakat pada konsumsi pangan lokal	Risiko Operasional	Adanya lahan produktif yang tidak digunakan masyarakat untuk budidaya bahan baku pangan lokal	1. Bahan Baku pangan local sangat terbatas 2. Kesulitan mendapatkan pelaku usaha pangan lokal	OPD Ampunan, Stakeholder/ mitra kerja terkait dan Masyarakat
92	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Rendahnya penerapan fortifikasi beras	Risiko Operasional	Perencanaan berbasis data yang lemah	Fortifikasi bisa berjalan tanpa sasaran yang tepat (miskin data) dan tidak efektif menysasar kelompok membutuhkan	OPD Ampunan, Stakeholder/ mitra kerja terkait dan Masyarakat

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Kesenjangan penyebaran informasi dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait DBHCHT	Risiko Operasional	Keterbatasan data yang dimiliki Kab/Kota	tidak dapat mengidentifikasi permasalahan implementasi program dan memberikan rekomendasi/solusi	1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Provinsi/Kab./Kota
94	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Hilangnya dokumen dan arsip di Biro Infrastruktur dan SDA	Risiko Operasional	Penyimpanan dokumen dan arsip belum baik dan benar	Terhambatnya layanan ketatausahaan di Biro Infrastruktur dan SDA	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA, OPD ampunan, K/L, stakeholder terkait, Masyarakat
95	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada penyelewengan keuangan	Risiko Fraud	Kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan	Kerugian keuangan daerah dan dokumen pertanggungjawaban tidak dapat diterima	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA, OPD ampunan, K/L, stakeholder terkait, Masyarakat
96	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Keterlambatan dalam pemenuhan laporan atau data kepegawaian	Risiko Operasional	Kesalahan dalam pengisian data kepegawaian	Dokumen kepegawaian tidak dapat diproses ke tahapan selanjutnya	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA
97	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Rusak dan/ atau hilangnya sarana dan prasarana perkantoran	Risiko Operasional	Lemahnya pengawasan dan penyimpanan sarana dan prasarana perkantoran	Terhambatnya layanan ketatausahaan di Biro Hukum	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA, Biro Umum

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Perekonomian	Keterlambatan dalam pemenuhan laporan dan/ atau data laporan	Risiko Operasional	Tumpang tindihnya disposisi penyusunan laporan antar unit kerja	laporan tidak dapat disusun tepat waktu	Pegawai Biro Infrastruktur dan SDA, OPD ampunan, K/L, stakeholder terkait, Masyarakat
Biro Bangda								
99	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah atau program strategis tidak tercapai	Risiko Operasional	1. Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD kurang mendukung dalam upaya pencapaian indikator kinerja 2. Kebijakan yang tidak tepat sasaran atau adanya kebijakan yang tumpang tindih antar OPD	Penilaian kinerja pemerintah daerah turun	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
100	Sasaran Program	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase Realisasi Pelaksanaan APBD dan APBN	Terdapat masalah teknis pada sistem aplikasi penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan dan anggaran yang akan di simulasikan	Risiko Operasional	Sistem aplikasi belum siap digunakan untuk kegiatan simulasi	Materi yang di sosialisasikan/ didiseminasikan tidak dapat terinformasi secara utuh atau optimal	SKPD Provinsi
101	Sasaran Program	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase realisasi bantuan keuangan	Kendala operasional dalam proses <i>updating</i> data pelaksanaan Bankeu secara manual	Risiko Operasional	Belum terfasilitasinya seluruh OPD pengelola kegiatan Bantuan Keuangan pada 35 Kabupaten/Kota	Terhambatnya penyajian data pelaksanaan kegiatan secara lengkap dan mendalam.	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	Sasaran Program	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Perangkat Daerah	Data kinerja pada <i>e-controlling</i> kinerja tidak valid	Risiko Operasional	SKPD belum melengkapi data Kinerja pada Aplikasi <i>e-Controlling</i> Kinerja	Data tidak dapat digunakan dalam analisis pengambilan kebijakan	Jawa Tengah
103	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat ketercapaian kinerja Sekretariat Daerah	Ketidakselarasan antar indikator pada dokumen perencanaan pada biro - biro lingkup Setda	Risiko Operasional	Kurang koordinasi antara pengampu perencanaan dengan pelaksana program dan kegiatan pada biro-biro lingkup Setda	Kualitas perencanaan Setda kurang baik	Biro-biro lingkup Setda
104	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Pembangunan Daerah	informasi yang disajikan tidak relevan	Risiko Reputasi	materi publikasi yang disajikan tidak sesuai dengan standar publikasi media pemerintahan	terjadi misinformasi terhadap masyarakat yang menggunakan layanan media informasi	Pengguna Media / Masyarakat
105	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Data penyusunan RKO perangkat daerah tidak lengkap	Risiko Operasional	Tata cara penyusunan RKO belum sepenuhnya dipahami oleh pelaksana di SKPD	Waktu pelaksanaan desk menjadi lebih lama/tidak optimal	SKPD Provinsi
106	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Data penyusunan RK (APBN) perangkat daerah belum sesuai/tidak lengkap	Risiko Operasional	Pagu APBN (Dekon TP) sering terjadi penyesuaian/perubahan menyesuaikan kebijakan Pusat	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan	SKPD Provinsi Jawa Tengah Pengelola Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
107	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Data RKO (APBD) perangkat daerah tidak selesai tepat waktu	Risiko Operasional	Perangkat daerah kurang melakukan koordinasi internal	RKO (APBD) sebagai bahan pengendalian menjadi tidak valid	Biro Administrasi Pembangunan Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
108	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Pelaksana kegiatan PSN tidak melaporkan progres dan hasil kegiatan secara periodik	Risiko Operasional	Pelaksana PSN di Jawa Tengah belum memahami pentingnya memberikan laporan progres dan hasil kegiatan secara periodik, kepada Pemprov Jawa Tengah.	Kesulitan dalam menyusun laporan progres pelaksanaan PSN kepada Gubernur	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
109	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Daerah	Target keuangan dan fisik RKO berubah	Risiko Operasional	Perubahan jadwal / pergeseran kegiatan dan anggaran tidak diinformasikan	Penatausahaan ikut berubah (RAK dan SPD), pengendalian kegiatan dan anggaran berpotensi tidak tepat	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
110	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Informasi paket pekerjaan yang dilaksanakan tidak lengkap dan valid	Risiko Operasional	Pelaksanaan monitoring tidak didampingi oleh personil yang membidangi dan/atau tidak disertai data dukung yang dibutuhkan	Proses monitoring menjadi tidak efektif, efisien dan optimal	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
111	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Pemerintah Kab/Kota terlambat dalam mengawali pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional	Adanya pergantian admin penyusun RKO pada OPD Kab/Kota.	Pekerjaan tidak selesai dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan	1. Pemerintah Kabupaten/Kota; 2. Penyedia.
112	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Pemerintah Kab/Kota terlambat dalam mengawali pelaksanaan kegiatan	Risiko Operasional	Adanya kepala daerah baru atau anggota dewan baru	Pekerjaan tidak selesai dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan	1. Pemerintah Provinsi; 2. Pemerintah Kabupaten/Kota.

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
113	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Keterlambatan pengiriman laporan bulanan melalui aplikasi	Risiko Operasional	Kurangnya tingkat partisipasi pengiriman laporan oleh OPD Kab/Kota	Tidak tersedianya data valid yang mencakup seluruh kegiatan sesuai progres di lapangan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
114	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Data yang dilaporkan berbeda dengan kondisi riil di lapangan	Risiko Operasional	Pelaksanaan monitoring hanya dapat berupa sampling	Hasil data untuk analisis kebijakan menjadi tidak maksimal	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
115	Sasaran Kegiatan	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan Percepatan pelaksanaan pembangunan Wilayah	Proses verifikasi capaian <i>progress</i> pelaksanaan kegiatan Bankeu terhambat	Risiko Operasional	Bagian Pembangunan Kab/Kota yang hadir dalam Rakor tidak dapat memberikan informasi kendala permasalahan dan <i>progress real time</i> di lapangan	Terhambatnya penyajian data pelaksanaan kegiatan secara lengkap dan mendalam	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
116	Sasaran Kegiatan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Data kurang lengkap dan tidak sesuai dengan kaidah pelaporan	Risiko Kepatuhan	Ketidakpatuhan user pelaporan e-controlling APBD	Laporan tidak bisa ditindaklanjuti sebagai bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
117	Sasaran Kegiatan	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Data pelaporan progres pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa tidak valid	Risiko Kepatuhan	Ketidakpatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan	Analisis pengambilan keputusan/kebijakan menjadi tidak tepat	Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
118	Sasaran Kegiatan	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan	Penyajian laporan hasil evaluasi kinerja beberapa Biro lingkup Setda belum sesuai ketentuan	Risiko Operasional	Terdapat perbedaan persepsi pada pengampu evaluasi masing-masing Biro	Laporan hasil evaluasi tidak dapat digunakan secara optimal sebagai bahan perbaikan kinerja periode berikutnya	Biro-biro lingkup Setda
119	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah	Data kepegawaian tidak valid	Risiko Operasional	Pegawai tidak melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala	Terdapat kelebihan pembayaran pada gaji (tunjangan keluarga)	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
120	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah	Berkas keuangan tidak lengkap sesuai dengan prosedur	Risiko Operasional	Perubahan sistem informasi perpajakan terkait pembuatan billing dan pelaporan bukti potong pajak	Proses revolving uang persediaan terhambat	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
121	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah	Kerusakan arsip	Risiko Operasional	Kurang memadainya sarana penyimpanan arsip fisik	Hilangnya informasi penting dan terganggunya administrasi	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
122	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah	Ketidaksesuaian pencatatan aset dengan kondisi fisik	Risiko Operasional	Perpindahan barang yang tidak sesuai prosedur dan pengelolaan yang belum efektif	Hilangnya aset	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
123	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah	Hilangnya dan atau rusaknya aset	Risiko Fraud	Ketidaksesuaian pencatatan dan pendokumentasian aset dengan kondisi fisik	aset daerah yang pencatatannya tidak sesuai, dapat digunakan untuk kepentingan pribadi	Biro Administrasi Pembangunan Daerah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah	Pimpinan tidak menghadiri / terlambat menghadiri suatu kegiatan	Risiko Reputasi	Tidak tersampainya dokumen surat pada bagian administrasi persuratan	Reputasi Biro Bangda menjadi kurang baik	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
125	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Pembangunan Daerah	Spesifikasi barang dan jasa tidak sesuai dengan yang diusulkan dalam kontrak	Risiko Kemitraan	Proses pelaksanaan kontrak yang tidak sesuai dengan rencana pengadaan	Kualitas barang jasa yang tidak sesuai dapat mengurangi efektifitas kinerja	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
BIRO APBJ								
126	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	realisasi belanja tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan barang/jasa	Risiko Strategis	Kurangnya pemahaman mengenai metode pemilihan pengadaan barang/jasa	Capaian ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan) belum maksimal	OPD Provinsi Jawa Tengah
127	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	1. Perencanaan pengadaan tidak matang 2. Data RUP tidak valid	Risiko Strategis	- Pemahaman PA/KPA/PPK OPD yang belum seragam dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang jasa - PA/KPA/PPK Kurang cermat dalam menetapkan RUP (Rencana Umum Pengadaan)	- Menghambat pelaksanaan pengadaan barang jasa - berpotensi aduan	- Pemprov Jateng - Pelaku Usaha - Masyarakat
128	Sasaran Program	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Efektivitas Pengadaan secara Elektronik	Penayangan etalase usulan OPD terlambat	Risiko Kemitraan	Dokumen Teknis yang diusulkan oleh OPD masih kurang detail	Menghambat pelaksanaan kegiatan	OPD Pengusul

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
129	Sasaran Program	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa	Pemecahan paket pengadaan	Risiko Fraud	adanya pengondisian pengadaan untuk menghindari tender	Potensi Kerugian Negara	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
130	Sasaran Program	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pendampingan Proses PBJ, Kelembagaan UKPBJ dan SDM Fungsional PPBJ	Pemenuhan dokumen MCP terlambat	Risiko Kepatuhan	Tidak ada userguide dari KPK	Nilai MCP KPK pada area PBJ turun	Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah
131	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Arsip tersebar di berbagai tempat	Risiko Operasional	kurang sarana penyimpanan arsip fisik	arsip rusak dan hilang	OPD BIRO APBJ
132	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	pencatatan aset tidak sesuai kondisi fisik aset	Risiko Operasional	perpindahan barang yang tidak sesuai prosedur, pengelolaan yang belum efektif, penggunaan aset tidak sesuai ketentuan dan adanya aset yang tidak tercatat	hilangnya aset	OPD BIRO APBJ
133	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Data kepegawaian tidak valid	Risiko Operasional	pegawai tidak melakukan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala	terdapat kelebihan pembayaran pada gaji (tunjangan keluarga)	Pegawai di Biro APBJ
134	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Pembayaran Gaji Berkala terlambat	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi antar biro (terlambat mengusulkan)	Pegawai complain/Aduan pegawai	Pegawai di Biro APBJ

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
135	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen perencanaan/evaluasi terlambat disusun	Risiko Operasional	Pengisian pada sistem (e-plan/e-cont) mendekati tenggat waktu	1. Pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda 2. Analisis pengambilan keputusan menjadi terhambat	OPD BIRO APBJ
136	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Pimpinan tidak menghadiri / terlambat menghadiri suatu kegiatan	Risiko Operasional	Informasi terlewat	Reputasi Biro APBJ menjadi kurang baik	OPD BIRO APBJ
137	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	publikasi konten tidak sesuai dengan jadwal	Risiko Operasional	keterlambatan kontributor dalam pengiriman materi publikasi	Informasi yang dipublikasi tidak up to date	OPD BIRO APBJ
138	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Spesifikasi barang dan jasa tidak sesuai dengan yang diusulkan dalam kontrak	Risiko Fraud	Adanya gratifikasi dari penyedia ke pejabat pengadaan	Barang jasa tidak dapat digunakan secara optimal	OPD BIRO APBJ
139	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Pembayaran invoice tertunda	Risiko Kemitraan	Penyedia mengirimkan invoice melebihi batas waktu yang ditentukan	Realisasi anggaran tidak sesuai dengan RKO	Penyedia Barang/Jasa
140	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Data Survey tidak valid	Risiko Operasional	Responden tidak jujur dalam mengisi kuesioner	Indeks Kepuasan Masyarakat tidak dapat dipertanggungjawabkan	OPD BIRO APBJ
141	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Adm. Pengadaan Barang dan Jasa	Tidak dapat membuat billing dan pelaporan bukti potong pajak	Risiko Operasional	Perubahan sistem informasi perpajakan	pembayaran pajak tidak sesuai dengan bulan pemotongan pajak	OPD BIRO APBJ

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Terdapat peserta Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan PBJ yang tidak hadir	Risiko Operasional	Tidak tersampainya informasi terkait Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan PBJ	Informasi tentang pengetahuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak tersampaikan dengan optimal	OPD Provinsi Jawa Tengah
143	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Pengadaan barang/jasa dengan spesifikasi dan kebutuhan yang sama tidak dilakukan secara konsolidasi	Risiko Operasional	keterbatasan pemahaman Konsolidasi di tingkat OPD	Masih ditemukan potensi kemahalan harga pada barang/jasa dengan spesifikasi yang sama	K/L/PD Khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
144	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif	Sangah / Sanggah Banding / Aduan	Risiko Kemitraan	Peserta pemilihan merasa dirugikan	Waktu pelaksanaan pekerjaan dan outputnya tertunda	OPD Provinsi Jawa Tengah
145	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa dengan metode kompetitif	Penyampaian usulan SHS yang double	Risiko Operasional	-OPD belum sepenuhnya mencermati data standar harga dalam sistem e-SHS	Perbedaan harga pada sistem SHS	OPD Provinsi Jawa Tengah
146	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Gangguan teknis pada sistem	Risiko Operasional	Tidak semua wilayah atau OPD memiliki akses yang setara terhadap teknologi atau infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pengoperasian sistem secara optimal.	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
147	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Overload pada jaringan	Risiko Operasional	Banyaknya pengguna yang mengakses internet di satu jaringan.	Penurunan kecepatan akses dan ketidakstabilan koneksi.	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Pelaku Usaha terkendala mendaftar SPSE.	Risiko Operasional	Kendala pendaftaran akun SPSE: - Pelaku Usaha sudah pernah mendaftarkan usahanya di LPSE lain namun belum pernah login ke LPSE Provinsi Jawa Tengah, sehingga LPSE Jawa Tengah tidak bisa melihat record datanya. - Pelaku Usaha salah memilih lokasi verifikasi akun SPSE - Pelaku Usaha tidak melanjutkan proses verifikasi dalam jangka waktu lama, sehingga lupa user ID dan password yang didaftarkan.	Mengakibatkan duplikasi akun perusahaan, sehingga berdampak pada permasalahan manajemen data SiKAP.	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
149	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Pelaku Pengadaan terkendala dalam proses pendaftaran Katalog Elektronik V6 (akun inaproc).	Risiko Operasional	Kendala pendaftaran akun Inaproc: - Pelaku Pengadaan gagal verifikasi Profil - Pelaku Pengadaan gagal verifikasi Manajemen Akses - Pelaku Usaha gagal verifikasi Privy - PPK terkendala TTE	Terkendalanya proses pendaftaran akun Inaproc dan proses pengadaan tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
150	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Proses Pengadaan Tertunda	Risiko Operasional	Perbedaan waktu penyelesaian permasalahan dan menunggu penanganan dari pihak terkait.	Target pengadaan tidak tercapai	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
151	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Koneksi internet yang tidak stabil.	Risiko Operasional	- Gangguan server atau infrastruktur jaringan	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
152	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Realisasi PBJ OPD tidak terbaca	Risiko Operasional	Data tidak diisi secara lengkap.	Capaian realisasi PBJ OPD rendah	Pelaku PBJ dan OPD
153	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Terhambatnya proses PBJ yang masuk dalam Proyek Strategis Daerah	Risiko Operasional	Efisiensi anggaran	Pembangunan tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat	OPD Pengampu Proyek Strategis Daerah
154	Sasaran Kegiatan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Terdapat aduan dari masyarakat terkait pelayanan pengadaan barang/jasa kepada APH	Risiko Kepatuhan	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses pengaduan pengadaan barang/jasa	Adanya permintaan pemberian keterangan dari APH kepada Pegawai Biro APBJ	SDM Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah
155	Sasaran Kegiatan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Materi tidak tersampaikan kepada pegawai Biro APBJ secara menyeluruh	Risiko Kepatuhan	Tidak semua pegawai hadir saat pelaksanaan sosialisasi	- Informasi mengenai kebijakan pengendalian gratifikasi, aduan internal, benturan kepentingan, alur/SOP tidak tersampaikan dengan baik	SDM Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
156	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pelaku Usaha terkendala mendaftar marketplace dalam Blangkon Jateng.	Risiko Operasional	Kendala pendaftaran akun marketplace dalam Blangkon Jateng: - Tidak semua Pelaku Usaha khususnya UMKK dapat mengoperasikan aplikasi dengan baik.	Terkendalanya proses pendaftaran dan proses pengadaan tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
157	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Koneksi internet peserta tidak stabil	Risiko Operasional	Untuk pelatihan online, banyak pengguna mungkin tidak memiliki akses internet yang stabil atau perangkat yang memadai untuk mengikuti pelatihan secara virtual.	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
158	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Integrasi Antar Sistem mengalami kendala	Risiko Operasional	Beberapa sistem tidak menyediakan API (Application Programming Interface) yang memadai	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
159	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Resistensi/penolakan penggunaan sistem baru	Risiko Kepatuhan	Pengguna yang sudah terbiasa dengan cara manual atau sistem lama yang mereka anggap lebih mudah dan sudah terbiasa	Menghambat kelancaran pelaksanaan pengadaan	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	-Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indikator Kematangan UKPBJ) Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan target -Terhambatnya capaian UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah menjadi level 3 (proaktif)	Risiko Kepatuhan	Banyaknya bukti dukung yang harus dipenuhi sedangkan personil yang dimiliki terbatas	-Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) kurang maksimal -UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah tidak mencapai tingkat kematangan level 3 (proaktif)	UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah
161	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Pengoperasian sistem aplikasi terkendala	Risiko Operasional	Terdapat beragam tingkat pemahaman dan keahlian pengguna yang dilatih, mulai dari yang sangat berpengalaman hingga yang minim pengetahuan tentang teknologi.	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
162	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Resistensi/penolakan penggunaan sistem baru	Risiko Kepatuhan	Beberapa pengguna merasa tidak nyaman atau ragu untuk beradaptasi dengan sistem baru, meskipun pelatihan sudah dilakukan.	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
163	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Keterbatasan dalam penyusunan standarisasi LPSE di masing-masing UKPBJ.	Risiko Operasional	Tingkat kesiapan infrastruktur teknologi yang berbeda	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
164	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Sistem yang dikembangkan belum dapat memfasilitasi kebutuhan masing-masing UKPBJ secara spesifik.	Risiko Operasional	Setiap daerah atau kabupaten/kota memiliki regulasi dan kebijakan daerah yang mungkin berbeda dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ dan SKPD pada kabupaten/kota
165	Sasaran Kegiatan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Tidak semua SDM PBJ mengikuti kegiatan Peningkatan Kualitas SDM PBJ	Risiko Operasional	Kesibukan pekerjaan yang padat pada PA/KPA yang merangkap sebagai PPKom	Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan PBJ kurang maksimal	OPD
166	Sasaran Kegiatan	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ) tidak sesuai dengan target	Risiko Kepatuhan	Minimnya minat perpindahan dari Jabatan Lain ke JF PPBJ, karena resiko lebih besar daripada kesejahteraan yang didapat	Penilaian Reformasi Birokrasi (RB) kurang maksimal	Provinsi Jateng
167	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Terhambatnya capaian UKPBJ Provinsi Jawa Tengah menjadi PKPBJ	Risiko Kepatuhan	Kekurangan/revisi pemenuhan bukti dukung oleh UKPBJ Kab/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang belum mencapai tingkat kematangan level 3 (proaktif) belum semua di approve oleh LKPP	UKPBJ Provinsi Jawa Tengah tidak mencapai tingkat kematangan level 4 (strategis)	Biro APBJ

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
168	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Tidak terpenuhinya target peserta Rakor UKPBJ	Risiko Operasional	Waktu penyampaian undangan kepada UKPBJ Kab/Kota terlalu singkat	Informasi tentang pembahasan permasalahan beserta solusi pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak maksimal tersampaikan kepada target peserta	Biro APBJ dan UKPBJ Kab/kota
169	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa	Ketidaksesuaian antara sistem pengadaan elektronik dengan standar atau kebijakan yang ada di masing-masing OPD	Risiko Operasional	Pengadaan barang dan jasa di berbagai OPD memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dan spesifik, yang mungkin tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh satu sistem pengadaan elektronik yang standar.	Kebingungan pengguna dalam mengimplementasikan sistem.	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
170	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Sistem yang dikembangkan belum dapat memfasilitasi kebutuhan masing-masing UKPBJ secara spesifik.	Risiko Operasional	Setiap daerah atau kabupaten/kota memiliki regulasi dan kebijakan daerah yang mungkin berbeda dengan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ dan SKPD pada kabupaten/kota
171	Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Perbedaan pemahaman informasi	Risiko Operasional	Tingkat literasi yang berbeda	Proses Pengadaan Tertunda	Pelaku PBJ (penyedia, Satker prov Jateng, BUMD, Instansi terkait)
Biro Organisasi								

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Konsep kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku	Risiko Strategis	Perubahan regulasi belum tersosialisasi	Pemberian TPP tidak tepat sasaran	Tim TPP, Seluruh OPD
173	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan	Risiko Strategis	Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat	Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan	Pemerintah Kab/Kota
174	Sasaran Strategis	Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Proses pembangunan ZI tidak berjalan	Risiko Strategis	Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI	Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik	OPD, Masyarakat, Pemprov (Pemilik Risiko: Biro Organisasi)
175	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan manajemen perubahan	Risiko Kepatuhan	RB masih dianggap beban administrasi dan belum dipahami secara utuh	Nilai RB tidak meningkat, pelayanan publik stagnan	OPD, Pemprov, Masyarakat
176	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi BB	Kab/Kota tidak melaksanakan RB secara substansial	Risiko Kepatuhan	Rendahnya minat Kab/Kota terhadap perubahan RB Tematik/General	Kualitas birokrasi Kab/Kota tidak meningkat, ketimpangan pelayanan	Pemkab/Kota, Masyarakat, Pemprov
177	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan	Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-pemerintah	Risiko Fraud	Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Kerugian finansial perangkat daerah	Biro Organisasi
178	Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Konflik dengan pihak lain	Risiko Legal	Terdapat aset daerah yang masih dikuasai pihak lain	Operasional aktivitas dapat terganggu	Biro Organisasi

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	Layanan kepegawaian terlambat atau tidak tepat	Risiko Kemitraan	Tidak ada integrasi sistem dan keterlambatan koordinasi dengan BKD/BKN	Hak ASN terganggu (kenaikan pangkat/gaji), turunnya motivasi kerja	ASN Setda, Pemprov (Pemilik Risiko: Bagian Umum/Kepegawaian)
180	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai prosedur	Risiko Operasional	Sistem kerja tidak terdokumentasi atau tidak dipahami	Ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya	OPD, ASN
181	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	Jam Kerja tidak dipatuhi	Risiko Kepatuhan	ASN tidak disiplin masuk kerja dan pulang lebih awal	Produktivitas rendah, pelayanan terganggu	OPD, ASN, Masyarakat
182	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Jumlah UPT yang memperoleh nilai IPP Mandiri A - (Sangat Baik) dan A (Prima) dibagi jumlah UPT dikali 100 %	Pelayanan dan pelaksanaan tugas tidak seragam	Risiko Strategis	SOP tidak disusun secara lengkap dan sesuai	Kinerja organisasi tidak terstandarisasi	OPD, ASN
183	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Jumlah UPT yang memperoleh nilai IPP Mandiri A - (Sangat Baik) dan A (Prima) dibagi jumlah UPT dikali 100 %	SP tidak diterapkan di UPP	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman dan komitmen terhadap standar	Masyarakat tidak mendapat pelayanan yang pasti	OPD/UPT/Cabdin/Satuan Pendidikan
184	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	Peta proses bisnis tidak digunakan sebagai acuan	Risiko Operasional	Tidak ada tindak lanjut atas hasil fasilitasi	Kegiatan tidak efektif dan tumpang tindih tugas	OPD, Kab/Kota
185	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	Pembentukan UPTD tidak sesuai regulasi	Risiko Kepatuhan	Kebutuhan dan urgensi UPTD tidak diidentifikasi	Pelayanan publik terganggu	Pemerintah Kab/Kota
186	Sasaran Program	Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang Skor Kematangan Organisasinya dalam kategori tinggi	Penilaian tingkat kematangan organisasi tidak dilakukan	Risiko Reputasi	Data dukung tidak lengkap atau tidak valid	Kualitas kelembagaan tidak terukur	Pemerintah Kab/Kota

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
187	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan	Evaluasi jabatan tidak dilakukan	Risiko Operasional	Kesulitan penyusunan data dukung	Penetapan kelas jabatan tidak valid	OPD, Kab/Kota
188	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan	Pendampingan dan pelaksanaan analisis jabatan tidak dilakukan	Risiko Operasional	OPD tidak responsif	Penataan jabatan tidak sesuai kebutuhan	OPD, Kab/Kota, Pemprov
189	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Informasi jabatan tidak tersusun	Risiko Operasional	Pemahaman OPD tidak merata	Pengelolaan manajemen ASN tidak akurat	OPD, Kab/Kota
190	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Dokumen ABK tidak tersusun	Risiko Operasional	Data beban kerja tidak tersedia	Perhitungan kebutuhan pegawai tidak valid	OPD, Kab/Kota
191	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi antar OPD	Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi	OPD, Kab/Kota
192	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi	Dokumen tidak tersusun sesuai pedoman atau tidak dimanfaatkan	Risiko Operasional	Tidak adanya pemahaman teknis penyusunan oleh OPD	Akuntabilitas kinerja rendah, capaian SAKIP tidak meningkat	OPD, Pemprov
193	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	Pegawai mengikuti pelatihan yang tidak relevan	Risiko Operasional	Tidak ada perencanaan pengembangan SDM berbasis kebutuhan riil	Kompetensi ASN tidak meningkat, kinerja individu tidak optimal	ASN Setda, Pemprov
194	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	TND tidak dilaksanakan secara seragam	Risiko Operasional	Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap regulasi TND	Administrasi pemerintahan tidak tertib	OPD, Kab/Kota (Pemilik Risiko: Biro Organisasi)

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	ASN tidak mematuhi ketentuan pakaian dinas	Risiko Kepatuhan	Kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran	Citra ASN dan wibawa instansi menurun	OPD, ASN (Pemilik Risiko: Biro Organisasi)
196	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Tatalaksana Pemerintahan	Data evaluasi tidak lengkap atau salah input	Risiko Operasional	Kurangnya SDM memahami instrumen evaluasi	Nilai SPBE rendah, tidak mencerminkan kondisi riil	OPD, Pemprov
197	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Penilaian tidak mencerminkan kinerja pelayanan	Risiko Operasional	Tidak ada data dukung atau tidak valid	Upaya perbaikan tidak tepat sasaran	OPD/UPT, Pemprov
198	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Data SKM tidak mencerminkan persepsi publik	Risiko Operasional	Pengisian survei tidak dilakukan atau tidak objektif	Perbaikan layanan tidak akurat	OPD, UPP, Masyarakat
199	Sasaran Program	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Penilaian kepatuhan rendah	Risiko Reputasi	Tidak tersedia dokumen pendukung atau sarpras	Citra dan kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun	OPD, ORI, Masyarakat
200	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Penilaian kepatuhan rendah	Risiko Operasional	Tidak dilakukan pembaruan atau tindak lanjut atas inovasi	Mutu layanan tidak berkembang	OPD, Pemprov, Masyarakat
201	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Penilaian kepatuhan rendah	Risiko Operasional	Proposal tidak memenuhi standar penilaian pusat	Jawa Tengah tidak terlihat sebagai wilayah inovatif	UPP, Pemprov
202	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan	Risiko Operasional	Rendahnya komitmen Pemda Kab/Kota terhadap kebijakan Pemprov	Disparitas kualitas pelayanan antar daerah	Kab/Kota, Masyarakat, Pemprov

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
203	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Perubahan jadwal perencanaan dan evaluasi	Risiko Operasional	Perubahan regulasi	Dokumen perencanaan dan evaluasi tidak selesai tepat waktu	Biro Organisasi
204	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Terdapat salah input anggaran dalam sistem	Risiko Operasional	Ketidacermatan pegawai	Penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	Biro Organisasi
205	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Rencana kerja yang disusun tidak sesuai regulasi yang berlaku	Risiko Kepatuhan	Pegawai tidak memperbarui dan/atau memahami regulasi terbaru	Potensi temuan saat pengawasan	Biro Organisasi
206	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Capaian kinerja tidak berdasarkan data yang andal	Risiko Operasional	Tidak ada rekapitulasi data hasil rekomendasi yang dibuat	Kinerja menjadi tidak jelas	Biro Organisasi
207	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Terdapat barang milik daerah yang tidak terdata	Risiko Operasional	Kurangnya pencatatan dan pengawasan barang	Kehilangan barang	Biro Organisasi
208	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Tamu tidak terfasilitasi dengan layak	Risiko Operasional	Ketidakterediaan bahan logistik	Penurunan reputasi perangkat daerah	Biro Organisasi
209	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Barang milik daerah mengalami kerusakan	Risiko Operasional	Tidak adanya jadwal pemeliharaan yang terstruktur untuk seluruh BMD	Anggaran meningkat akibat biaya perbaikan mendadak	Biro Organisasi
210	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Barang menjadi tidak dapat digunakan	Risiko Operasional	Pemeliharaan hanya dilakukan ketika barang sudah rusak berat	Efektivitas kerja perangkat daerah menurun	Biro Organisasi

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Barang digunakan tanpa izin untuk keperluan di luar instansi	Risiko Fraud	Penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Kerugian finansial dan penyalahgunaan aset daerah	Biro Organisasi
212	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat sebagai sudah diperbaiki	Risiko Fraud	Pemalsuan laporan pemeliharaan barang	Kerugian keuangan	Biro Organisasi
Biro Umum								
213	Sasaran Program	Prgram Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Kesalahan penyusunan sambutan, keynote speech, dan makalah pimpinan.	Risiko Reputasi	Adanya kesalahan sumber data yang diperoleh.	Menurunkan reputasi pimpinan	Kepala Biro Umum
214	Sasaran Program	Prgram Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	Terjadinya kerusakan BMD	Risiko Operasional	Kelalaian pengguna BMD	Menghambat kegiatan operasional	Kepala Biro Umum
215	Sasaran Program	Prgram Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Humas dan Protokol	Editing narasi berita pimda terhambat	Risiko Kemitraan	Kurangnya pemenuhan data dari OPD teknis	Sebagian kegiatan/ statement pimpinan tidak jadi tayang di media	Kepala Biro Umum

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
216	Sasaran Program	Prgram Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Tidak dapat memenuhi kebutuhan pimpinan yang mendadak	Risiko Operasional	Agenda Pimpinan yang Dinamis yang memerlukan kebutuhan yang mendadak	Terdapat keluhan dari pimpinan	Kepala Biro Umum
217	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian Humas dan Protokol	Perolehan materi dan bahan publikasi terbatas	Risiko Operasional	Beberapa lokasi peliputan memerlukan perizinan khusus	Tidak dapat menyajikan publikasi pada lokasi tersebut	Ketua Pokja Liputan dan Dokumentasi
218	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan materi dan fasilitasi komunikasi pimpinan yang disediakan Bagian Humas dan Protokol	Produksi Konten media sosial PPID terlambat	Risiko Operasional	PIC PPID tidak mengirimkan data dan informasi untuk bahan konten media sosial PPID	Penyebaran data dan informasi melalui media sosial tidak berjalan dengan baik	Ketua Pokja Liputan dan Dokumentasi
219	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Humas dan Protokol	Adanya keterlambatan dalam penyampaian bahan bacaan ke pimpinan	Risiko Operasional	Pengiriman bahan bacaan dari penyedia terlambat	Pimpinan tidak mendapatkan informasi terkini via media cetak	Ketua Pokja Publikasi dan Hubungan Media
220	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Teknis pelaksanaan acara berubah	Risiko Operasional	Dinamika atau perubahan kegiatan Pimpinan yang tinggi	Fasilitasi keprotokolan dan Acara yang dihadiri Pimpinan Daerah dapat berjalan tidak sesuai dengan rencana awal	Kepala Sub Bagian Protokol

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Tidak dapat memfasilitasi permohonan pengawalan yang diajukan	Risiko Operasional	Terbatasnya Ketersediaan Petugas Pengawalan pada saat event besar/tertentu	Adanya komplain dari instansi pemohon dikarenakan permintaan tidak dapat dipenuhi, atau dapat dipenuhi namun tidak sesuai.	Kepala Sub Bagian Protokol
222	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan fasilitasi keprotokolan yang disusun	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan	Risiko Kemitraan	Tingginya intensitas pelayanan terhadap kegiatan pimpinan	Kurang optimalnya koordinasi dan sinkronisasi keprotokolan Kabupaten/Kota dan Provinsi	Kepala Sub Bagian Protokol
223	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Keterlambatan Pengadaan Pakaian	Risiko Operasional	Harga standarisasi untuk pengadaan dibawah tarif yang dipatok oleh Pimpinan	Pakaian Dinas Tidak Dapat digunakan oleh Pimpinan pada saat dibutuhkan	Kepala Sub Bagian TU dan RT Gubernur
224	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Tertundanya Medical Check Up rutin Pimpinan	Risiko Operasional	Agenda Pimpinan yang Padat	Terganggu-nya Monitoring kesehatan pimpinan	
225	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Persentase layanan fasilitasi kerumahtangaan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	Tidak dapat memenuhi kebutuhan pimpinan yang mendadak	Risiko Operasional	Agenda Pimpinan yang Dinamis yang memerlukan kebutuhan yang mendadak	Terdapat keluhan dari pimpinan	Kepala Sub Bagian TU dan RT Gubernur

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
226	Sasaran Kegiatan	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase layanan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah yang dipenuhi sesuai kebutuhan	Pimpinan tidak dapat menerima tamu	Risiko Reputasi	Tamu datang tanpa konfirmasi/koordinasi dan jadwalnya bersamaan dengan agenda lain pimpinan	Menurunkan reputasi pimpinan	Kepala Bagian TU dan RT Pimpinan
227	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Hilangnya arsip inaktif	Risiko Fraud	Kesengajaan menghilangkan / merusak arsip vital oleh arsiparis untuk mendapatkan imbalan	Hilangnya Informasi Penting	Kepala Bagian TU dan RT Pimpinan
228	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	kehilangan atau salah alamat surat	Risiko Operasional	Kesalahan Input data surat masuk	Informasi tidak sampai ke tujuan	Kepala Bagian TU dan RT Pimpinan
229	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	Tertundanya Pencairan dana Pimpinan	Risiko Operasional	Berkas pencairan dana penunjang pimpinan tertunda untuk ditandatangani oleh Pimpinan	Terdapat keluhan dari pimpinan	Kepala Bagian TU dan RT Pimpinan
230	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipenuhi sesuai standar pada Bagian Rumah Tangga Setda	Penyesuaian data Pimpinan Baru	Risiko Operasional	Pergantian/Transisi Pimpinan Baru	Tertundanya pembayaran gaji Pimpinan	Kepala Bagian RT SETDA

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
231	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian TU dan Rumah Tangga Pimpinan	Tidak akuratnya Laporan Barang persediaan	Risiko Operasional	Kurang tertibnya penginputan data Barang persediaan pada aplikasi SIM Aset	Laporan Barang persediaan pada akhir periode tidak sesuai	Kepala Bagian RT SETDA
232	Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Tertundanya pembelian barang yang sesuai spesifikasi yang dibutuhkan	Risiko Operasional	Pembelian barang menunggu reuiu TKDN dari Inspektorat	Belum tersedianya Barang ketika diperlukan	Kepala Bagian RT SETDA
233	Sasaran Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan	Risiko Operasional	Penyedia jasa tidak memenuhi standart spesifikasi yang dibutuhkan	Barang tidak dapat dipakai secara maksimal	Kepala Bagian RT SETDA
234	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Terjadi lebih bayar tunjangan keluarga ASN	Risiko Operasional	Rendahnya kesadaran ASN dalam memperbarui data tunjangan keluarga	Temuan pemeriksa	Kepala Bagian RT SETDA
235	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Adanya Revisi SK Pengelola Keuangan	Risiko Operasional	Adanya mutasi/rotasi ASN pengelola keuangan (PA, KPA, PPK, PPTK, Pejabat Penggadaan, Pengelola Barang dan Pengelola Keuangan)	Honor pengelola keuangan tidak diterima tepat waktu	Kepala Bagian RT SETDA
236	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Dokumen SPJ keuangan tidak lengkap	Risiko Operasional	Pelaksana kegiatan kurang memahami ketentuan administrasi kelengkapan dokumen SPJ	Proses pembayaran terhambat	Kepala Bagian RT SETDA

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
237	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Kesalahan dalam menyusun jurnal penyesuaian laporan keuangan	Risiko Operasional	Kurangnya ketelitian dalam menyusun jurnal penyesuaian laporan keuangan	Laporan keuangan yang disusun belum sesuai dengan ketentuan	Kepala Bagian RT SETDA
238	Sasaran Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	Bukti Dokumen Perjalanan Dinas tidak sesuai ketentuan	Risiko Operasional	Pelaksana kegiatan kurang memahami ketentuan dalam SHS (Standat Harga Satuan)	Proses pembayaran terhambat	Kepala Bagian RT SETDA
239	Sasaran Kegiatan	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis laporan pelaksanaan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah	Penyewa tidak jadi menggunakan aset	Risiko Operasional	Jadwal benturan.	Target retribusi tidak tercapai.	Kepala Bagian RT SETDA
240	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Ruangan kurang bersih dan rapi	Risiko Operasional	Petugas kebersihan tidak maksimal dalam membersihkan ruangan	Suasana kerja kurang nyaman	Kepala Bagian RT SETDA
241	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Kerusakan instalasi listrik	Risiko Operasional	Usia pakai instalasi sudah lama	Terganggu-nya kegiatan kantor	Kepala Bagian RT SETDA
242	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang tidak dapat dipenuhi	Risiko Operasional	Permintaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor terlalu banyak dan/atau mendadak	Kegiatan pelayanan tidak maksimal	Kepala Bagian RT SETDA
243	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Peralatan rumah tangga tidak dapat digunakan	Risiko Operasional	Kurangnya perawatan peralatan rumah tangga	Terjadinya kendala dalam pelaksanaan kegiatan	Kepala Bagian RT SETDA

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
244	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	Terjadinya kendala dalam penanganan pertolongan pertama pada pasien	Risiko Operasional	Penyediaan bahan logistik obat-obatan dan fasilitas kesehatan terbatas	Pelayanan kesehatan kurang maksimal	Kepala Bagian RT SETDA
245	Sasaran Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Bagian Rumah Tangga Setda	Persiapan fasilitas kunjungan tamu tidak berjalan dengan lancar	Risiko Operasional	Agenda pimpinan berubah	Pelayanan kunjungan tamu tidak maksimal	Kepala Bagian RT SETDA
246	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kenyamanan mobil dinas berkurang	Risiko Operasional	Jadwal pimpinan yang padat	Jadwal servis mobil tertunda	Kepala Bagian RT SETDA
247	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kendaraan dinas tidak dapat beroperasi dengan baik	Risiko Operasional	Kurangnya koordinasi antara pemegang kendaraan dengan koordinator servis kendaraan	Pelaksanaan kegiatan terhambat	Kepala Bagian RT SETDA
248	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terjadi kerusakan pada mebel	Risiko Operasional	Penggunaan mebel relatif tinggi	Penurunan nilai fungsi barang mebel	Kepala Bagian RT SETDA
249	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terjadi kerusakan peralatan kantor	Risiko Operasional	Pemakaian Berlebihan	Kurangnya kenyamanan kerja, Pelayanan kerja tidak maksimal	Kepala Bagian RT SETDA

No	Jenis Konteks Risiko	Tujuan/Sasaran/Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko	Kategori Risiko	Sebab	Dampak	
							Uraian	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	Sasaran Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disusun Bagian Rumah Tangga Setda	Keterlambatan pembayaran pada akhir tahun menunggu anggaran perubahan	Risiko Operasional	Kenaikan tarif / pembayaran	Mendapat teguran dari penyedia layanan	Kepala Bagian RT SETDA
251	Sasaran Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Terjadinya kerusakan gedung kantor dan bangunan lainnya	Risiko Operasional	Masa Pakai Usia Gedung yang menyusut	Membahayakan pengguna gedung, tidak nyaman untuk ditempati	Kepala Bagian RT SETDA

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama									
MoU tidak terlaksana	4	4	16	Ada	1. Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah daerah yang akan mekaskanakan kerjasama.	Memadai	3	4	12
Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan	4	5	20	Ada	1. Konsultasi publik ulang 2. Pendekatan persuasif kepada masyarakat yang terkena	Memadai	4	4	16
Gagal tercapainya kesepakatan batas	4	5	20	Ada	1. Sosialisasi Permendagri 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah 2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah pusat dan Kab/Kota	Memadai	4	4	16
Dokumen LPPD tidak dapat disusun tepat waktu	4	3	12	Ada	1. Sosialisasi Juknis terkait indikator kinerja kunci pada Kab/Kota dan OPD Provinsi	Memadai	3	3	9
Terlambatnya penyusunan atau revisi naskah kerja sama	4	4	16	Ada	1. Koordinasi dengan OPD Provinsi dan Kab/Kota terkait manfaat kerjasama luar negeri	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Usulan pengesahan DPRD tidak sesuai prosedur	3	3	9	Ada	1. Koordinasi dengan Sekretariat Dewan dan KPU terkait PAW	Memadai	2	3	6
Daerah tidak dapat memenuhi target SPM	3	3	9	Ada	1. Sosialisasi terkait PP no. 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri 59 th 2021 tentang Penerapan SPM	Memadai	2	3	6
Ketidakpatuhan terhadap peraturan atau kegagalan dalam menjalankan kontrak kerjasama	3	4	12	Ada	1. Sosialisasi regulasi Permendagri no. 25 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di Luar Negeri dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri 2. Sosialisasi regulasi Permendagri no. 22 tahun 2020 tentang tata cara teknis kerjasama daerah dengan daerah lain dan tata cara teknis kerjasama daerah dengan pihak ketiga.	Memadai	3	3	9
Pelaksanaan kerjasama luar negeri kurang maksimal	3	3	9	Ada	1. Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kab/Kota	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Evaluas pelaksanaan kerjasama tidak dapat dilakukan	3	3	9	Ada	1. Pelaksanaan monev kerjasama lingkup Provinsi Jawa Tengah	Memadai	3	2	6
Masyarakat merasa memiliki tanah negara atau tanah aset milik pemerintah	3	4	12	Ada	1. Pendekatan persuasif kepada masyarakat yang menguasai aset	Memadai	3	3	9
Target sertifikasi tanah tidak tercapai	3	3	9	Ada	1. Sosialisasi terkait PTSL Kab/Kota dengan masyarakat	Memadai	2	3	6
Gangguan ketertiban di kantor Gubernur	4	3	12	Ada	1. Pendekatan persuasif kepada koordinator lapangan unjuk rasa	Memadai	3	3	9
Keterlambatan LKPJ	4	3	12	Ada	1. Konsinyering dengan OPD	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Nama rupabumi tidak terbakukan	3	3	9	Ada	1. Sosialisasi Permendagri no. 2 th 2021 tentang penyelenggaraan nama rupabumi 2. Sosialisasi Peraturan Badan Informasi Geospasial no. 6 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Permendagri 2 th 2021 3. Pemberian Pembinaan teknis input data nama rupabumi melalui aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi) 4. Pemberian rekomendasi usulan nama rupabumi dari Kab/Kota.	Memadai	3	2	6
Biro Hukum									
Kegagalan dalam fasilitasi penyelesaian perkara di pengadilan karena kelemahan dalam pembuktian	3	5	15	Ada	Meningkatkan upaya pendokumentasian dalam administrasi pemerintahan	Memadai	2	5	10

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan	2	5	10	Ada	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul rancangan produk hukum daerah	Memadai	1	5	5
produk hukum daerah yang disusun tumpang tindih dan ketidakefektifan dalam pelaksanaannya	4	1	4	Ada	melakukan sosialisasipelaksanaan analisis dan evaluasi produk hukum	Memadai	3	1	3
Raperda/Raperkada Kab/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	4	3	12	Ada	Melakukan koordinasi dengan Pemkab/Pemkot	Memadai	2	3	6
Permasalahan / sengketa hukum yang diadukan tidak menemukan solusi	2	3	6	Ada	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya	Memadai	1	3	3
Belum terpenuhinya akses masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam proses persidangan	3	4	12	Ada	Koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Jateng untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan di Jateng	Memadai	2	4	8

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Terjadinya fraud karena pengajuan permohonan pencairan biaya bantuan hukum tidak terverifikasi	2	4	8	Ada	- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan LBH - Meningkatkan jumlah LBH yang bekerjasama dengan PemProv	Memadai	1	3	3
Kesalahan atau penundaan kegiatan	3	5	15	Ada	Meningkatkan dokumentasi dan pencatatan dokumen secara lengkap,	Memadai	2	5	10
Kabupaten kota tidak patuh dalam implementasi P5HAM	3	4	12	Ada	meningkatkan upaya pembinaan HAM di Kabupaten/Kota	Memadai	1	4	4
Target Penyelesaian Penyusunan Produk Hukum Daerah mundur dari waktu yang telah ditetapkan	2	5	5	Ada	Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah pengusul rancangan produk hukum daerah	Memadai	1	5	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Tidak tersedianya Produk Hukum sebagai alat bukti pada saat terjadi sengketa di Pengadilan	3	1	3	Ada	Melakukan sosialisasi kepada OPD terkait dengan pentingnya pendokumentasian dokumen hukum sebagai alat bukti, menyusun SOP pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum	Memadai	2	1	2
Tidak terpenuhinya akses masyarakat dalam pencarian produk hukum	4	1	4	Ada	Melakukan sosialisasi kepada OPD terkait dengan pentingnya pendokumentasian dokumen hukum sebagai alat bukti, menyusun SOP pendokumentasian dan penginformasian dokumen hukum	Memadai	3	1	3
kabupaten/kota belum sepenuhnya memahami proses penyusunan/pembentukan produk hukum daerah sesuai kaidah dan ketentuan peraturan perundang-undangan	4	3	12	Ada	Melakukan koordinasi dengan Pemkab/Pemkot	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Raperda/Raperkada yang dimohonkan fasilitasi masih banyak terdapat kekurangan baik terkait materi muatan maupun dasar hukum yuridisnya	4	3	12	Ada	Melakukan koordinasi dengan Pemkab/Pemkot	Memadai	2	3	6
Hilangnya dokumen dan arsip di Biro Hukum	3	4	12	Ada	Meningkatkan pengawasan di area penyimpanan dokumen untuk mencegah akses yang tidak sah	Memadai	2	4	8
Penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada penyelewengan keuangan	2	4	8	Ada	Pembatasan kewenangan dan akses dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan	Memadai	1	4	4
Keterlambatan dalam pemenuhan laporan atau data kepegawaian	2	4	8	Ada	Meningkatkan kepatuhan pelaporan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan	Memadai	1	4	4
Rusak dan/ atau hilangnya sarana dan prasarana perkantoran	2	5	10	Ada	Meningkatkan kepatuhan pelaporan penatausahaan barang milik daerah	Memadai	1	5	5

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Keterlambatan dalam pemenuhan laporan dan/ atau data laporan	3	4	12	Ada	Meningkatkan dokumentasi dan pencatatan dokumen secara lengkap,	Memadai	2	4	8
Biro Kesejahteraan Rakyat									
Pelaksanaan hibah yang tidak sesuai usulan	2	4	8	Ada	1. Sosialisasi peraturan pelaksanaan hibah 2. Monitoring evaluasi pelaksanaan hibah	Memadai	2	3	6
Tidak didapatkannya data & info yg relevan serta terintegrasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Pendidikan, Sosial & Kesehatan	3	4	12	Ada		Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Tidak adanya informasi yang didapat terkait kebijakan maupun data yg update serta terintegrasi dengan OPD Ampuan dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	4	12	Ada		Memadai	3	3	9
Terdapat usulan hibah yang tidak memenuhi standar masuk dalam DPA	3	4	12	Ada	1. Koordinasi dengan OPD terkait dalam perencanaan hibah 2. Koordinasi dengan pengusul pokir	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Realisasi hibah pada akhir periode	4	3	12	Ada	1. Koordinasi dengan pengusul pokok 2. Surat teguran kepada lembaga perihal laporan pertanggungjawaban hibah	Memadai	3	3	9
Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar bidang Pendidikan tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	3	4	12	Ada	Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampunan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Pendidikan	Memadai	3	3	9
Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar bidang Kesehatan tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	3	4	12	Ada	Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampunan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Kesehatan	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar bidang Sosial tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	3	4	12	Ada	Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampunan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Sosial	Memadai	3	3	9
Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	3	4	12	Ada	Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampunan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Perpustakaan	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Operasional (RKO) yang telah disusun	3	4	12	Ada	Pelaksanaan Rakor dengan OPD ampunan dalam rangka sinkronisasi kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Memadai	3	3	9
BIRO BUMD									
Pembagian dividen yang tidak sesuai ketentuan	1	5	5	ada	pembahasan bersama pada desk pembagian dividen BUMD Keuangan	Memadai	1	3	3
Laporan kinerja tidak valid	3	5	15	Ada	Melakukan audit KAP terkait laporan kinerja keuangan BUMD Keuangan	Memadai	2	5	10
Keterlambatan penyampaian laporan keuangan BUMD	3	3	9	ada	teguran lisan kepada penanggung jawab masing-masing BUMD Keuangan	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Ketidaksepakatan antara BUMD dan Pemda terkait besaran dividen	1	4	4	ada	pembahasan bersama pada desk pembagian dividen BUMD Keuangan	Memadai	1	3	3
Pemerintah Provinsi mendapatkan dividen yang lebih rendah dari periode sebelumnya	4	4	16	ada	monitoring dan evaluasi kinerja secara On The Spot ke BUMD	Memadai	3	4	12
Keterlambatan Pengumpulan Laporan	2	5	15	Ada	Melakukan pemantauan menggunakan alat komunikasi seperti WA / email	Memadai	2	5	10
Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan BLUD	3	5	15	Ada	Membuat ceklist dokumen	Memadai	2	5	10
Terdapat BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/commitment letter hasil evaluasi kinerja	3	5	15	Ada	Monitoring Kinerja triwulanan BUMD	Memadai	2	5	10
Terdapat BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/commitment letter hasil evaluasi kinerja	3	5	15	Ada	Monitoring Kinerja triwulanan BUMD	Memadai	2	5	10
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Triwulanan BUMD terlambat	4	2	8	Ada	Teguran lisan ke penanggung jawab masing-masing BUMD Keuangan	Memadai	1	1	1

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Keterlambatan penyusunan RKAP oleh BUMD	2	5	10	Ada	Teguran kepada BUMD Keuangan Terkait	Memadai	1	5	5
Biro Perekonomian									
Hasil keputusan rakor tidak ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi	3	5	12	Ada	Koordinasi terkait hasil rakor yang sudah menjadi keputusan	Memadai	3	4	12
Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan masih parsial	4	4	16	Ada	- Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Memadai	4	3	12
Data Tidak Akurat atau Tidak Valid	3	4	12	Ada	verifikasi data secara berkala dengan berkoordinasi antar instansi	Memadai	3	3	9
2. Sinkronisasi program/kegiatan	3	4	12	Ada	Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Rekomendasi kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi Sumber Daya Mineral menjadi parsial	4	4	16	Ada	- Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	Memadai	4	3	12
Rekomendasi kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian menjadi parsial	4	4	16	Ada	- Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian - Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian	Memadai	4	3	12
Reputasi geopark menurun	4	4	16	Ada	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Energi Sumber Daya Mineral	Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Pelaku usaha mengalami kendala dalam pengembangan Low Carbon Rice dan Sustainable Food	4	4	16	Ada	Koordinasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi pengembangan Low Carbon Rice dan Sustainable Food	Memadai	4	3	12
1. Pengolahan dan penyajian data menjadi kurang efektif dan efisien.	2	4	8	Ada	Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan rekomendasi/kebijakan	Memadai	1	2	2
3. Gangguan/keterlambatan acara	2	2	4	Ada	Fasilitasi koordinasi awal dan ceklist kegiatan	Memadai	1	2	2
1, Permintaan data/kegiatan prioritas di bidang penanaman modal, pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dipenuhi Kab/Kota	3	4	12	Ada	Fasilitasi rapat atau Rakor/FGD atau penyusunan rekomendasi/kebijakan	Memadai	2	3	6
2. Belum ada sinkronisasi program/kegiatan prioritas daerah	3	4	12	Ada	Rapat atau pelaksanaan Rakor atau penyusunan strategi/rekomendasi/kebijakan	Memadai	2	3	6
1. Gangguan/keterlambatan acara	2	2	4	Ada	ceklist kebutuhan rapat	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
2. Gangguan sistem/logistik/jaringan	2	4	8	Ada	Cek kebutuhan rapat sebelum acara dimulai	Memadai	1	2	2
1. Pengolahan dan penyajian data menjadi kurang efektif dan efisien.	2	4	8	Ada	Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan rekomendasi/kebijakan	Memadai	1	2	2
2. Sinkronisasi program/kegiatan menjadi kurang efektif	3	4	12	Ada	Fasilitasi rapat atau monev atau penyusunan rekomendasi/kebijakan	Memadai	2	3	6
4. Gangguan sistem/logistik/jaringan	2	4	8	Ada	Fasilitasi koordinasi awal dan cek lokasi awal	Memadai	1	2	2
1. Permintaan data/kegiatan prioritas di bidang penanaman modal, pariwisata dan ekonomi kreatif tidak dipenuhi Kab/Kota	3	4	12	Ada	Fasilitasi rapat atau Rakor/FGD atau penyusunan rekomendasi/kebijakan	Memadai	2	3	6
2. Belum ada sinkronisasi program/kegiatan prioritas daerah	3	4	12	Ada	Rapat atau pelaksanaan Rakor atau penyusunan strategi/rekomendasi/kebijakan	Memadai	2	3	6
Gangguan/keterlambatan acara	2	2	4	Ada	ceklist kebutuhan rapat	Memadai	1	2	2
Gangguan sistem/logistik/jaringan	2	4	8	Ada	Cek kebutuhan rapat sebelum acara dimulai	Memadai	1	2	2

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Penurunan fungsi DAS di Jawa Tengah	4	4	16	Ada	- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) - Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Memadai	4	3	12
Munculnya pola pengelolaan mangrove yang terpaku pada satu sektor	4	4	16	Ada	- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka fasilitasi dan koordinasi program oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah - Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi dan koordinasi program oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah	Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Pelaksanaan kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan rencana/target	4	4	16	Ada	- Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah pada kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah pada sektor pemanfaatan energi - Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang ESDM pada kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah pada sektor pemanfaatan energi	Memadai	4	3	12
data kebutuhan pupuk bersubsidi tidak sesuai	4	4	16	Ada	- Koordinasi dan Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi - Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi	Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Rendahnya kualitas garam rakyat dan penurunan produktivitas dan hasil panen	4	4	16	Ada	- Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka koordinasi kegiatan pengendalian harga garam rakyat dan pemanfaatan lahan budidaya perikanan darat/tambak di Jawa Tengah - Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka koordinasi kegiatan pengendalian harga garam rakyat dan pemanfaatan lahan budidaya perikanan darat/tambak di Jawa Tengah	Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Tidak sesuainya kuota/alokasi BBM subsidi untuk nelayan	4	4	16	Ada	- Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka koordinasi kegiatan penyaluran BBM Subsidi dan BBM Industri untuk Kapal Perikanan - Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka koordinasi kegiatan penyaluran BBM Subsidi dan BBM Industri untuk Kapal Perikanan	Memadai	4	3	12
Rendahnya minat masyarakat pada konsumsi pangan lokal	4	4	16	Ada	- Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka fasilitasi percepatan pengembangan pangan lokal - Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi percepatan pengembangan pangan lokal	Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Rendahnya penerapan fortifikasi beras	4	4	16	Ada	- Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka fasilitasi penerapan fortifikasi beras - Koordinasi Capaian Kinerja dengan Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi penerapan fortifikasi beras	Memadai	4	3	12
Kesenjangan penyebaran informasi dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait DBHCHT	4	4	16	Ada	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perundang-undangan bidang cukai	Memadai	4	3	12
Hilangnya dokumen dan arsip di Biro Infrastruktur dan SDA	3	4	12	Ada	Meningkatkan pengawasan di area penyimpanan dokumen untuk mencegah akses yang tidak sah	Memadai	2	4	8
Penyalahgunaan kewenangan yang berakibat pada penyelewengan keuangan	2	4	8	Ada	Pembatasan kewenangan dan akses dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan	Memadai	1	4	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Keterlambatan dalam pemenuhan laporan atau data kepegawaian	2	4	8	Ada	Meningkatkan kepatuhan pelaporan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan	Memadai	1	4	4
Rusak dan/ atau hilangnya sarana dan prasarana perkantoran	2	5	10	Ada	Meningkatkan kepatuhan pelaporan penatausahaan barang milik daerah	Memadai	1	5	5
Keterlambatan dalam pemenuhan laporan dan/ atau data laporan	3	4	12	Ada	Meningkatkan dokumentasi dan pencatatan dokumen secara lengkap,	Memadai	2	4	8
Biro Pembangunan Daerah									
Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah atau program strategis tidak tercapai	4	4	16	Ada	Melakukan koodinasi dengan OPD terkait dan Kab/Kota untuk IKU atau proyek strategis yang belum tercapai	Memadai	3	4	12
Terdapat masalah teknis pada sistem aplikasi penyusunan Rencana Kerja Operasional (RKO) kegiatan dan anggaran yang akan di simulasikan	3	3	9	Ada	Pemutakhiran sistem E-RKO	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Kendala operasional dalam proses <i>updating</i> data pelaksanaan Bankeu secara manual	4	3	12	Ada	1. Meminta masing-masing Kabupaten/Kota untuk memaparkan progres pelaksanaan kegiatan pada saat Rakor 2. Penambahan sasaran OPD pengelola kegiatan Bankeu yang diundang dalam Rakor	Memadai	4	2	8
Data kinerja pada <i>e-controlling</i> kinerja tidak valid	4	2	8	Ada	Pelaksanaan monitoring secara berkala kepada OPD, surat tentang notifikasi input capaian kinerja TW	Memadai	3	2	6
Ketidakselarasan antar indikator pada dokumen perencanaan pada biro - biro lingkup Setda	3	4	12	Ada	Desk Penyusunan Dokumen Perencanaan yang melibatkan pelaksana program dan kegiatan pada Biro lingkup Setda	Memadai	2	4	8
informasi yang disajikan tidak relevan	3	5	15	Ada	1. menyusun tim pengelola media informasi digital biro 2. membuat SOP pengelolaan media informasi digital	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Data penyusunan RKO perangkat daerah tidak lengkap	3	3	9	Ada	Desk/Koordinasi Penyusunan RKO	Memadai	2	3	6
Data penyusunan RK (APBN) perangkat daerah belum sesuai/tidak lengkap	3	4	12	Ada	Koordinasi dengan SKPD Pengelola dan DJPB Provinsi Jawa Tengah	Memadai	3	3	9
Data RKO (APBD) perangkat daerah tidak selesai tepat waktu	3	3	9	Ada	Desk/Koordinasi Penyusunan RKO	Memadai	2	3	6
Pelaksana kegiatan PSN tidak melaporkan progres dan hasil kegiatan secara periodik	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan pelaksana PSN di Jawa Tengah	Memadai	2	3	6
Target keuangan dan fisik RKO berubah	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan Subbag Program SKPD	Memadai	2	3	6
Informasi paket pekerjaan yang dilaksanakan tidak lengkap dan valid	3	2	6	Ada	Koordinasi dengan Subbag Program SKPD sebelum monitoring	Memadai	2	3	6
Pemerintah Kab/Kota terlambat dalam mengawali pelaksanaan kegiatan	4	4	16	Ada	1. Updateing Aplikasi 2. bintek aplikasi SIVERO bagi admin baru	Belum Memadai	4	3	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Pemerintah Kab/Kota terlambat dalam mengawali pelaksanaan kegiatan	3	3	9	Ada	1. Penyusunan Surat Edaran Sekda Kepada Bupati/Walikota 2. Pemantauan progres verifikasi RKO pada APBD Perubahan TA. 2026	Memadai	3	2	6
Keterlambatan pengiriman laporan bulanan melalui aplikasi	4	3	12	Ada	1. Pengumpulan pelaporan progres pelaksanaan kegiatan pada saat Rakor 2. Desk progres pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota	Memadai	4	2	8
Data yang dilaporkan berbeda dengan kondisi riil di lapangan	4	3	12	Ada	1. Meminta masing-masing Kabupaten/Kota untuk memaparkan progres pelaksanaan kegiatan pada saat Rakor 2. Penambahan sasaran monitoring pada APBD Perubahan TA. 2026	Memadai	4	2	8

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Proses verifikasi capaian <i>progress</i> pelaksanaan kegiatan Bankeu terhambat	4	3	12	Ada	1. Meminta masing-masing Kabupaten/Kota untuk memaparkan progres pelaksanaan kegiatan pada saat Rakor 2. Penambahan sasaran OPD pengelola kegiatan Bankeu yang diundang dalam Rakor	Memadai	4	2	8
Data kurang lengkap dan tidak sesuai dengan kaidah pelaporan	4	3	12	Ada	Pemantauan dan evaluasi progres pelaksanaan kegiatan APBD secara berkala melalui Aplikasi e-controlling APBD.	Memadai	3	3	9
Data pelaporan progres pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa tidak valid	4	5	20	Ada	Memaksimalkan pelaksanaan pendampingan penggunaan aplikasi bantuan keuangan Desa	Memadai	4	4	16
Penyajian laporan hasil evaluasi kinerja beberapa Biro lingkup Setda belum sesuai ketentuan	4	3	12	Ada	Desk Penyusunan Laporan LKjIP Setda bersama Biro lingkup Setda	Memadai	3	3	9
Data kepegawaian tidak valid	3	4	12	Ada	Koordinasi dengan Biro Organisasi dan Bendahara Gaji Biro Umum	Memadai	2	4	8

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Berkas keuangan tidak lengkap sesuai dengan prosedur	3	4	12	Ada	1. Verifikasi BPP Biro terkait kelengkapan administrasi 2. Percepatan penyelesaian administrasi	Memadai	3	3	9
Kerusakan arsip	3	4	12	Ada	Tarikan otomatis aplikasi surat elektronik	Memadai	2	3	6
Ketidaksesuaian pencatatan aset dengan kondisi fisik	3	5	15	Ada	1. Pencatatan kebutuhan aset per bagian melalui RKBMD 2. Pengajuan permohonan kebutuhan ke Biro Umum 3. Koordinasi Intens	Memadai	3	3	9
Hilangnya dan atau rusaknya aset	4	4	16	Ada	1. Pembaruan data aset internal Biro Bangda secara berkala 2. Pengembalian barang/aset yang rusak dengan pencatatan dan dokumentasi	Memadai	3	4	12
Pimpinan tidak menghadiri / terlambat menghadiri suatu kegiatan	4	4	16	Ada	1. Adanya agenda digital pada kalender pimpinan 2. Adanya informasi agenda kegiatan dengan media elektronik	Memadai	3	3	9
Spesifikasi barang dan jasa tidak sesuai dengan yang diusulkan dalam kontrak	3	4	12	Ada	rekonsiliasi pengadaan aset bersama biro umum	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Biro APBJ									
realisasi belanja tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan barang/jasa	5	4	20	Ada	Pendampingan dan Sosialisasi pencapaian ITKP	Memadai	5	4	20
1. Perencanaan pengadaan tidak matang 2. Data RUP tidak valid	5	4	20	Ada	1. Reviu RUP 2. PIC Perencanaan	Memadai	4	4	16
Penayangan etalase usulan OPD terlambat	2	3	6	Ada	Sosialisasi kelengkapan Dokumen kepada Seluruh SKPD	Memadai	2	2	4
Pemecahan paket pengadaan	2	3	6	Ada	Dilakukan Desk Perencanaan secara Periodik untuk mengamati tiap detail pemaketan yang di buat oleh masing2 SKPD	Memadai	2	2	4
Pemenuhan dokumen MCP terlambat	2	4	8	Ada	Koordinasi dengan Inspektorat terkait pemenuhan dokumen dan sosialisasi kepada OPD Strategis	Memadai	2	3	6
Arsip tersebar di berbagai tempat	3	3	9	Ada	Melakukan penataan arsip semaksimal mungkin sesuai kaidah2 penataan arsip		2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
pencatatan aset tidak sesuai kondisi fisik aset	3	3	9	Ada	secara berkala dilakukan rekonsiliasi internal terhadap aset dan senantaia melakukan updating KIB	Memadai	3	2	6
Data kepegawaian tidak valid	2	3	6	Ada	melakukkann koordinasindengan pegawaiin terkait	Memadai	2	2	4
Pembayaran Gaji Berkala terlambat	2	3	6	Ada	Melakukan Inventarisasi jumlah pegawai yang akan mendapat KGB pada periode selanjutnya dan segera bersurat ke Biro Organisasi agar tidak terjadi keterlambatan	Memadai	2	2	4
Dokumen perencanaan/evaluasi terlambat disusun	2	3	6	Ada	berkoordinasi dengan masing2 sub bagian untuk melakukan penyusunan anggaran di awal	Memadai	2	2	4
Pimpinan tidak menghadiri / terlambat menghadiri suatu kegiatan	2	3	6	Ada	Berkoordinasi dengan masing2 OPD agar dalam mengirimkan surat undangan agar tidak hanya melalui 1 platofrm aplikasi.	Memadai	2	2	4
publikasi konten tidak sesuai dengan jadwal	2	3	6	Ada	berkoordinasi dengan pemangku kepentingan	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Spesifikasi barang dan jasa tidak sesuai dengan yang diusulkan dalam kontrak	2	3	6	Ada	Sosialisasi anti korupsi, dan dilakukan pembinaan SDM	Memadai	2	2	4
Pembayaran invoice tertunda	2	3	6	Ada	dilakukan koordinasi dan peringatan dengan pihak penyedia	Memadai	2	2	4
Data Survey tidak valid	2	3	6	Ada	mengurangi kontak dengan responden kecuali dalam hal penyebaran kuisioner	Memadai	2	2	4
Tidak dapat membuat billing dan pelaporan	2	2	4	Ada	melakukan koordinasi dengan pihak BPKAD	Memadai	2	1	2
Terdapat peserta Rapat Koordinasi Evaluasi	2	3	6	Ada	Perencanaan Yang matang didukung anggaran yang	Memadai	2	2	4
Pengadaan barang/jasa dengan spesifikasi dan kebutuhan yang sama tidak dilakukan secara konsolidasi	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan Pemangku Kebijakan (LKPP) dan Seluruh User (SKPD)	Memadai	2	2	4
Sanggah / Sanggah Banding / Aduan	3	3	9	Ada	diilakukan bimtek kepada seluruh pokja Pemilihan	Memadai	2	3	6
Penyampaian usulan SHS yang double	3	4	12	Ada	sosialisasi kepada seluruh SKPD yang menyampaikan	Memadai	3	3	9
Gangguan teknis pada sistem	4	4	16	Ada	Sosialisasi dan pempdampingan terhadap	Memadai	1	3	3
Overload pada jaringan	3	5	15	Ada	backup jaringan	Belum Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Pelaku Usaha terkendala mendaftar SPSE.	4	3	12	Ada	Pendampingan dan pengarahan terhadap	Memadai	3	3	9
Pelaku Pengadaan terkendala dalam proses	4	3	12	Ada	Pendampingan pelaku PBJ saat pendaftaran akun	Memadai	2	3	6
Proses Pengadaan Tertunda	3	4	12	Ada	Koordinasi dengan instansi terkait untuk percepatan	Memadai	2	3	6
Koneksi internet yang tidak stabil.	3	4	12	Ada	Backup jaringan	Memadai	3	3	9
Realisasi PBJ OPD tidak terbaca	2	5	10	Ada	Pendampingan pengisian dan Pengembangan Sistem	Memadai	3	3	9
Terhambatnya proses PBJ yang masuk dalam	2	5	10	Ada	Pelaksanaan pendampingan kepada	Memadai	1	5	5
Terdapat aduan dari masyarakat terkait	3	3	9	Ada	Sosialisasi kepada masyarakat terkait alur	Memadai	2	3	6
Materi tidak tersampaikan kepada	3	3	9	Ada	Sosialisasi pencegahan korupsi pada internal SDM	Memadai	2	3	6
Pelaku Usaha terkendala mendaftar marketplace	3	3	9	Ada	Sosialisasi dan Pendampingan terhadap	Memadai	2	3	6
Koneksi internet peserta tidak stabil	3	3	9	Ada	Sosialisasi secara luring dan pmdampingan	Memadai	3	3	9
Integrasi Antar Sistem mengalami kendala	3	3	9	Belum Ada	-	Belum Memadai	3	3	9
Resistensi/penolakan penggunaan sistem baru	2	4	8	Ada	Sosialisasi dan pendampingan terhadap	Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
-Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indikator	2	4	8	Ada	Melakukan mentoring, koordinasi dan mendorong	Memadai	1	4	4
Pengoperasian sistem aplikasi terkendala	2	3	6	Ada	Sosialisasi dan pendampingan terhadap	Memadai	3	3	9
Resistensi/penolakan penggunaan sistem baru	2	3	6	Ada	Penjelasan dan pendampingan Pelaku PBJ	Memadai	2	3	6
Keterbatasan dalam penyusunan	2	3	6	Belum Ada	-	Belum Memadai	2	3	6
Sistem yang dikembangkan belum	2	3	6	Belum Ada	-	Belum Memadai	2	3	6
Resistensi/penolakan penggunaan sistem baru	2	3	6	Ada	Pengarahan lebih lanjut terhadap Pelaku PBJ	Memadai	2	3	6
Tidak semua SDM PBJ mengikuti kegiatan	2	3	6	Ada	- Mengusulkan/mengirimka	Memadai	1	3	3
Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan (Indikator	2	3	6	Ada	Menginfokan dan berkoordinasi kepada OPD	Memadai	1	3	3
Terhambatnya capaian UKPBJ Provinsi Jawa	2	3	6	Ada	Koordinasi dengan LKPP RI untuk membahas	Memadai	1	3	3
Tidak terpenuhinya target peserta Rakor UKPBJ	2	3	6	Ada	- Waktu penyampaian undangan kepada UKPBJ	Memadai	1	3	3
Ketidaksesuaian antara sistem pengadaan	2	2	4	Ada	Pengarahan pelaksanaan pengadaan melalui sistem	Memadai	2	3	6
Sistem yang dikembangkan belum	1	3	3	Belum Ada	-	Belum Memadai	1	3	3

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Resistensi/penolakan penggunaan sistem baru	1	3	3	Ada	Pendampingan pelaku PBJ terkait penggunaan sistem	Memadai	1	3	3
Perbedaan pemahaman informasi	1	3	3	Ada	Pengarahan terhadap Pelaku PBJ terkait	Memadai	2	3	6
Biro Organisasi									
Konsep kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang	4	4	16	Ada	Penyesuaian Kebijakan Pemberian TPP	Memadai	3	4	12
Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan	4	4	16	Ada	Melaksanakan fasilitasi penyusunan	Memadai	4	3	12
Proses pembangunan ZI tidak berjalan	4	4	16	Ada	Melakukan pembinaan pembangunan zona	Belum Memadai	3	4	12
RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan	4	4	16	Ada	Meningkatkan pemahaman pentingnya reformasi	Memadai	3	4	12
Kab/Kota tidak melaksanakan RB secara	4	3	12	Ada	Meningkatkan pemahaman pentingnya reformasi	Memadai	3	3	9
Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-	4	4	16	Ada	Penunjukan Pengelola dan Pengurus Barang di setiap	Memadai	3	4	12
Konflik dengan pihak lain	4	3	12	Ada	Inventarisasi dan pencatatan aset dalam	Memadai	3	3	9
Layanan kepegawaian terlambat atau tidak	3	4	12	Ada	Menyampaikan nominatif pegawai yang memenuhi	Memadai	3	3	9
Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai	4	4	16	Ada	Meningkatkan pemahaman dan mendorong penerapan	Memadai	3	4	12

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Jam Kerja tidak dipatuhi	4	3	12	Ada	Meningkatkan pemahaman pegawai terkait tindakan	Memadai	3	3	9
Pelayanan dan pelaksanaan tugas tidak	4	4	16	Ada	Penguatan penyusunan Standar Operasional	Memadai	4	3	12
SP tidak diterapkan di UPP	4	4	16	Ada	meningkatkan pemahaman dan komitmen UPP dalam	Memadai	3	3	9
Peta proses bisnis tidak digunakan sebagai acuan	4	3	12	Ada	Penguatan penyusunan peta proses bisnis sesuai	Memadai	3	3	9
Pembentukan UPTD tidak sesuai regulasi	3	4	12	Ada	Melaksanakan visitasi/fasilitasi	Memadai	3	3	9
Penilaian tingkat kematangan organisasi	3	4	12	Ada	Melaksanakan fasilitasi penilaian kematangan	Memadai	3	3	9
Evaluasi jabatan tidak dilakukan	4	4	16	Ada	Melakukan penyesuaian dengan dinamika tata	Memadai	3	3	9
Pendampingan dan pelaksanaan analisis	4	4	16	Ada	Monev analisis jabatan OPD dan Kab/Kota	Memadai	3	4	12
Informasi jabatan tidak tersusun	3	4	12	Ada	Melakukan penyesuaian dengan dinamika tata	Memadai	3	3	9
Dokumen ABK tidak tersusun	3	4	12	Ada	Melakukan penyesuaian dengan dinamika tata	Memadai	3	3	9
SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan	4	4	16	Ada	Melakukan penyesuaian dengan dinamika tata	Memadai	4	3	12
Dokumen tidak tersusun sesuai pedoman atau	3	4	12	Ada	Meningkatkan pemahaman penyusunan dokumen	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Pegawai mengikuti pelatihan yang tidak	4	3	12	Ada	Memberikan penawaran diklat yang sesuai dengan	Memadai	3	3	9
TND tidak dilaksanakan secara seragam	4	4	16	Ada	Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap	Memadai	3	4	12
ASN tidak mematuhi ketentuan pakaian dinas	4	3	12	Ada	Mengoptimalkan pengawasan penggunaan	Memadai	3	3	9
Data evaluasi tidak lengkap atau salah input	3	4	12	Ada	- Penguatan kelembagaan Tim Koordinasi dan Tim	Memadai	3	3	9
Penilaian tidak mencerminkan kinerja	4	3	12	Ada	meningkatkan pemahaman dan komitmen	Memadai	3	3	9
Data SKM tidak mencerminkan persepsi	3	4	12	Ada	melakukan penyempurnaan aplikasi	Memadai	3	3	9
Penilaian kepatuhan rendah	3	4	12	Ada	Meningkatkan komitmen UPP dalam	Memadai	3	3	9
Inovasi berhenti dan tidak berkelanjutan	4	3	12	Ada	Meningkatkan budaya inovasi di Pemprov Jateng	Memadai	3	3	9
Inovasi tidak lolos seleksi KIPP	3	4	12	Ada	Meningkatkan partisipasi OPD Prov Jateng dalam	Memadai	3	3	9
Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan	4	4	16	Ada	Meningkatkan komitmen Kepala Daerah di Jateng	Memadai	3	4	12
Perubahan jadwal perencanaan dan evaluasi	4	3	12	Ada	Melakukan monitoring progres secara periodik	Memadai	3	3	9
Terdapat salah input anggaran dalam sistem	4	3	12	Ada	Melakukan pengecekan kembali sebelum finalisasi	Memadai	3	3	9

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Rencana kerja yang disusun tidak sesuai	4	3	12	Ada	Melakukan review dokumen rencana kerja	Memadai	3	3	9
Capaian kinerja tidak berdasarkan data yang	4	3	12	Ada	Penerapan mekanisme verifikasi berjenjang: unit	Memadai	3	3	9
Terdapat barang milik daerah yang tidak terdata	4	3	12	Ada	Inventarisasi barang milik daerah berkala	Memadai	3	3	9
Tamu tidak terfasilitasi dengan layak	4	3	12	Ada	Penyediaan ruang tamu atau ruang tunggu.	Memadai	3	3	9
Barang milik daerah mengalami kerusakan	3	4	12	Ada	Pencatatan kondisi barang dalam Kartu Inventaris	Memadai	3	3	9
Barang menjadi tidak dapat digunakan	4	3	12	Ada	Mekanisme usulan perbaikan barang melalui	Memadai	3	3	9
Barang digunakan tanpa izin untuk keperluan di	4	4	16	Ada	Penunjukan Pengelola dan Pengurus Barang di setiap	Memadai	3	4	12
Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat	4	4	16	Ada	Adanya mekanisme permintaan perbaikan	Memadai	3	4	12
Biro Umum									
Kesalahan penyusunan sambutan, keynote speech, dan makalah	2	4	8	Ada	Koordinasi dengan LS (Leading Sector)	Memadai	2	3	6
Terjadinya kerusakan BMD	4	4	16	Ada	1) Mengajukan daftar kendaraan yang akan	Memadai	3	4	12
Editing narasi berita pimda terhambat	2	4	8	Ada	Mempunyai SK Narahubung antar lembaga	Memadai	2	3	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Tidak dapat memenuhi kebutuhan pimpinan	1	3	3	Ada	Koordinasi dengan penyedia jasa	Memadai	1	2	2
Perolehan materi dan bahan publikasi terbatas	1	4	4	Ada	Koordinasi dengan LS (Leading Sector)	Memadai	1	3	3
Produksi Konten media sosial PPID terlambat	2	3	6	Ada	Memperbarui SK PPID	Memadai	2	2	4
Adanya keterlambatan dalam penyampaian	1	3	3	Ada	Adanya laporan pembelian media cetak	Memadai	1	2	2
Teknis pelaksanaan acara berubah	3	3	9	Ada	Mediasi dan koordinasi dengan Leading Sector	Memadai	3	2	6
Tidak dapat memfasilitasi permohonan pengawalan	3	3	9	Ada	Mediasi dan koordinasi dengan Leading Sector	Memadai	2	3	6
Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan	2	3	6	Ada	Rakor keprotokolan Kab/Kota dan Lembaga	Memadai	2	2	4
Keterlambatan Pengadaan Pakaian	2	3	6	Ada	Koordinasi dengan penyedia jasa pengadaan pakaian dinas	Memadai	2	2	4
Tertundanya Medical Check Up rutin Pimpinan	2	3	6	Ada	Penjadwalan rutin medical check-up Pimpinan	Memadai	2	2	4
Tidak dapat memenuhi kebutuhan pimpinan	1	3	3	Ada	Koordinasi dengan penyedia jasa	Memadai	1	2	2
Pimpinan tidak dapat menerima tamu	3	3	9	Ada	Koordinasi dan reschedule jadwal kunjungan	Memadai	3	2	6

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Hilangnya arsip inaktif	2	4	8	Ada	Pembentukan SK Pengelola Arsip SETDA	Memadai	2	3	6
kehilangan atau salah alamat surat	2	3	6	Ada	Membuat buku agenda dan ekspedisi	Memadai	2	2	4
Tertundanya Pencairan dana Pimpinan	2	4	8	Ada	Koordinasi dengan TU Pimpinan perihal	Memadai	1	4	4
Penyesuaian data Pimpinan Baru	2	4	8	Ada	Koordinasi dengan BKD dan TU Pimpinan perihal	Memadai	1	4	4
Tidak akuratnya Laporan Barang persediaan	4	3	12	Ada	Melaksanakan rekonsiliasi barang persediaan setiap	Memadai	3	3	9
Tertundanya pembelian barang yang sesuai	4	3	12	Ada	Penyusunan dokumen RKBMD secara akurat	Memadai	3	3	9
Pengadaan barang tidak sesuai dengan spesifikasi	3	3	9	Ada	Melakukan identifikasi kebutuhan barang yang	Memadai	2	3	6
Terjadi lebih bayar tunjangan keluarga ASN	3	3	9	Ada	Membagikan SKUMPTK kepada pegawai yang di isi	Memadai	2	3	6
Adanya Revisi SK Pengelola Keuangan	2	4	8	Ada	Koordinasi dengan Biro Hukum dalam pembuatan	Memadai	1	4	4
Dokumen SPJ keuangan tidak lengkap	4	2	8	Ada	Melakukan sosialisasi kepada pelaksana kegiatan	Memadai	3	2	6
Kesalahan dalam menyusun jurnal	3	2	6	Ada	Pelatihan kompetensi penyusun laporan	Memadai	2	2	4
Bukti Dokumen Perjalanan Dinas tidak	3	2	6	Ada	Melakukan sosialisasi kepada pelaksana kegiatan	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada)</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Penyewa tidak jadi menggunakan aset	2	3	9	Ada	Mempublikasikan layanan pada sistem	Memadai	2	2	4
Ruangan kurang bersih dan rapi	3	3	9	Ada	Koordinasi dengan penyedia jasa untuk	Memadai	2	3	6
Kerusakan instalasi listrik	2	4	8	Ada	1. Dilakukan pengecekan secara berkala	Memadai	2	3	6
Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang	2	3	6	Ada	Melakukan pemetaan atau penentuan kebutuhan	Memadai	2	2	4
Peralatan rumah tangga tidak dapat digunakan	2	3	6	Ada	Melakukan pemetaan atau penentuan kebutuhan	Memadai	2	2	4
Terjadinya kendala dalam penanganan pertolongan	2	3	6	Ada	Melakukan pemetaan atau penentuan kebutuhan obat	Memadai	2	2	4
Persiapan fasilitas kunjungan tamu tidak	2	3	6	Ada	Koordinasi dan komunikasi dengan Pimpinan	Memadai	2	2	4
Kenyamanan mobil dinas berkurang	2	3	6	Ada	Pengecekan service secara berkala mobil dinas dan	Memadai	2	2	4
Kendaraan dinas tidak dapat beroperasi dengan	3	3	9	Ada	Pengecekan service secara berkala mobil dinas dan	Memadai	2	3	6
Terjadi kerusakan pada mebel	2	3	6	Ada	Dilakukan pemeliharaan mebel secara berkala	Memadai	2	2	4
Terjadi kerusakan peralatan kantor	3	3	9	Ada	Dilakukan pemeliharaan secara rutin	Memadai	2	2	4
Keterlambatan pembayaran pada akhir	2	3	6	Ada	Melakukan efisiensi penggunaan energi listrik	Memadai	2	2	4

Pernyataan Risiko	Skala/Nilai Risiko yang Melekat			Upaya Pengendalian			Skala/Nilai Risiko Residu Setelah Adanya Pengendalian <i>(diisi apabila keterangan pada</i>		
	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko	Belum Ada/Ada <i>(Apakah sudah terdapat upaya pengendalian dari risiko yang teridentifikasi)</i>	Uraian Pengendalian	Belum Memadai/Memadai <i>(Apakah uraian pengendalian yang sudah ada sudah memadai menangani risiko)</i>	Skala Probabilitas	Skala Dampak	Level Risiko
Terjadinya kerusakan gedung kantor dan	3	3	9	Ada	Melakukan pemeliharaan gedung secara berkala	Memadai	2	3	6

Tabel
Risiko Prioritas

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama				
MoU tidak terlaksana	12	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tidak sinkronnya tujuan antar Pemerintah Provinsi daerah dengan Pemerntahan Luar daerah	Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana.
Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan	16	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kurangnya sosialisasi dan komunikasi	Tertundanya penetapan lokasi pembangunan
Gagal tercapainya kesepakatan batas	16	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Perbedaan persepsi atau kepentingan antar daerah	Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah
Terlambatnya penyusunan atau revisi naskah kerja sama	12	Kepala Biro Pemerintahan Otda	Kurangnya komitmen dari anggota tim terhadap usulan kerjasama	Gagalnya inisiasi kerja sama dan menurunnya kepercayaan pihak luar negeri terhadap Jawa Tengah
Biro Hukum				
Kegagalan dalam fasilitasi penyelesaian perkara di pengadilan karena kelemahan dalam pembuktian	10	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kelemahan pembuktian dalam penyelesaian perkara di pengadilan	Potensi pengeluaran keuangan atau aset daerah karena putusan Pengadilan akibat kelemahan dalam pembuktian
Kesalahan atau penundaan kegiatan	10	Kepala Biro Pemerintahan Otda	Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran
BIRO BUMD				

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Laporan kinerja tidak valid	10	Kepala Biro BUMD	Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil	1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD 2. Keputusan yang diambil kurang tepat
Pemerintah Provinsi mendapatkan dividen yang lebih rendah dari periode sebelumnya	12	Kepala Biro BUMD	Faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi (Inflasi, suku bunga tinggi, atau krisis ekonomi)	Berpengaruh terhadap penerimaan PAD
Keterlambatan Pengumpulan Laporan	10	Kepala Biro BUMD	Laporan dari unit-unit di bawah BLUD (misal: poliklinik, instalasi rawat inap) tidak dikirim tepat waktu	Monev tidak dapat dilakukan sesuai jadwal triwulanan
Ketidaklengkapan Dokumen Persyaratan BLUD	10	Kepala Biro BUMD	Tim penyusun tidak memahami secara detail regulasi dan persyaratan teknis BLUD	Proses penetapan BLUD tertunda atau bahkan ditola
Terdapat BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/ commitment letter hasil evaluasi kinerja	10	Kepala Biro BUMD	Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Jasa dan Produksi	Evaluasi Kinerja BUMD tidak memberikan nilai tambah
Terdapat BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/ commitment letter hasil evaluasi kinerja	10	Kepala Biro BUMD	Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Keuangan	Kinerja BUMD Keuangan tidak bertambah baik
Biro Perekonomian				

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Hasil keputusan rakor tidak ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi	12	Asisten Perekonomian	Instansi memiliki Program Prioritas yang Berbeda	potensi penyimpangan atau kegagalan program tidak terdeteksi dini
Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan masih parsial	12	Asisten Perekonomian	Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika regulasi	Rekomendasi kebijakan belum mendorong ketahanan pangan di Jawa Tengah
Rekomendasi kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi Sumber Daya Mineral menjadi parsial	12	Kepala Biro Perekonomian	Tidak ada integrasi data Monev antar OPD	Rekomendasi tidak relevan
Rekomendasi kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian menjadi parsial	12	Kepala Biro Perekonomian	Pengembangan geopark tidak menjadi prioritas kegiatan.	rendahnya tingkat kunjungan wisatawan dan perekonomian wilayah sekitar geopark
Reputasi geopark menurun	12	Kepala Biro Perekonomian	evaluasi atas efektivitas hasil fasilitasi tidak mencakup seluruh objek yang diberikan fasilitas	tidak ada pengembangan low carbon rice dan sustainable food
Pelaku usaha mengalami kendala dalam pengembangan Low Carbon Rice dan Sustainable Food	12	Kepala Biro Perekonomian	Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran
Penurunan fungsi DAS di Jawa Tengah	12	Kepala Biro Perekonomian	Kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) menurun	Kerugian ekonomi masyarakat dan infrastruktur akibat banjir dan tanah longsor

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Munculnya pola pengelolaan mangrove yang terpaksa pada satu sektor	12	Kepala Biro Perekonomian	Pengelolaan mangrove terpisah-pisah	Ekosistem mangrove tidak dapat hidup dengan optimal
Pelaksanaan kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan rencana/target	12	Kepala Biro Perekonomian	Menurunnya potensi manajemen energi pada sektor pemanfaatan energi	Output dari kegiatan manajemen energi tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan
data kebutuhan pupuk bersubsidi tidak sesuai	12	Kepala Biro Perekonomian	Penyaluran pupuk bersubsidi terhambat	pupuk tidak tersalurkan secara merata dan tepat sasaran
Rendahnya kualitas garam rakyat dan penurunan produktivitas dan hasil panen	12	Kepala Biro Perekonomian	Produksi garam dan hasil budidaya perikanan darat/tambak mengalami penurunan	- Garam rakyat tidak terserap oleh Industri secara maksimal - Kerugian finansial bagi pembudidaya
Tidak sesuainya kuota/alokasi BBM subsidi untuk nelayan	12	Kepala Biro Perekonomian	Masih banyak kapal perikanan yang belum terdata	Nelayan kesulitan mendapatkan BBM pada saat akan melaut
Rendahnya minat masyarakat pada konsumsi pangan lokal	12	Kepala Biro Perekonomian	Adanya lahan produktif yang tidak digunakan masyarakat untuk budidaya bahan baku pangan lokal	1. Bahan Baku pangan local sangat terbatas 2. Kesulitan mendapatkan pelaku usaha pangan lokal
Rendahnya penerapan fortifikasi beras	12	Kepala Biro Perekonomian	Perencanaan berbasis data yang lemah	Fortifikasi bisa berjalan tanpa sasaran yang tepat (miskin data) dan tidak efektif menysasar kelompok membutuhkan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Kesenjangan penyebaran informasi dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait DBHCHT	12	Kepala Biro Perekonomian	Keterbatasan data yang dimiliki Kab/Kota	tidak dapat mengidentifikasi permasalahan implementasi program dan memberikan rekomendasi/solusi
Biro Pembangunan Daerah				
Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah atau program strategis tidak tercapai	12	Asisten Perekonomian	1. Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD kurang mendukung dalam upaya pencapaian indikator kinerja 2. Kebijakan yang tidak tepat sasaran atau adanya kebijakan yang tumpang tindih antar OPD	Penilaian kinerja pemerintah daerah turun
informasi yang disajikan tidak relevan	12	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	materi publikasi yang disajikan tidak sesuai dengan standar publikasi media pemerintahan	terjadi misinformasi terhadap masyarakat yang menggunakan layanan media informasi
Pemerintah Kab/Kota terlambat dalam mengawali pelaksanaan kegiatan	12	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Adanya pergantian admin penyusun RKO pada OPD Kab/Kota.	Pekerjaan tidak selesai dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan
Data pelaporan progres pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah provinsi kepada pemerintah desa tidak valid	16	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Ketidapatuhan user pelaporan bantuan keuangan desa dalam melaksanakan pelaporan sesuai ketentuan	Analisis pengambilan keputusan/kebijakan menjadi tidak tepat

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Hilangnya dan atau rusaknya aset	12	Kepala Biro Administrasi Pembangunan	Ketidaksesuaian pencatatan dan pendokumentasian aset dengan kondisi fisik	aset daerah yang pencatatannya tidak sesuai, dapat digunakan untuk kepentingan pribadi
Biro APBJ				
realisasi belanja tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan barang/jasa	20	Asisten Administrasi	Kurangnya pemahaman mengenai metode pemilihan pengadaan barang/jasa	Capaian ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan) belum maksimal
1. Perencanaan pengadaan tidak matang 2. Data RUP tidak valid	16	Asisten Administrasi	- Pemahaman PA/KPA/PPK OPD yang belum seragam dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang jasa - PA/KPA/PPK Kurang cermat dalam menetapkan RUP (Rencana Umum Pengadaan)	- Menghambat pelaksanaan pengadaan barang jasa - berpotensi aduan
Biro ORGANISASI				
Konsep kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku	12	Asisten Administrasi	Perubahan regulasi belum tersosialisasi	Pemberian TPP tidak tepat sasaran
Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan	12	Asisten Administrasi	Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat	Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan
Proses pembangunan ZI tidak berjalan	12	Asisten Administrasi	Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI	Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik
RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan manajemen perubahan	12	Kepala Biro Organisasi	RB masih dianggap beban administrasi dan belum dipahami secara utuh	Nilai RB tidak meningkat, pelayanan publik stagnan

Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Sebab	Dampak
Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-pemerintah	12	Kepala Biro Organisasi	Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Kerugian finansial perangkat daerah
Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai prosedur	12	Kepala Biro Organisasi	Sistem kerja tidak terdokumentasi atau tidak dipahami	Ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya
Pelayanan dan pelaksanaan tugas tidak seragam	12	Kepala Biro Organisasi	SOP tidak disusun secara lengkap dan sesuai	Kinerja organisasi tidak terstandarisasi
Pendampingan dan pelaksanaan analisis jabatan tidak dilakukan	12	Kepala Biro Organisasi	OPD tidak responsif	Penataan jabatan tidak sesuai kebutuhan
SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan	12	Kepala Biro Organisasi	Kurangnya koordinasi antar OPD	Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi
TND tidak dilaksanakan secara seragam	12	Kepala Biro Organisasi	Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap regulasi TND	Administrasi pemerintahan tidak tertib
Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan	12	Kepala Biro Organisasi	Rendahnya komitmen Pemda Kab/Kota terhadap kebijakan Pemprov	Disparitas kualitas pelayanan antar daerah
Barang digunakan tanpa izin untuk keperluan di luar instansi	12	Kepala Biro Organisasi	Penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Kerugian finansial dan penyalahgunaan aset daerah
Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat sebagai sudah diperbaiki	12	Kepala Biro Organisasi	Pemalsuan laporan pemeliharaan barang	Kerugian keuangan
Biro Umum				
Terjadinya kerusakan BMD	12	Kepala Biro Umum	Kelalaian pengguna BMD	Menghambat kegiatan operasional

**Tabel
Rencana Tindak Pengendalian**

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama								
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	MoU tidak terlaksana	12	Tidak sinkronnya tujuan antar Pemerintah Provinsi daerah dengan Pemerntahan Luar daerah	Upaya pelaksanaan kerjasama tidak terlaksana.	1. Pembahasan perencanaan kerja sama yang dibutuhkan sesuai dengan kesepakatan para pihak	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Triwulan II
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan	16	Kurangnya sosialisasi dan komunikasi	Tertundanya penetapan lokasi pembangunan	1. Perubahan trase/desain	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Triwulan IV
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Gagal tercapainya kesepakatan batas	16	Perbedaan persepsi atau kepentingan antar daerah	Ketidakpastian hukum dan administrasi wilayah	1. Melakukan Delineasi/koreksi garis batas daerah 2. Fasilitasi penyelesaian sengketa garis batas daeah antar Kab/kota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Triwulan IV
Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase pemetaan potensi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	Terlambatnya penyusunan atau revisi naskah kerja sama	12	Kurangnya komitmen dari anggota tim terhadap usulan kerjasama	Gagalnya inisiasi kerja sama dan menurunnya kepercayaan pihak luar negeri terhadap Jawa Tengah	1. Musyawarah dengan para pihak perihal permasalahan substansi kerjasama	Kepala Biro Pemerintahan Otda	Triwulan III
Biro Hukum								
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegagalan dalam fasilitasi penyelesaian perkara di pengadilan karena kelemahan dalam pembuktian	10	Kelemahan pembuktian dalam penyelesaian perkara di pengadilan	Potensi pengeluaran keuangan atau aset daerah karena putusan Pengadilan akibat kelemahan dalam pembuktian	- Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah - Meningkatkan kapasitas SDM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Triwulan IV

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum Biro Hukum	Kesalahan atau penundaan kegiatan	10	Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran	- menyusun SOP Surat Masuk dan Surat Keluar - penggunaan aplikasi persuratan dengan baik dan benar	Kepala Biro Hukum	Triwulan I
Biro BUMD								
Program Perekonomian Pembangunan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Keuangan	Laporan kinerja tidak valid	10	Data kinerja BUMD dimanipulasi/tidak sesuai kondisi riil	1. Evaluasi tidak mencerminkan kondisi riil BUMD 2. Keputusan yang diambil kurang tepat	Monitoring ke BUMD terkait	Kepala Biro BUMD	November 2026
Program Perekonomian Pembangunan	Persentase ROA (Return On Aset) BUMD Jasa Aneka Usaha	Pemerintah Provinsi mendapatkan dividen yang lebih rendah dari periode sebelumnya	12	Faktor eksternal seperti ketidakstabilan ekonomi (Inflasi, suku bunga tinggi, atau krisis ekonomi)	Berpengaruh terhadap penerimaan PAD	Monitoring dan Evaluasi kinerja diluar evaluasi triwulanan BUMD	Kepala Biro BUMD	TW I, II, III, dan IV
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Keterlambatan Pengumpulan Laporan	10	Laporan dari unit-unit di bawah BLUD (misal: poliklinik, instalasi rawat inap) tidak dikirim tepat waktu	Monev tidak dapat dilakukan sesuai jadwal triwulanan	Membuat surat tentang batas pengumpulan laporan	Kepala Biro BUMD	- TW I (Januari); - TW II (April); - TW III (Juli); - TW IV (Oktober)
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan pengembangan BLUD	Ketidakiengkapan Dokumen Persyaratan BLUD	10	Tim penyusun tidak memahami secara detail regulasi dan persyaratan teknis BLUD	Proses penetapan BLUD tertunda atau bahkan ditola	Bentuk tim khusus dengan perwakilan dari semua unit terkait	Kepala Biro BUMD	- TW I (Januari); - TW II (April); - TW III (Juli); - TW IV (Oktober)
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Terdapat BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/ commitment letter hasil evaluasi kinerja	10	Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Jasa dan Produksi	Evaluasi Kinerja BUMD tidak memberikan nilai tambah	Desk tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi Kinerja triwulanan BUMD Jasa Keuangan	Kepala Biro BUMD	- TW I (Januari); - TW II (April); - TW III (Juli); - TW IV (Oktober)

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen rekomendasi kebijakan kajian Pengembangan dan hasil evaluasi BUMD Jasa Keuangan	Terdapat BUMD yang tidak menindaklanjuti rekomendasi/ commitment letter hasil evaluasi kinerja	10	Rekomendasi tidak mendukung/ tidak sesuai kebutuhan untuk capaian kinerja BUMD bidang Keuangan	Kinerja BUMD Keuangan tidak bertambah baik	Desk tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi Kinerja triwulanan BUMD Jasa Keuangan	Kepala Biro BUMD	- TW I (Januari); - TW II (April); - TW III (Juli); - TW IV (Oktober)
Biro Perekonomian								
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Hasil keputusan rakor tidak ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi	12	Instansi memiliki Program Prioritas yang Berbeda	potensi penyimpangan atau kegagalan program tidak terdeteksi dini	Monev pelaksanaan hasil rekomendasi	Asisten Perekonomian	- TW II (Mei) - TW IV (Nopember)
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Rekomendasi kebijakan pertanian dalam mendukung ketahanan pangan masih parsial	12	Penetapan rencana kegiatan yang kurang tepat dan adanya dinamika regulasi	Rekomendasi kebijakan belum mendorong ketahanan pangan di Jawa Tengah	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka monitoring capaian kinerja Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan - Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perkebunan	Asisten Perekonomian	- Triwulan I (Januari) - Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan II (April - Juni)

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Program Perekonomian Pembangunan	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup	Rekomendasi kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi Sumber Daya Mineral menjadi parsial	12	Tidak ada integrasi data Monev antar OPD	Rekomendasi tidak relevan	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka monitoring capaian kinerja Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral - Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan I (Januari) - Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan II (April - Juni)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rekomendasi kebijakan bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian menjadi parsial	12	Pengembangan geopark tidak menjadi prioritas kegiatan.	rendahnya tingkat kunjungan wisatawan dan perekonomian wilayah sekitar geopark	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka monitoring capaian kinerja Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian - Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian - Menyusun Rekomendasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan, Perikanan dan Pertanian	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan I (Januari) - Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan II (April - Juni)

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup	Reputasi geopark menurun	12	evaluasi atas efektivitas hasil fasilitasi tidak mencakup seluruh objek yang diberikan fasilitas	tidak ada pengembangan low carbon rice dan sustainable food	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Bidang Energi Sumber Daya Mineral yang melibatkan stakeholder mitra	Kepala Biro Perekonomian	Triwulan II
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase capaian kinerja program bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Pelaku usaha mengalami kendala dalam pengembangan Low Carbon Rice dan Sustainable Food	12	Informasi yang disajikan antar unit kerja tidak konsisten, menyebabkan kesalahan atau penundaan kegiatan	Penyelenggaraan kegiatan tidak dapat berjalan dengan tepat waktu dan tepat sasaran	Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka fasilitasi pengembangan Low Carbon Rice dan Sustainable Food yang melibatkan stakeholder mitra	Kepala Biro Perekonomian	Triwulan III
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup	Penurunan fungsi DAS di Jawa Tengah	12	Kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) menurun	Kerugian ekonomi masyarakat dan infrastruktur akibat banjir dan tanah longsor	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) - Mengadakan monitoring dalam rangka fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan program pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan III (Juli - Agustus)
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Lingkungan Hidup	Munculnya pola pengelolaan mangrove yang terpaku pada satu sektor	12	Pengelolaan mangrove terpisah-pisah	Ekosistem mangrove tidak dapat hidup dengan optimal	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi dan koordinasi program oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah - Mengadakan monitoring dalam rangka fasilitasi dan koordinasi program oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan II (April - Juni) - Triwulan III (Juli - Agustus)

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Energi Sumber Daya Mineral	Pelaksanaan kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah tidak sesuai dengan rencana/target	12	Menurunnya potensi manajemen energi pada sektor pemanfaatan energi	Output dari kegiatan manajemen energi tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah pada sektor pemanfaatan energi - Mengadakan monitoring dalam rangka pelaksanaan kegiatan manajemen energi di Provinsi Jawa Tengah pada sektor pemanfaatan energi	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan II (April - Juni) - Triwulan III (Juli - Agustus)
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	data kebutuhan pupuk bersubsidi tidak sesuai	12	Penyaluran pupuk bersubsidi terhambat	pupuk tidak tersalurkan secara merata dan tepat sasaran	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi - Mengadakan monitoring dan kunjungan lapangan dalam rangka fasilitasi penyaluran pupuk bersubsidi	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan II (April - Juni)

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	Rendahnya kualitas garam rakyat dan penurunan produktivitas dan hasil panen	12	Produksi garam dan hasil budidaya perikanan darat/tambak mengalami penurunan	- Garam rakyat tidak terserap oleh Industri secara maksimal - Kerugian finansial bagi pembudidaya	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka koordinasi kegiatan pengendalian harga garam rakyat dan pemanfaatan lahan budidaya perikanan darat/tambak di Jawa Tengah - Mengadakan monitoring dalam rangka koordinasi kegiatan pengendalian harga garam rakyat dan pemanfaatan lahan budidaya perikanan darat/tambak di Jawa Tengah	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan II (April - Juni)
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Tidak sesuainya kuota/alokasi BBM subsidi untuk nelayan	12	Masih banyak kapal perikanan yang belum terdata	Nelayan kesulitan mendapatkan BBM pada saat akan melaut	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka koordinasi kegiatan penyaluran BBM Subsidi dan BBM Industri untuk Kapal Perikanan - Mengadakan monitoring dalam rangka koordinasi kegiatan penyaluran BBM Subsidi dan BBM Industri untuk Kapal Perikanan	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan III (Juli - Agustus)
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan	Rendahnya minat masyarakat pada konsumsi pangan lokal	12	Adanya lahan produktif yang tidak digunakan masyarakat untuk budidaya bahan baku pangan lokal	1. Bahan Baku pangan local sangat terbatas 2. Kesulitan mendapatkan pelaku usaha pangan lokal	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi percepatan pengembangan pangan lokal - Mengadakan monitoring dalam rangka fasilitasi percepatan pengembangan pangan lokal	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan II (April - Juni)

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pangan	Rendahnya penerapan fortifikasi beras	12	Perencanaan berbasis data yang lemah	Fortifikasi bisa berjalan tanpa sasaran yang tepat (miskin data) dan tidak efektif menasar kelompok membutuhkan	- Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi penerapan fortifikasi beras - Mengadakan monitoring dalam rangka fasilitasi penerapan fortifikasi beras	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan II (April - Juni) - Triwulan III (Juli - Agustus)
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Jumlah rekomendasi kebijakan Pertanian	Kesenjangan penyebaran informasi dalam implementasi peraturan perundang-undangan terkait DBHCHT	12	Keterbatasan data yang dimiliki Kab/Kota	tidak dapat mengidentifikasi permasalahan implementasi program dan memberikan rekomendasi/solusi	- Memfasilitasi penyusunan bahan laporan semester dan laporan akhir kegiatan DBHCHT - Menyelenggarakan asistensi penyusunan RKA/RKP perubahan kegiatan DBHCHT - Menyusun bahan fasilitasi dan asistensi pelaksanaan DBHCHT Kab/Kota	Kepala Biro Perekonomian	- Triwulan I (Januari - Maret) - Triwulan IV (Oktober - Desember)
Biro Administrasi Pembangunan								
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Ekonomi Pembangunan	Indikator kinerja utama Pemerintah Daerah atau program strategis tidak tercapai	12	1. Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD kurang mendukung dalam upaya pencapaian indikator kinerja 2. Kebijakan yang tidak tepat sasaran atau adanya kebijakan yang tumpang tindih antar OPD	Penilaian kinerja pemerintah daerah turun	Menyusun rekomendasi hasil koordinasi dan pengendalian	Asisten Perekonomian	Triwulan III

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	realisasi belanja tidak sesuai dengan perencanaan pengadaan barang/jasa	20	Kurangnya pemahaman mengenai metode pemilihan pengadaan barang/jasa	Capaian ITKP (Indeks Tata Kelola Pengadaan) belum maksimal	1. Melaksanakan Monev PBJ meliputi review RUP, pendampingan RUP dan Sosialisasi peraturan PBJ anggaran murni. 2. Melaksanakan Monev PBJ meliputi review RUP, pendampingan RUP dan Sosialisasi peraturan PBJ anggaran perubahan.	Kepala Biro PBJ /Asisten Administrasi	1. TW I (Maret 2026) 2. TW III (September 2026)
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	1. Perencanaan pengadaan tidak matang 2. Data RUP tidak valid	16	- Pemahaman PA/KPA/PPK OPD yang belum seragam dalam penyusunan perencanaan pengadaan barang jasa - PA/KPA/PPK Kurang cermat dalam menetapkan RUP (Rencana Umum Pengadaan)	- Menghambat pelaksanaan pengadaan barang jasa - berpotensi aduan	1. Sosialisasi Buku Saku Perencanaan PBJ 2. Penerapan Kertas Kerja Perencanaan Pengadaan Barang Jasa sampai dengan Pelaksanaan PBJ	Kepala Biro APBJ Setda Prov Jateng	1. TW I Tahun 2026 2. TW II Tahun 2026
Biro Organisasi								
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Konsep kebijakan TPP belum sesuai kaidah yang berlaku	12	Perubahan regulasi belum tersosialisasi	Pemberian TPP tidak tepat sasaran	Penyusunan konsep TPP berbasis murni kelas jabatan, evidence sesuai yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku, dan dinamika manajemen kepegawaian dengan berpedoman terhadap ketersediaan anggaran Daerah	Asisten Administrasi	Triwulan III s.d IV
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Perda/Perkada SOTK tidak diterbitkan	12	Ketidaksesuaian dengan regulasi pusat	Struktur organisasi tidak sesuai kebutuhan	Melaksanakan rakor/sosialisasi regulasi kelembagaan	Asisten Administrasi	Triwulan I

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Meningkatnya sinergi kebijakan dan adaptif yang berorientasi pada hasil	Indeks kematangan Kebijakan Lingkup Administrasi	Proses pembangunan ZI tidak berjalan	12	Rendahnya komitmen pimpinan dan SDM di UK pembangunan ZI	Tujuan RB tidak tercapai, pelayanan publik tidak membaik	Sosialisasi dan Pencanangan pembangunan ZI kepada seluruh OPD	Asisten Administrasi	Triwulan IV
Program Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah yang nilai Evaluasi RB nya A	RB tidak diinternalisasi dalam tata kelola dan manajemen perubahan	12	RB masih dianggap beban administrasi dan belum dipahami secara utuh	Nilai RB tidak meningkat, pelayanan publik stagnan	Sosialisasi dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi OPD	Kepala Biro Organisasi	Triwulan IV
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tingkat pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah Biro Organisasi dan Asisten Administrasi	Barang digunakan tanpa izin untuk kegiatan non-pemerintah	12	Penyalahgunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Kerugian finansial perangkat daerah	Aturan peminjaman/penggunaan barang melalui izin tertulis.	Kepala Biro Organisasi	Triwulan I
Program Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	Sistem kerja tidak dilaksanakan sesuai prosedur	12	Sistem kerja tidak terdokumentasi atau tidak dipahami	Ketidakefisienan dan pemborosan sumber daya	Fasilitasi penerapan sistem kerja (pembuatan SK Kelompok Kerja dan penyesuaian proses bisnis dan SOP)	Kepala Biro Organisasi	Triwulan I
Program Penataan Organisasi	Jumlah UPT yang memperoleh nilai IPP Mandiri A - (Sangat Baik) dan A (Prima) dibagi jumlah UPT dikali 100 %	Pelayanan dan pelaksanaan tugas tidak seragam	12	SOP tidak disusun secara lengkap dan sesuai	Kinerja organisasi tidak terstandarisasi	Monitoring dan evaluasi SOP	Kepala Biro Organisasi	Triwulan III
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	Pendampingan dan pelaksanaan analisis jabatan tidak dilakukan	12	OPD tidak responsif	Penataan jabatan tidak sesuai kebutuhan	Pendampingan analisis jabatan OPD dan Kab/Kota	Kepala Biro Organisasi	Triwulan III (Juli - September)

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Review Analisis Jabatan OPD dan Review Analisis Jabatan kab/kota	SKJ tidak tersusun atau tidak ditetapkan	12	Kurangnya koordinasi antar OPD	Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi	Memperdomani SKJ sesuai peraturan yang telah ditetapkan yaitu untuk SKJ manajerial sesuai KepmenpanRB 409/2020, SKJ Jabatan Pelaksana sesuai KepmenpanRB nomor 01/2025, dan SKJ Jabatan Fungsional sesuai Peraturan Instansi Teknis JF terkait	Kepala Biro Organisasi	Triwulan I
Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Penataan Kelembagaan dan Penilaian Kematangan Organisasi Kabupaten/Kota	TND tidak dilaksanakan secara seragam	12	Kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap regulasi TND	Administrasi pemerintahan tidak tertib	Monitoring dan evaluasi TND	Kepala Biro Organisasi	Triwulan I
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelayanan Publik	Kebijakan pelayanan publik tidak diterapkan	12	Rendahnya komitmen Pemda Kab/Kota terhadap kebijakan Pemprov	Disparitas kualitas pelayanan antar daerah	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kab/Kota	Kepala Biro Organisasi	Triwulan IV
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Barang digunakan tanpa izin untuk keperluan di luar instansi	12	Penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi	Kerugian finansial dan penyalahgunaan aset daerah	Aturan peminjaman/penggunaan barang melalui izin tertulis.	Kepala Biro Organisasi	Triwulan I
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum perangkat daerah yang sesuai standar layanan Biro Organisasi	Barang yang tidak diperbaiki tetap dicatat sebagai sudah diperbaiki	12	Pemalsuan laporan pemeliharaan barang	Kerugian keuangan	Tanda tangan pejabat berwenang pada berita acara perbaikan.	Kepala Biro Organisasi	Triwulan I
Biro Umum								

Tujuan/Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran PD	Pernyataan Risiko	Skala Risiko	Sebab	Dampak	Rencana Tindak Pengendalian	Penanggungjawab	Target Waktu
Prgram Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase ketercapaian administrasi pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah pada Bagian Rumah Tangga Setda	Terjadinya kerusakan BMD	12	Kelalaian pengguna BMD	Menghambat kegiatan operasional	Memberikan bukti surat izin penggunaan kendaraan bermotor	Kepala Biro Umum	Semester I dan Semester II Tahun 2026